

Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.154
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	-	3	-	1	-
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	-	2	-	2	-
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	-	-	-	2	-

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

*) Data Sementara

Tahun 2013 Peraturan Daerah terkait perizinan sebanyak 3 (tiga) Perda dan 2 (dua) Perda terkait lalu lintas barang dan jasa yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Tahun 2015 Peraturan Daerah terkait perizinan sebanyak 1 (satu) Perda, 2 (dua) Perda terkait lalu lintas Barang dan Jasa dan 2 (dua) Perda terkait ketenagakerjaan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.

4. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di

fy

sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta

ff

sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju dengan pengertian diatas

Berdasarkan sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi Tipologi Desa yang bersumber dari Data Profil Desa Prodeskel Tahun 2013 dan Tahun 2014 terdapat 99 Desa dengan status Swadaya dan 19 Desa dengan Status Swakarya. Untuk Tahun 2015 dan 2016 masih mengacu pada Tahun 2014 karena sampai saat ini belum adanya pemekaran Desa di Kabupaten Kubu Raya. Jika mengacu pada klasifikasi diatas dapat dikatakan bahwa Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Akan tetapi harus tetap dikaji kembali berkenaan dengan status desa tersebut agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/kelurahan. Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.155 berikut:

Tabel 2.155
Satatus Desa Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Desa Swadaya	-	99	99	99	99
2.	Jumlah Desa Swakarya	-	19	19	19	19
3.	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Desa	117	118	118	118	118

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya
*) Data Sementara

2.1.5.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Kelulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio kelulusan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 tidak terdata dengan baik. Untuk Tahun 2014 berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya jumlah kelulusan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3) sebanyak 5.983 orang dengan 5.548 lulusan S1, 419 orang lulusan S2 dan 16 orang lulusan S3 dengan Rasio sebesar 0,0100. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016 jumlah kelulusan mulai dari jenjang Strata 1 (S1) sampai dengan Strata 3 (S3) sebanyak 6.142 orang dengan 5.609 lulusan S1, 498 orang lulusan S2 dan 35 orang lulusan S3 dengan rasio sebesar 0,0102. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.156 berikut:

Tabel 2.156
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Lulusan S1	-	-	5.548	5.603	5.609
2.	Jumlah Lulusan S2	-	-	419	457	498
3.	Jumlah Lulusan S3	-	-	16	23	35
4.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	-	-	5.983	6.083	6.142
5.	Jumlah Penduduk	566.394	591.197	596.669	597.502	603.477
	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	-	-	0,0100	0,0102	0,0102

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

*) Data Sementara

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependencyratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 2.157 berikut:

Tabel 2.157
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s/d Tahun 2016
Kabupaten Kubu Raya

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	145.553	148.997	144.149	146.825	148.293
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	24.173	25.022	29.611	29.530	29.825
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)	169.726	174.019	173.760	176.355	178.118
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	396.668	417.178	422.909	421.147	419.384
	Rasio Ketergantungan (%)	42,78	41,71	41,08	41,87	42,47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

*) Data Sementara

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Tahun 2012 sebanyak 169.726 jiwa penduduk usia tidak produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 42,78%. Tahun 2013 naik sebesar 5.293 jiwa menjadi 174.019 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 41,71% dan Tahun 2014 naik menjadi 173.760 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 41,08%, sedangkan Tahun 2015 naik lagi menjadi 176.355 jiwa dengan rasio ketergantungan 41,87%. Data sementara per Bulan Mei Tahun 2016

penduduk usia tidak produktif sebesar 178.118 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 42,47%.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu serta Tahun-Tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program Tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

RF

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Beberapa hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Handwritten signature or initials in blue ink.

LR

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD 2015		Realisasi Renja SKPD 2015		Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %				
					(4)	(5)	(6)	(7)		(8 = (7/6 x 100%))		(9)	(10=(5+8))	(11=(10/4))		
(1)	(2)	(3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang sinergis dan partisipatif		22.564.659,00		13.538.795,40		18.564.000,00		18.564.000,00		100,00	8.820.000,00	-	39,09	
1	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan SIPPD	1 Laporan	10.210.253,00	1 Laporan	6.126.151,80	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	8.820.000,00	1 Laporan	86,38
2	Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Renja SKPD	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	6.615.000,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
3	Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Renstra SKPD	1 Laporan	12.354.406,00	1 Laporan	7.412.643,60	1 Laporan	10.164.000,00	1 Laporan	10.164.000,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.046.775,475,00		208.065,285,00		274.134,256,20		274.134,256,20		100,00	307.840.969,05	307.840.969,05		29,41
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (1 tahun)	1 Tahun	1.148.653,00	1 Tahun	689.191,80	1 Tahun	945.000,00	1 Tahun	945.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	992.250,00	1 Tahun	86,38

281

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Listrik (1 tahun)	1 Tahun	104.910.344,00	1 Tahun	62.946.206,40	1 Tahun	86.310.000,00	1 Tahun	86.310.000,00	1 Tahun	90.625.500,00	1 Tahun	90.625.500,00	1 Tahun	86,38
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Service dan Pajak Kendaraan kantor (1 tahun)	1 Tahun	1.786.794,00	1 Tahun	1.072.076,40	1 Tahun	1.470.000,00	1 Tahun	1.470.000,00	1 Tahun	1.543.500,00	1 Tahun	1.543.500,00	1 Tahun	86,38
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan (1 tahun)	1 Tahun	4.594.614,00	1 Tahun	2.756.768,40	1 Tahun	3.780.000,00	1 Tahun	3.780.000,00	1 Tahun	3.969.000,00	1 Tahun	3.969.000,00	1 Tahun	86,38
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor (1 tahun)	1 Tahun	20.803.389,00	1 Tahun	12.482.033,40	1 Tahun	17.115.000,00	1 Tahun	17.115.000,00	1 Tahun	17.970.750,00	1 Tahun	17.970.750,00	1 Tahun	86,38
5	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya jasa honorarium petugas pekerja	1 Tahun	700.000.000,00	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK (1 tahun)	1 Tahun	31.857.264,00	1 Tahun	19.114.358,40	1 Tahun	26.209.050,00	1 Tahun	26.209.050,00	1 Tahun	27.519.502,54	1 Tahun	27.519.502,54	1 Tahun	86,38
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	1 Tahun	29.751.400,00	1 Tahun	17.850.840,00	1 Tahun	24.476.550,00	1 Tahun	24.476.550,00	1 Tahun	25.700.377,50	1 Tahun	25.700.377,50	1 Tahun	86,38

2017

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Perengkapan dan Peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	1.914.422,00	1 Tahun	1.148.653,20	1 Tahun	1.575.000,00	1 Tahun	1.575.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	1.653.750,00	1 Tahun	1.653.750,00	1 Tahun	86,38
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah (1 tahun)	1 Tahun	8.423.458,00	1 Tahun	5.054.074,80	1 Tahun	6.930.000,00	1 Tahun	6.930.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	7.276.500,00	1 Tahun	7.276.500,00	1 Tahun	86,38
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor (1 tahun)	1 Tahun	7.657.689,00	1 Tahun	4.594.613,40	1 Tahun	6.300.000,00	1 Tahun	6.300.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	6.615.000,00	1 Tahun	6.615.000,00	1 Tahun	86,38
11	Rapat-kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan kordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	73.401.817,00	1 Tahun	44.041.090,20	1 Tahun	60.387.856,20	1 Tahun	60.387.856,20	1 Tahun	100,00	1 Tahun	63.407.249,01	1 Tahun	63.407.249,01	1 Tahun	86,38
12	Rapat-kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan kordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	25.525.631,00	1 Tahun	15.315.378,60	1 Tahun	21.000.000,00	1 Tahun	21.000.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	22.050.000,00	1 Tahun	22.050.000,00	1 Tahun	86,38
13	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	-
14	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Laporan SOP	1 Laporan SOP	35.000.000,00	1 Laporan SOP	21.000.000,00	1 Laporan SOP	17.635.800,00	1 Laporan SOP	17.635.800,00	1 Laporan SOP	100,00	1 Laporan SOP	18.517.590,00	1 Laporan SOP	18.517.590,00	1 Laporan SOP	52,91

2017

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur		631.378.295,00	378.826.977,00	473.722.200,00	473.722.200,00	100,00	545.408.310,00	545.408.310,00	86,38
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas	Motor dan Mobil Dinas	55.566.000,00	33.339.600,00	-	-	-	48.000.000,00	48.000.000,00	86,38
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	55.472.302,00	33.283.381,20	1 Tahun	45.637.200,00	1 Tahun	47.919.060,00	47.919.060,00	86,38
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	41.160.080,00	24.696.048,00	1 Tahun	33.862.500,00	1 Tahun	35.555.625,00	35.555.625,00	86,38
4	Pengadaan mebeleur	pengadaan mebeleur kantor	1 Tahun	78.108.432,00	46.865.059,20	1 Tahun	64.260.000,00	1 Tahun	67.473.000,00	67.473.000,00	86,38
5	Penyediaan Sewa Gedung Kantor	Sewa Gedung Dinas Dukcapil	1 Tahun	344.596.022,00	206.757.613,20	1 Tahun	283.500.000,00	1 Tahun	297.675.000,00	297.675.000,00	86,38
6	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/Operasional	Service mobil dan bhm selama 1 tahun	1 Tahun	28.333.451,00	17.000.070,60	1 Tahun	23.310.000,00	1 Tahun	24.475.500,00	24.475.500,00	86,38
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Service	1 Tahun	9.189.227,00	5.513.536,20	1 Tahun	7.560.000,00	1 Tahun	7.938.000,00	7.938.000,00	86,38
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (1 tahun)	1 Tahun	18.952.781,00	11.371.668,60	1 Tahun	15.592.500,00	1 Tahun	16.372.125,00	16.372.125,00	86,38

LCAT

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Gedung kantor																			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketaatan dan dan kepatuhan tupoksi, waktu sebagai		51.822.137,00	31.093.282,20	18.655.969,32	52.336.200,00	280,53	-	54.953.010,00	106,04									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkap lainnya	Pengadaan pakaian dinas PNS	Pakai an Dinas PNS	20.101.435,00	Pakaian Dinas PNS 12.060.861,00	16.537.500,00	Pakaian Dinas PNS 16.537.500,00	Pakaian Dinas PNS 100,00	Pakaian Dinas PNS 17.364.375,00	Pakaian Dinas PNS 17.364.375,00	Pakaian Dinas PNS 86,38									
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakai an khusus hari-hari tertentu	-	-	26.096.700,00	26.096.700,00	100,00	27.401.535,00	27.401.535,00	-									
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	Pengadaan pakaian olahraga	pakai an olahraga PNS	31.720.702,00	pakaian olahraga PNS 19.032.421,20	9.702.000,00	pakaian olahraga PNS 9.702.000,00	100,00	pakaian olahraga PNS 10.187.100,00	pakaian olahraga PNS 10.187.100,00	32,11									
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD		241.484.437,00	144.890.662,20	104.881.761,00	104.881.761,00	100,00	174.125.849,68	174.125.849,68	72,11									
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek	Bimtek	95.721.117,00	Bimtek 57.432.670,20	78.750.000,00	Bimtek 78.750.000,00	100,00	Bimtek 82.687.500,00	Bimtek 82.687.500,00	86,38									

24

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

2	In House Training	Training	Training	79.000.000,00	Training	47.400.000,00	Training	-	Training	-	Training	64.000.000,00	Training	64.000.000,00	Training	81,01
3	Pengembangan Wawasan	Studi Banding	Studi Banding	35.000.000,00	Studi Banding	21.000.000,00	Studi Banding	-	Studi Banding	-	Studi Banding	-	Studi Banding	-	Studi Banding	-
4	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Laporan ANUAB	1 Laporan	31.763.320,00	1 Laporan	19.057.992,00	1 Laporan	26.131.761,00	1 Laporan	26.131.761,00	1 Laporan	27.438.349,68	1 Laporan	27.438.349,68	1 Laporan	86,38
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD		82.958.302,00		49.774.981,20		68.250.000,00		68.250.000,00		71.662.500,00		71.662.500,00		86,38
	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Laporan LAKIP dan TAPKIN	1 Laporan	12.762.816,00	1 Laporan	7.657.689,60	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	86,38
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	19.144.223,00	1 Laporan	11.486.533,80	1 Laporan	15.750.000,00	1 Laporan	15.750.000,00	1 Laporan	16.537.500,00	1 Laporan	16.537.500,00	1 Laporan	86,38
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	38.288.447,00	1 Laporan	22.973.068,20	1 Laporan	31.500.000,00	1 Laporan	31.500.000,00	1 Laporan	33.075.000,00	1 Laporan	33.075.000,00	1 Laporan	86,38
	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan LPPD	1 Laporan	12.762.816,00	1 Laporan	7.657.689,60	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	11.025.000,00	1 Laporan	86,38

201

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

7 Program Penataan Administrasi Kependudukan		Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jenis)	1.950.685,30 7,00	1.170.411,18 4,20	1.578.477,6 77,70	1.578.477. 677,70	100,00	1.665.075,31 1,59	1.665.075,31 1,59	85,36
1	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlaksananya pelatihan SIAK	1 paket 165.916,603, 00	1 paket 99.549.961,8 0	1 paket 136.500.000, 00	1 paket 136.500,0 00,00	100,00	1 paket 143.325.000, 00	1 paket 143.325.000, 00	86,38
2	Peningkata n pelayanan publik dalam bidang kependudu kan	Terlaksananya pelayanan publik administrasi kependudukan	honor non pns dan pelay anan 12 bulan 527.055.787, 00	honor non pns dan pelay anan 12 bulan 316.233.472, 20	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 433.610.100, 00	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 433.610,1 00,00	100,00	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 455.290.605, 00	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 455.290.605, 00	86,38
3	Sosialisasi kebijakan kependudu kan	Terlaksananya sosialisai kebijakan kependudukan	9 keca mata n 60.636.469,0 0	9 keca mata n 36.381.881,4 0	9 kecam tan 49.885.773,0 0	9 kecam tan 49.885,77 3,00	100,00	9 kecam tan 52.380.061,6 5	9 kecam tan 52.380.061,6 5	86,38
4	Penyediaan cetak administras i kependudu kan dan pencatatan sipil	Tersedianya blanko cetak administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 paket 253.341.890, 00	1 paket 152.005.134, 00	1 paket 208.425.000, 00	1 paket 208.425,0 00,00	100,00	1 paket 218.846.250, 00	1 paket 218.846.250, 00	86,38
5	Peningkata n pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	honor non pns dan pelay anan 12 bulan 194.649.050, 00	honor non pns dan pelay anan 12 bulan 116.789.430, 00	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 160.138.255, 20	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 160.138,2 55,20	100,00	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 168.145.167, 96	honor non pns dan pelayan an 12 bulan 168.145.167, 96	86,38
6	Penyusuna n kebijakan pencatatan sipil	Terlaksananya penyusunan kebijakan pencatatan sipil	1 paket 74.744.153,0 0	1 paket 44.846.491,8 0	1 paket 61.492.200,0 0	1 paket 61.492,20 0,00	100,00	1 paket 64.566.810,0 0	1 paket 64.566.810,0 0	86,38

62

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan	1 paket	28.029,058,00	1 paket	16.817,434,80	1 paket	23.059,575,00	1 paket	23.059,575,00	1 paket	100,00	1 paket	24.212,553,75	1 paket	24.212,553,75	1 paket	86,38
7	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan	12 bulan	4.681,592,00	12 bulan	2.808,955,20	12 bulan	3.851,557,50	12 bulan	3.851,557,50	12 bulan	100,00	12 bulan	4.044,135,38	12 bulan	4.044,135,38	12 bulan	86,38
8	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya akses informasi administrasi kepada masyarakat	1 paket	6.011,286,00	1 paket	3.606,771,60	1 paket	4,945,500,00	1 paket	4,945,500,00	1 paket	100,00	1 paket	5,192,775,00	1 paket	5,192,775,00	1 paket	86,38
9	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (KTP-el)	Terlaksananya pelayanan perekaman, pencetakan, dan pendistribusian KTP elektronik	pelayanan ktp-el 12 bulan	287,838,300,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	172,702,980,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	236,805,282,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	236,805,282,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	100,00	pelayanan ktp-el 12 bulan	248,645,546,10	pelayanan ktp-el 12 bulan	248,645,546,10	pelayanan ktp-el 12 bulan	86,38
	Facilitasi pelayanan pindah datang dan penduduk rentan	Terlaksananya pelayanan pindah datang penduduk	1 paket	6,834,743,00	1 paket	4,100,845,80	1 paket	5,622,960,00	1 paket	5,622,960,00	1 paket	100,00	1 paket	5,904,108,00	1 paket	5,904,108,00	1 paket	86,38
12	Penyusunan profil perkembangan kependudukan	Terlaksananya penyusunan profil perkembangan penduduk	1 kali	28,180,297,00	1 kali	16,908,178,20	1 kali	23,184,000,00	1 kali	23,184,000,00	1 kali	100,00	1 kali	24,343,200,00	1 kali	24,343,200,00	1 kali	86,38

11-189

291

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	kan																			
	Verifikasi Dokumen kependudukan	Terlaksananya Verifikasi Dokumen kependudukan	1 paket	23.152.500,00	1 paket	13.891.500,00	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	7.673.750,00	1 paket	7.673.750,00	1 paket	33,14				
8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	terpenuhinya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	21.441.530,00	12.864.918,00	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00	18.522.000,00	18.522.000,00	86,38										
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya kegiatan pengolahan dan penyimpanan arsip	dinas dukcapil	21.441.530,00	dinas dukcapil	12.864.918,00	dinas dukcapil	17.640.000,00	dinas dukcapil	17.640.000,00	dinas dukcapil	18.522.000,00	dinas dukcapil	18.522.000,00	dinas dukcapil	86,38				
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD (tahun)	25.877.885,00	15.526.731,00	21.289.800,00	21.289.800,00	100,00	22.354.290,00	22.354.290,00	86,38										
1	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan SKPD	Tersedianya tenaga pengelola keuangan	1 paket	12.762.816,00	1 paket	7.657.689,60	1 paket	10.500.000,00	1 paket	10.500.000,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	11.025.000,00	1 paket	86,38				
2	Fasilitasi pengelolaan aset	Tersedianya tenaga pengelola aset	1 paket	13.115.069,00	1 paket	7.869.041,40	1 paket	10.789.800,00	1 paket	10.789.800,00	1 paket	11.329.290,00	1 paket	11.329.290,00	1 paket	86,38				

241

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

No	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) 2016		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
			4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10=(5+8)	11=(10/4)						
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang sinergis dan partisipatif		14.641.000 ,00		8.784.600,00		10.000.500, 00		10.000.500, 00		100,00		-		-
	Sistem Informasi Perencana an Pembangu nan Daerah	Laporan SIPPD	1 Lapora n	14.641.000 ,00	1 Lapora n	8.784.600,00	1 Lapora n	10.000.500, 00	1 Lapora n	10.000.500, 00	1 Lapora n	100,00	-	-	-	-
2	Program Pemberdayaan Kelompok Kesejahteraan Sosial	Kelancaran Proses Bansos/ Hibah dan Keteepatan dalam Penggunaannya		21.961.500 ,00		13.176.900,0 0		14.999.550, 00		14.999.550, 00		100,00		25.000.000, 00		113,84
	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah/Bans os	Laporan Monitoring Hibah/Bansos	1 Lapora n	21.961.500 ,00	1 Lapora n	13.176.900,0 0	1 Lapora n	14.999.550, 00	1 Lapora n	14.999.550, 00	1 Lapora n	100,00	1 Lapora n	25.000.000, 00	1 Lapora n	113,84
3	Program Peningkatan dan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset		22.693.550 ,00		13.616.130,0 0		9.994.700,0 0		9.994.700,0 0		100,00		-		-

241

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		SKPD																		
	Fasilitasi	Laporan Barang Milik																		
1	Pengelolaan Aset Pada SKPD	Daerah di SKPD	1 Laporan	22.693.550,00	1 Laporan	13.616.130,00	1 Laporan	9.994.700,00	1 Laporan	9.994.700,00	1 Laporan	100,00	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		504.607.920,00		302.764.752,00		346.043.350,00		326.642.950,00		94,39		363.343.400,00		363.343.400,00		72,01		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (1 tahun)	1 Tahun	82.209.215,00	1 Tahun	49.325.529,00	1 Tahun	61.200.000,00	1 Tahun	27.200.000,00	1 Tahun	44,44	1 Tahun	20.400.000,00	1 Tahun	20.400.000,00	1 Tahun	24,81		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik (1 tahun)						31.000.000,00		39.600.000,00				54.000.000,00		54.000.000,00				
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Service dan Pajak Kendaraan Kantor (1 tahun)								32.298.000,00				37.134.000,00		37.134.000,00				
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan (1 tahun)	1 Tahun	5.929.605,00	1 Tahun	28.374.258,00	1 Tahun	62.720.000,00	1 Tahun	62.720.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	63.869.000,00	1 Tahun	63.869.000,00	1 Tahun	1.077,12		
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (1 tahun)	1 Tahun	59.588.870,00	1 Tahun	35.753.322,00	1 Tahun	40.700.000,00	1 Tahun	40.700.000,00	1 Tahun	100,00	1 Tahun	41.069.000,00	1 Tahun	41.069.000,00	1 Tahun	68,92		
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK (1 tahun)	1 Tahun	33.674.300,00		20.204.580,00		14.399.550,00		14.399.550,00		100,00		11.752.200,00		11.752.200,00		34,90		

201

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

7	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan (1 tahun)	1 Tahun	13.235.464,00	1 Tahun	7.941.278,40	1 Tahun	9.040.000,00	1 Tahun	9.040.000,00	1 Tahun	10.636.000,00	1 Tahun	10.636.000,00	1 Tahun	80,36
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	4.597.274,00	1 Tahun	2.758.364,40	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	16.000.000,00	1 Tahun	19.425.000,00	1 Tahun	19.425.000,00	1 Tahun	422,53
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah (1 tahun)	1 Tahun	7.466.910,00	1 Tahun	4.480.146,00	1 Tahun	5.100.000,00	1 Tahun	5.100.000,00	1 Tahun	5.100.000,00	1 Tahun	5.100.000,00	1 Tahun	68,30
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor (1 tahun)	1 Tahun	13.176.900,00	1 Tahun	7.906.140,00	1 Tahun	9.000.000,00	1 Tahun	9.000.000,00	1 Tahun	10.930.000,00	1 Tahun	10.930.000,00	1 Tahun	82,95
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	93.621.874,00	1 Tahun	56.173.124,40	1 Tahun	30.945.000,00	1 Tahun	30.945.000,00	1 Tahun	39.840.000,00	1 Tahun	39.840.000,00	1 Tahun	42,55
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	57.363.438,00	1 Tahun	34.418.062,80	1 Tahun	30.120.000,00	1 Tahun	30.120.000,00	1 Tahun	39.960.000,00	1 Tahun	39.960.000,00	1 Tahun	69,66
13	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Laporan SOP	1 Tahun	55.707.540,00	1 Tahun	33.424.524,00	1 Tahun	9.520.800,00	1 Tahun	9.520.400,00	1 Tahun	9.228.200,00	1 Tahun	9.228.200,00	1 Tahun	16,57

281

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur		80.679.526,00		48.407.715,60		140.888.800,00		137.958.400,00		217.968.200,00		217.968.202,00		270,17
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas	1 Motor Dinas	15.000.000,00	-	-	-	77.488.800,00	-	77.488.400,00	-	48.638.200,00	-	48.638.202,00	-	324,25
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	14.641.000,00	1 Tahun	8.784.600,00	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	74.700.000,00	1 Tahun	74.700.000,00	1 Tahun	510,21
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	32.210.200,00	1 Tahun	19.326.120,00	1 Tahun	22.000.000,00	1 Tahun	22.000.000,00	1 Tahun	24.400.000,00	1 Tahun	24.400.000,00	1 Tahun	75,75
4	Pengadaan mebelur	pengadaan mebelur kantor	1 Tahun	9.955.880,00	1 Tahun	5.973.528,00	1 Tahun	16.800.000,00	1 Tahun	16.800.000,00	1 Tahun	56.400.000,00	1 Tahun	56.400.000,00	1 Tahun	566,50
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sewa gedung kantor	1 Tahun	4.538.710,00	1 Tahun	2.723.226,00	1 Tahun	11.670.000,00	1 Tahun	-	9.875.000,00	1 Tahun	9.875.000,00	1 Tahun	217,57	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (1 tahun)	1 Tahun	4.333.736,00	1 Tahun	2.600.241,60	1 Tahun	2.930.000,00	1 Tahun	11.670.000,00	1 Tahun	3.955.000,00	1 Tahun	3.955.000,00	1 Tahun	91,26
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketaatan dan dan kepatuhan tupoksi, waktu dan atribut sebagai APARATUR		6.000.000,00		3.600.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		233,33
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Pengadaan pakaian dinas PNS	Pakaian Dinas PNS			-	Pakaian Dinas PNS	-	Pakaian Dinas PNS	-	Pakaian Dinas PNS		14.000.000,00	14.000.000,00	Pakaian Dinas PNS	#DIV/0!

28-1

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Perlengkapannya																			
2	Pengadaan Pakaiannya Olahraga	Pengadaan pakaian olahraga	6.000.000,00		3.600.000,00		5.720.000,00		5.720.000,00		100,00		-		-					
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD	125.212.979,00		75.127.787,40		28.305.500,00		28.305.500,00		100,00		39.518.200,00		39.518.200,00				31,56	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek					23.730.000,00		23.730.000,00				26.160.000,00		26.160.000,00					
2	Penyusunan Analisis Jabatan SKPD	Laporan ANJAB	Bimtek 107.904.170,00	Bimtek 64.742.502,00	Bimtek 10.385.285,40	Bimtek 4.575.500,00	Bimtek 100,00	Bimtek 13.358.200,00	Bimtek 100,00	Bimtek 100,00	Bimtek 13.358.200,00	Bimtek 100,00	Bimtek 13.358.200,00	Bimtek 100,00	Bimtek 13.358.200,00	Bimtek 100,00	Bimtek 13.358.200,00	Bimtek 100,00	24,24	77,18
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD																		
1	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan LAKIP dan TAPKIN	1 20.000.000,00	1 62.156.665,80	1 53.056.200,00	1 7.497.750,00	1 100,00	1 59.782.500,00	1 100,00	1 59.782.500,00	1 7.309.500,00	1 100,00	1 59.782.500,00	1 7.309.500,00	1 59.782.500,00	1 7.309.500,00	1 59.782.500,00	1 7.309.500,00		57,71
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Laporan Keuangan Semesteran	1 17.719.460,00	1 10.631.676,00	1 10.600.000,00	1 10.600.800,00	1 100,01	1 13.798.000,00	1 100,01	1 13.798.000,00	1 100,01	1 13.798.000,00	1 100,01	1 13.798.000,00	1 100,01	1 13.798.000,00	1 100,01	1 13.798.000,00		36,55

cat

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Program Pengembangan Pusat Kemasyarakatan																		
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan		301.597.300,00		180.958.380,00		105.924.600,00	105.924.600,00		100,00	87.904.900,00	87.904.904,00	29,15					
1	1 Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa	Pembinaan Manajemen BUMDEsa	9 Desa	130.000,000,00	9 Desa	78.000,000,00	9 Desa	18.090.400,00	18.090.400,00	9 Desa	100,00	43.844.700,00	43.844.702,00	33,73					
2	2 Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTE K)	Penguatan Posyantek untuk penyebaran Informasi TTG kedesadesa	9 PosyanteK	224.000,000,00	9 PosyanteK	134.400,000,00	9 PosyanteK	68.106.550,00	68.106.550,00	9 PosyanteK	100,00	35.050.000,00	35.050.002,00	15,65					
3	3 Pengelolaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dalam rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan		77.597.300,00	2 Desa	46.558.380,00	2 Desa	37.818.050,00	37.818.050,00	2 Desa	100,00	52.854.900,00	52.854.902,00	68,11					
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa		960.000,000,00	2 Desa	576.000,000,00	2 Desa	561.868.500,00	561.868.500,00	2 Desa	100,00	535.329.300,00	535.329.300,00	55,76					

1	Fasilitasi Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya musyawarah desa dan tersedianya dokumen perencanaan desa sesuai dengan RPJMDes	24 Desa	200.000,00 0,00	24 Desa	120.000.000,00	24 Desa	31.690.000,00	24 Desa	31.690.000,00	24 Desa	86.839.500,00	9 Desa	117.000.000,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	100,00	24 Desa	21.454.850,00	24 Desa	125.959.900,00	9 Desa	125.959.900,00	24 Desa	21.454.850,00	-	10,73
2	Pelaksanaan Perombaan Desa	Pelaksanaan Perombaan Desa	9 Desa	195.000,00 0,00	9 Desa	117.000.000,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	86.839.500,00	9 Desa	100,00	9 Desa	125.959.900,00	9 Desa	125.959.900,00	9 Desa	125.959.900,00	9 Desa	64,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-royong	Pelaksanaan BBGR	9 Kecamatan	65.000.000,00	9 Kecamatan	39.000.000,00	9 Kecamatan	364.276.150,00	9 Kecamatan	364.276.150,00	9 Kecamatan	100,00	9 Kecamatan	62.468.500,00	9 Kecamatan	62.468.500,00	9 Kecamatan	62.468.500,00	9 Kecamatan	96,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pameran Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan Pameran TTG	3 Inovasi	145.000,00 0,00	3 Inovasi	87.000.000,00	3 Inovasi	79.062.850,00	3 Inovasi	79.062.850,00	3 Inovasi	100,00	3 Inovasi	67.872.000,00	3 Inovasi	67.872.000,00	3 Inovasi	67.872.000,00	3 Inovasi	46,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Fasilitas Pembinaan Desa Model	Pelaksanaan Pembinaan Desa Model	1 Desa	105.000,00 0,00	1 Desa	63.000.000,00	1 Desa	-	1 Desa	-	1 Desa	#DIV/0!	1 Desa	37.832.000,00	1 Desa	37.832.000,00	1 Desa	37.832.000,00	1 Desa	36,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Fasilitas Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK	-	135.000,00 0,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	110.395,00 0,00	-	110.395,00 0,00	-	110.395,00 0,00	-	81,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitas dan Pendampingan Desa Binaan	Pelaksanaan Pendampingan Desa Binaan	2 Desa	115.000,00 0,00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	109.347,05 0,00	-	109.347,05 0,00	-	109.347,05 0,00	-	95,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya Kapasitas SDM SKPD	-	68.000.000,00	-	40.800.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Kapasitas	Bimtek	2 Bimtek	68.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	17.000.000,	-	17.000.000,	-	17.000.000,	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

241

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	Pengelolaan Keuangan SKPD		k	,00																	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																			
13	Aparatur Pemerintahan Desa			1.746.033.023,00		1.047.619.813,80		387.275.550,00		387.275.550,00			100,00		317.772.500,00		317.772.500,00		18,20		
1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Pelatihan an		1 Pelatihan an	57.090.757,80	1 Pelatihan an	42.688.100,00	1 Pelatihan an	42.688.100,00	1 Pelatihan an		100,00	1 Pelatihan an	81.693.000,00	1 Pelatihan an	81.693.000,00	1 Pelatihan an	85,86		
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	Pembinaan Pemilihan Kepala Desa	30 Desa	192.666,760,00	30 Desa	115.600,056,00	30 Desa	77.696.750,00	30 Desa	77.696.750,00	30 Desa			30 Desa	-	30 Desa	-				
3	Peresmian dan Penggantian Anggota BPD	Peresmian dan Penggantian anggota BPD	118 Desa	105.896,000,00	118 Desa	63.537.600,00	118 Desa	40.760.700,00	118 Desa	40.760.700,00	118 Desa		100,00	118 Desa	45.410.000,00	118 Desa	45.410.000,00	118 Desa	42,88		
4	Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	Raker Kepala Desa se-Kabupaten Kubu Raya	118 Desa	152.319,000,00	118 Desa	91.391.400,00	118 Desa	63.793.850,00	118 Desa	63.793.850,00	118 Desa			118 Desa	126.216,000,00	118 Desa	126.216,000,00	118 Desa	82,86		
5	Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan Laporan Penyelengg	Pelaksanaan Penyusunan RPJMDES	1 Pelatihan an	105.000,000,00	1 Pelatihan an	63.000,000,00	1 Pelatihan an	96.336.150,00	1 Pelatihan an	96.336.150,00	1 Pelatihan an		100,00	1 Pelatihan an	-	1 Pelatihan an	-	1 Pelatihan an	-		

241

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

	araan Pemerinta h Desa																			
6	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa	30 Desa	1.000.000. 000,00	30 Desa	600.000.000, 00	30 Desa	66.000.000, 00	30 Desa	66.000.000, 00	30 Desa	-	30 Desa	-	30 Desa	-	30 Desa	-		
7	Pembinaan Administrasi Desa	Tertib Administrasi Desa	118 Desa	95.000.000 ,00	118 Desa	57.000.000,0 0	118 Desa	-	118 Desa	-	118 Desa	64.453.500, 00	118 Desa	64.453.500, 00	118 Desa	67,85				
1 4	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan		125.000.00 0,00		75.000.000,0 0		60.388.000, 00		60.388.000, 00		78.695.900, 00		78.695.902, 00		62,96				
1	1 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terfasilitasinya Kegiatan P2WKSS		125.000.00 0,00	1 Desa	75.000.000,0 0	1 Desa	60.388.000, 00		60.388.000, 00		78.695.900, 00		78.695.902, 00						
1 5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa		534.000.00 0,00		320.400.000, 00		319.279.500 ,00		319.279.50 0,00		460.656.80 0,00		460.656.80 0,00		86,27				
1	1 Monitoring dan pelaporan pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Pengelolaan ADD	118 Desa	120.000.00 0,00	118 Desa	72.000.000,0 0	118 Desa	53.570.000, 00	118 Desa	53.570.000, 00	118 Desa	71.497.900, 00	118 Desa	71.497.900, 00	118 Desa	59,58				

CR

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

2	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan APBDES	Pembinaan penyusunan APBDES	118 Desa	130.000,00 0,00	118 Desa	78.000.000,0 0	118 Desa	124.088.800 ,00	118 Desa	124.088.80 0,00	118 Desa	100,00	118 Desa	127.731.80 0,00	118 Desa	127.731.80 0,00	118 Desa	98,26
3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	118 Desa	145.000,00 0,00	118 Desa	87.000.000,0 0	118 Desa	141.620.700 ,00	118 Desa	141.620.70 0,00	118 Desa	100,00	118 Desa	128.882,40 0,00	118 Desa	128.882,40 0,00	118 Desa	88,88
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa		118 Desa	139.000,00 0,00	118 Desa	83.400.000,0 0	118 Desa	-	118 Desa	-	#DIV/0!	118 Desa	132.544,70 0,00	118 Desa	132.544,70 0,00	118 Desa	95,36	
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PNPM	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan PNPM		279.000,00 0,00		167.400.000, 00		79.743.000, 00		79.743.000, 00		100,00		165.060,00 0,00		165.060,00 2,00		59,16
1	Fasilitasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas	Pembinaan PNPM GSC	9 Kecamatan	279.000,00 0,00	9 Kecamatan	167.400.000, 00	9 Kecamatan	79.743.000, 00	9 Kecamatan	79.743.000, 00	9 Kecamatan	100,00	9 Kecamatan	165.060,00 0,00	9 Kecamatan	165.060,00 2,00	9 Kecamatan	59,16
1	Program Penataan Wilayah Pemerintahan Desa	Tertatanya Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa		561.512,00 0,00		336.907.200, 00		253.225.300 ,00		253.225.30 0,00		100,00		708.985,00 0,00		708.985,00 0,00		126,26

241

RKPD Tahun 2017

Evaluasi dan Capaian Kinerja

1	Pembentukan, pemekaran dan penghapusan Desa	Terlaksananya Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan Desa	2 Desa	105.343,00	2 Desa	63.205.800,00	2 Desa	21.850.150,00	2 Desa	21.850.150,00	2 Desa	355.042.300,00	2 Desa	355.042.300,00	2 Desa	337,03
2	Pemetaan dan Pemanfaatan Tata Batas Desa	Terselesainya Tata Batas Desa	5 Desa	400.200,00	5 Desa	240.120.000,00	5 Desa	209.037.300,00	5 Desa	209.037.300,00	5 Desa	331.604.800,00	5 Desa	331.604.800,00	5 Desa	82,86
3	Penyusunan Profil Desa	Laporan Profil Desa	3 Profil Desa	55.969.000,00	3 Profil Desa	33.581.400,00	3 Profil Desa	22.337.850,00	3 Profil Desa	22.337.850,00	3 Profil Desa	22.337.900,00	3 Profil Desa	22.337.900,00	3 Profil Desa	39,91
1 dan 8	Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa	Meningkatnya Pengelolaan Aset Desa		245.680,00		147.408.000,00		54.165.000,00		54.165.000,00		102.615.550,00		102.615.550,00		41,77
1	Fasilitasi dan Pendampingan Inventarisasi Aset-Desa	Laporan Inventarisasi Aset Desa	10 Data Inventarisasi Aset Desa	108.757,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	65.254.200,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	54.165.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	54.165.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	45.299.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	45.299.000,00	10 Data Inventarisasi Aset Desa	41,65
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Bimtek Pengelolaan Aset Desa	1 Bimtek	136.923,00	1 Bimtek	82.153.800,00	1 Bimtek	-	1 Bimtek	-	1 Bimtek	57.316.550,00	1 Bimtek	57.316.550,00	1 Bimtek	41,86

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga pendidik masih yang kurang di daerah pesisir atau terpencil baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK berdampak pada penangkapan pada bidang studi yang diajarkan;
- 2) Anggaran yang belum mencukupi berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan lomba siswa dan pendidik demi peningkatan kualitas pendidik baik ditingkat Kabupaten, provinsim maupun internasional;
- 3) Masih banyaknya gedung sekolah yang rusak terutama SD, kurang USB/RKB untuk SMP dan SMA/SMK;
- 4) Belum dilakukan analisis/ kajian dari aspek terkait beban kerja, aspek SDM, keuangan, serta prioritas visi dan misi;
- 5) Terdapat aparatur yang belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan terkait penempatannya.

2.3.2 Urusan Kesehatan

Permasalahan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- 2) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi didaerah perkotaan.
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta minimnya prasarana pendukung.
- 4) Masih adanya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan derajat kesehatan seperti kematian dan yang berhubungan dengan persalinan, masih terjadinya lonjakan penyakit seperti Demam berdarah pada Tahun 2014.

2.3.3 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penanganan terhadap potensi Sumber Daya Alam yang ada;
- 2) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- 3) Lemahnya/rendahnya kapasitas dan kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan SPM salah satu belum masuk rencana Kerja Kerja yang telah ditetapkan, yaitu terkait dengan parameter penelitian kerusakan tanah akibat kegiatan pertanian, perkebunan dan hortikultura;
- 5) Gedung dan SDM Laboratorium Daerah belum ada, sementara sarana dan prasarana berupa kendaraan dan peralatan laboratorium dari anggaran DAK dan APBD Kabupaten Kubu Raya telah tersedia dan disimpan diruangan kantor Badan Lingkungan Hidup yang belum maksimal difungsikan.

2.3.4 Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi adalah :

A. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- 2) Koordinasi yang belum maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
- 3) Kondisi jalan lingkungan kualitasnya masih rendah berupa jalan tanah/kerikil dalam kondisi rusak, kondisi jembatan/gertak yang ada masih memprihatinkan, sebagian besar belum memiliki jembatan yang layak untuk dilewati.
- 4) Pelayanan jaringan air bersih masih sangat terbatas dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang masih sangat terbatas.
- 5) Volume sampah semakin besar.
- 6) Keterbatasan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah. TPA yang ada saat ini di Rasau Jaya dengan luas lahan 3,4 Ha sudah sangat tidak memadai.
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka melaksanakan tugas, seperti Keterbatasan jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah. Kondisi saat ini hingga Tahun 2014 jumlah dump truck sebanyak 6 unit, truck arm roll sebanyak 3 unit, semua armada tersbut dalam kondisi baik, namun untuk mengangkut seluruh volume sampah di Kabupaten Kubu Raya masih perlu penambahan armada.

rf

- 8) Penerangan jalan umum masih sangat terbatas.

B. Dinas Bina Marga dan Pengairan

1) Pengembangan Kabupaten Kubu Raya

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya .peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan.

Pengembangan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan selama ini dirasakan belum optimal. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Kondisi awal saat pemekaran wilayah Kabupaten, jaringan jalan dan jembatan yang tersedia dalam kondisi rusak dan belum memiliki perkerasan;
- b. Panjang jalan yang belum sesuai dengan sebaran penduduk dan sistim aktivitas yang padat;
- c. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi sehingga memperngaruhi kegiatan perekonomian masyarakat
- d. Sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah rawan banjir dan diperlukan konstruksi jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) agar kualitas jalan lebih tahan lama, namun konstruksi jalan tersebut lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur (flexible pavement)/aspal.

2) Banjir

Banjir merupakan salah satu permasalahan akibat jaringan drainase dan saluran yang belum memadai di bidang kebinamargaan dan pengairan. Permasalahan tersebut pada umumnya disebabkan :

- a. Kurangnya kapasitas infrastruktur drainase mikro dan tidak berfungsinya saluran eksisting yang diakibatkan oleh penyempitan saluran drainase dan sedimentasi pada saluran sungai;

n
f
f

- b. Pendangkalan dan penyempitan saluran (Sungai);
 - c. Belum terintergrasinya sistem jaringan drainase dari satu kawasan lainnya;
 - d. Naiknya koefisien aliran, akibat berkurangnya daerah resapan.
- 3) Keawetan Konstruksi Jalan
- Pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sebagian besar masih menggunakan metode manual sehingga hasilnya kurang sempurna baik terhadap kualitas dan umur konstruksi dibanding bila dilaksanakan dengan metode mekanis, sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat ketahanan konstruksi.
- 4) Daerah Perbatasan Antar Wilayah
- Daerah perbatasan antar wilayah, khususnya yang transportasinya dilayani dengan jalan lokal masih merupakan wilayah yang kurang mendapat porsi penanganan yang memadai dikarenakan sebagian besar daerah ini merupakan daerah yang belum berkembang. Dalam upaya mengembangkan pola pergerakan yang efisien dan bagian dari proses pemerataan pembangunan, daerah ini harus mendapat perhatian khusus.
- 5) Sungai
- Selama ini paradigma sungai sebagai bagian paling belakang dan kurang diperhatikan estetikanya. Paradigma ini harus diubah dan harus memperhatikan factor estetika dan sanitasi lingkungan sehingga dapat mendukung sektor pariwisata.
- 6) Masalah Sempadan Sungai
- Bangunan-bangunan liar di sempadan sungai merupakan penyebab kekumuhan dan gangguan aliran sungai. Pengumpulan (konglomerasi) permukiman kumuh banyak dimulai dari dua daerah ini. Membebaskan daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganan kota karena sungai merupakan potret dari sebuah peradaban masyarakat kota.

R
f

7) Penggundulan Daerah Aliran Sungai

Kawasan terbuka di Daerah Aliran Sungai (DAS) harus sesegera mungkin untuk dihijaukan. Daerah Aliran Sungai yang gundul akan menimbulkan erosi dan pengikisan daerah tepian sungai sehingga terjadinya sedimentasi akibat erosi dan gerusan aliran sungai serta terjadinya pendangkalan badan sungai tersebut. Disamping itu, Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dengan debit aliran yang lebih besar.

2.3.5 Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tata bangunan dan lingkungan yang harmonis, serasi dan berkelanjutan;
- 2) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- 3) Masih sangat terbatasnya perangkat regulasi operasional dan sumber daya manusia dalam perizinan bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Masih rendahnya kendali aparat dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- 5) Masih banyaknya pembangunan gedung dan bangunan lainnya tanpa memiliki IMB;
- 6) Belum terjamahnya taman – taman kota, dan pemakaman yang ada, secara memadai, layak dan terjadwal.

2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan serta tantangan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan kebijakan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 2) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);

- 3) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- 4) Kompetensi SDM perencana belum optimal;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 7) Belum lengkapnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
- 8) Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- 9) Evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena SKPD belum menyampaikan laporan tepat waktu;
- 10) Kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan;
- 11) Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

2.3.7 Urusan Perumahan

Permasalahan Urusan Perumahan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang belum tertata dengan baik, dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sangat minim, diantaranya ketersediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan umum;
- 2) Masih banyaknya jumlah rumah tradisional masyarakat dalam kondisi yang tidak layak huni dan memerlukan pembenahan/penataan.

2.3.8 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor:

- 1) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan pembinaan generasi muda;
- 2) Kurangnya minat peserta dalam mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten dikarenakan tidak dilaksanakannya seleksi setiap Tahun.

B. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan seleksi serta pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibra) Tingkat Kabupaten;
- 2) Alokasi dana untuk kegiatan seleksi dan pemusatan latihan paskibra belum optimal;
- 3) Pihak sekolah sebagai sumber rekrutmen calon anggota paskibra hendaknya melaksanakan seleksi tingkat sekolah sebelum dikirim ketingkat Kabupaten.

C. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi POPDA:

- 1) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang terpusat dalam suatu kawasan sehingga beberapa cabang olahraga dilaksanakan di kota Pontianak.

D. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan TC serta Pengiriman Kontingen Kejurda:

- 1) Minimnya anggaran untuk memberi penghargaan kepada atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah;
- 2) Penghargaan belum bisa diberikan kepada atlet yang berprestasi.;
- 3) Masih lemahnya organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kubu Raya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu pengembangan olahraga.

E. Kegiatan Pemilihan Bhakti Pemuda Antar Provinsi/Jambore Pemuda Indonesia:

- 1) Minimnya peserta untuk mengikuti seleksi;
- 2) Tim seleksi belum memiliki buku panduan sebagai standar.

F. Kegiatan Hari Olahraga Nasional:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga sehingga tempat kegiatan dilaksanakan di aula kantor Bupati dan masih dalam tahap perbaikan.

G. Kegiatan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Tinju (Ring Tinju):

- 1) Sarana dan prasarana olahraga cabang olahraga tinju yaitu berupa matras dan ring tinju, dikarenakan lamanya proses pengadaan dan Tekhnis Laporan serta dekatnya waktu penutupan kas akhir Tahun Daerah;
- 2) Tidak Bisa diserap karena pihak ketiga mengalami masalah tekhnis.

2.3.9 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya Peta Investasi;
- 2) Belum terjaringnya jumlah investasi secara riil;
- 3) Belum tersedianya buku neraca investasi daerah;
- 4) Penyelesaian izin melalui spipise yang masih terlambat.

2.3.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

- a) Belanja Jasa Administrasi Keuangan

rf

- b) Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
 - c) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - e) Penyediaan makan dan minum rapat
 - f) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - g) Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
 - h) Pengadaan mebeleur
 - i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Kondisi SDM

SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, karena pada Sekretariat dan Bidang masih ada yang belum mempunyai staf, sehingga masih banyak memerlukan tenaga honorer, disamping itu pengetahuan teknis PNS masih terbatas.

2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Tenaga

Untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tenaga operator yang bertugas melayani pembuatan KTP, KK, dan Akta Pencatatan Sipil. Jumlah tenaga sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural. Jumlah tenaga operator yang ada saat ini masih belum ideal untuk mencukupi kebutuhan pelayanan yang maksimal terhadap sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, juga terjadi kekurangan tenaga pengadministrasian umum, pulahta kepegawaian, dan arsiparis untuk membantu kelancaran administrasi surat-menyurat maupun kepegawaian.

2) Dana

Untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terkendala keterbatasan dana. Dana yang dimiliki anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan ke sembilan Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.

3) Sarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki keterbatasan belum memiliki gedung kantor. Keberadaan gedung kantor saat ini merupakan gedung sewa berupa ruko. Sarana lain yang sangat diperlukan adalah kendaraan operasional untuk kegiatan pelayanan keliling yang dapat menjangkau kecamatan dan desa.

4) Network

Jaringan SIAK online yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah jaringan yang dipinjamkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk jaringan online ke sembilan Kecamatan di Kab. Kubu Raya menggunakan jaringan milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya.

2.3.12 Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar dan belum adanya data ril Ketenagakerjaan yang valid.

2.3.13 Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan data base Ketahanan Pangan untuk penyusunan Renstra pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kubu Raya masih belum sempurna;
- 2) Penyusunan data base potensi produksi pangan masih belum sempurna;
- 3) Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (tingkat Kabupaten dan Kecamatan) belum dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Pemanfaatan perkarangan sebagai sumber bahan pangan lokal belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat;
- 5) Sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif (pada hari pangan sedunia) belum

rf

secara menyeluruh di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya;

- 6) Belum semua program kegiatan pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM dan dana yang tersedia;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, sehingga terhambatnya proses penyelesaian kegiatan, administrasi dan teknis di lapangan;
- 8) Untuk program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya bersumber dari dana Dekonsentrasi Provinsi Kalbar (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik sedangkan dana APBD kegiatannya berupa pembinaan dan pendampingan non fisik;
- 9) Perlunya dana sharing dari APBD dalam mendukung program/kegiatan Bagian Ketahanan Pangan Setda Kab. Kubu Raya, pada kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat, Desa Mandiri Pangan serta Daerah Rawan Pangan terutama dalam pembinaan dan evaluasi; serta penguatan modal kelompok yang sudah berjalan;
- 10) Perlu adanya keberpihakan anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 100 ton ekuivalen setara beras untukantisipasi bencana alam, banjir musim paceklik dan gagal panen.

2.3.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terbentuknya Unit Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
- 2) Sulitnya penjangkauan kepada korban karena lokasi kasus yang berjauhan dan kurangnya fasilitas operasional;
- 3) Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD terkait cakupan Indikator rehabilitasi sosial, walaupun TIM jejaring telah terbentuk;
- 4) Terbatasnya anggaran yang tersedia atau belum tersedianya anggaran khusus untuk pelayanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- 5) Belum adanya sarana atau shelter untuk penampungan korban;
- 6) Sulitnya melakukan pengumpulan data, dikarenakan data yang dibutuhkan terkait dengan Kejaksaan Negeri, pengadilan Negeri dan Polres yang keberadaannya diluar wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- 7) Adanya 2 (dua) Polres pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPPA Polres Kota dan UPPA Polres Pontianak di Mempawah).

2.3.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB khususnya dalam penggunaan KB MKJP;
- 3) Masih kurangnya penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang dibiayai oleh APBD;
- 4) Masih kurangnya media luar ruang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang KB KS;
- 5) Masih kurang terkoordinirnya sistem pelaporan dari desa dan Kecamatan.

2.3.16 Urusan Perhubungan

Permasalahan Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya tenaga PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesadaran PNS dalam melaksanakan Tupoksi belum optimal;
- 4) Pengawasan berjenjang dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 5) Fungsi koordinasi diantara Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas belum optimal;
- 6) Terbatasnya Anggaran SKPD.

2.3.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Bandwith di Kominfo hanya 5 MB, sedangkan kebutuhan untuk melayani SKPD dan Kecamatan se-Kab Kubu Raya kurang lebih 50 MB;
- 2) Konektivitas jaringan antara SKPD tidak terkoneksi dengan baik;
- 3) Kurangnya fasilitas ruangan maintenance server dan sistem LPSE;
- 4) Kurangnya tenaga operator pengelolaan website Kubu Raya;
- 5) Kementerian Kominfo tidak melakukan koordinasi dalam mendistribusikan PLIK dan PLIK wifi di Kab. Kubu Raya;
- 6) Kekuatan sinyal program Teleinfo tuntas dari Kementerian Kominfo di Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya kurang maksimal sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat;
- 7) Perubahan SPK MPLIK dari PT. WEB terhadap pembiayaan membingungkan karena anggaran yang sudah terealisasi tak bisa digunakan, karena pasal pada SPK yang baru tidak memperbolehkan biaya operasional dibebankan pada APBD.

2.3.18 Urusan Pertanahan

Permasalahan Urusan Pertanahan adalah lambatnya penyelesaian penerbitan sertifikat hak pakai selama dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dikarenakan masalah personil seksi pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang terbatas dan alas hak atas tanah yang tidak ada sehingga sulit untuk mengajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

2.3.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Personalia terbatas (8 orang) berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang;
- 2) Terbatasnya sarana/prasarana kerja berdampak pada kecepatan dan ketepatan waktu kerja.

2.3.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Bagian Pemerintahan

Permasalahan Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya segmen batas antar daerah dan segmen batas wilayah kecamatan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang memiliki kemampuan teknis serta waktu dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- 3) Penegasan Batas Wilayah antar Daerah harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- 4) Kesulitan dalam memperoleh data dari SKPD sebagai bahan penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dan Memori Bupati Kubu Raya Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 serta batas batas waktu yang diberikan dalam penyampaian dokumen-dokumen tersebut;
- 5) Kesulitan dalam memperoleh data sebagai syarat kelengkapan administratif dalam pelaksanaan kegiatan Pemekaran / Pembentukan Kecamatan;
- 6) Belum terakomodir Program/Kegiatan dan anggaran fasilitasi kegiatan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Unsur Alami pada TA. 2013.

2. Bagian Hukum dan HAM

Permasalahan Bagian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana tempat penyimpanan arsip/produk hukum;
- 2) Tidak tersedianya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan didaerah yang jauh;

fr

- 3) Kurangnya fasilitas komputer, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan komputer (komputer yang ada dalam keadaan rusak).

3. Bagian Umum

Permasalahan Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggaran yang dibutuhkan belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai program yang diminta;
- 2) Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berada di Bagian Umum belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk penata taman, pramusaji baik di rumah Bupati dan Wakil Bupati maupun di lingkungan Kantor Bupati, serta untuk operator komputer;
- 3) Sarana dan prasarana untuk ruangan kami belum memenuhi standar, ruangan yang belum layak bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan dalam melaksanakan tugas sering mendapatkan hambatan.

4. Bagian Administrasi

Permasalahan Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga honor dan jumlah honor yang dibayarkan bagi tenaga kerja non PNS di lingkungan Setda Kabupaten Kubu Raya masih belum mendekati UMP Provinsi Kalbar;
- 2) Masih adanya unit kerja tertentu / bagian jika mengirim surat menyurat tidak melewati bagian TU dan kepegawaian Bagian Administrasi;
- 3) Data yang diberikan oleh unit kerja / bagian masih belum valid sehingga menghambat penyelesaian penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 4) Anggaran untuk pemeliharaan rutin/berkala sistem komputerisasi dan santel sangat kurang;
- 5) Belum diberikan bimbingan teknis penataan arsip bagi pegawai di bagian administrasi.

5. Bagian Organisasi

Permasalahan Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

~
ft

- 1) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan analisis jabatan (Anjab) serta masih kesulitan dalam menyusun Anjab;
- 2) Masih beberapa SKPD yang belum/terlambat dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja sehingga mempersulit dalam menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Renstra SKPD yang masih pada tahap verifikasi;
- 4) Masih ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lengkap dan menyeluruh;
- 5) Ada beberapa SKPD yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Permasalahan Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang operasional kerja;
- 2) Masih kurang tanggapnya SKPD dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatannya dan koordinasi antara instansi terkait belum optimal;
- 3) Belum tersedianya dukungan database dan sistem informasi monitoring dan evaluasi dalam menyajikan data pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian dan pembangunan.

7. Bagian Kesejahteraan Sosial

Permasalahan Bagian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;

rf
ft

- 2) Perlu penambahan dan perbaikan peralatan pendukung seperti Komputer PC serta Pengadaan Sistem Komputerisasi Data Base Hibah dan Bansos dengan tujuan keakuratan data dan meminimalisir kesalahan dalam hal pemberian bantuan sosial dan hibah.

8. Bagian Hubungan Masyarakat

Permasalahan Bagian Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 ini masih terbatas, sehingga untuk melaksanakan sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Bagian Humas masih belum dapat optimal;
- 2) Jumlah pegawai dan SDM yang ada pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya masih kurang dan perlu penambahan pegawai;
- 3) Perlu peningkatan kualitas SDM pada Bagian Humas dengan memberikan kesempatan mengikuti diklat bidang kehumasan, fotografi, editing dan lainnya;
- 4) Perlu penambahan peralatan pendukung seperti tripod kamera, lampu sorot kamera video, media penyimpanan digital, PC pengelola dan penyimpan data, dan lainnya;
- 5) Perlu kendaraan operasional berupa mobil dinas untuk kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkab Kubu Raya.

9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah

Permasalahan Urusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan dan tantangan internal
 - a. Sumber daya manusia yang terbatas baik segi jumlah maupun kualitas;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung terutama ruang kerja yang belum dapat menampung seluruh pegawai DPPKAD.

r
fy

- 2) Permasalahan dan tantangan eksternal
 - a. Belum tertib dan belum disiplinnya SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Adanya peningkatan beban kerja secara signifikan, sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan maupun peningkatan anggaran Pemerintah Kabupaten.

10. Sekretariat DPRD

Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2014 sudah memadai, hal ini terkait dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Plapond dan kebijakan Anggaran yang ada walaupun pada kegiatan tertentu ada yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- 2) Sumber Daya Manusia.
Kondisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Sekretariat DPRD masih kurang terutama pada Bidang Risalah dan Persidangan, sedangkan bagian teknis lainnya yaitu Bagian Umum dan Aparatur serta Keuangan dari jumlah data Kepegawaian yang ada perlu penambahan Personil untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- 3) Sarana dan Prasarana.
Dari segi sarana dan Prasarana masih perlu ditambah berkaitan dengan kondisi Ruang Sidang dan Ruangan lain dilantai 3 (Tiga) masih terasa sempit atau kurang luas yang mana untuk anggota Fraksi-Fraksi, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda belum tertampung pada suatu ruangan yang luas dan memadai.
- 4) Permasalahan Internal dan Eksternal
Pada dasarnya dengan kondisi Kabupaten Kubu Raya yang baru maka untuk lingkungan kantor yang ada seperti sekarang dapat kita maklumi hubungan Internal sudah cukup baik dan hubungan dengan pihak luar juga baik, hanya perlu peningkatan pada masa yang akan datang.
- 5) Untuk kantor dibuat pada lokasi yang lebih memadai dan permanen, Kantor DPRD seperti kita lihat pada daerah-

daerah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

11. Inspektorat Daerah

Permasalahan Urusan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian tugas pemeriksaan regular belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sebagaimana telah di atur dalam PKPT;
- 2) Beberapa lokasi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua, terutama pada musim penghujan, sehingga pemeriksaanya ditunda atau belum diperiksa;
- 3) Sarana kendaraan roda empat, roda dua, kendaraan air dan peralatan lainnnya (peralatan untuk uji kualitas bangunan/jalan, dll) untuk menunjang tugas kelapangan sangat terbatas/belum tersedia;
- 4) Sarana komputerisasi dirasakan masih sangat terbatas terutama Komputer Jinjing (Laptop) untuk digunakan para pemeriksa dilapangan belum tersedia;
- 5) Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai dan perlu ditingkatkan;
- 6) Obyek pemeriksaan (Objek) kadang-kadang terlambat menanggapi hasil pemeriksaan (temuan) yang disebabkan kurangnya keseriusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya penilaian terhadap kinerja APIP dan keterlambatan pembuatan LHP;
- 7) Lambannya obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

12. Badan Kepegawaian Daerah

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kepegawaian adalah belum terselesaikannya permasalahan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kubu Raya (CPNS) Tahun 2010 dan hasil seleksi ulang CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2012.

13. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM, yang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantuan operasional;
- 3) Kesejahteraan yang kurang, dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dihadapi;
- 4) Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan baik undang-undang maupun peraturan daerah.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Permasalahan Urusan Badan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib;
- 2) Masih kurangnya profesionalisme aparatur BPBD yang handal;
- 3) Belum terselenggaranya upaya pemenuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Belum terbentuknya system koordinasi yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

15. Kecamatan Sungai Raya

Permasalahan Kecamatan Sungai Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;

- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, kegiatan.

16. Kecamatan Sungai Kakap

Permasalahan Kecamatan Sungai Kakap adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil, terbatasnya sumber daya manusia sehingga terkendalanya dalam memproses laporan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

17. Kecamatan Sungai Ambawang

Permasalahan Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Aparatur

Masih terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada PNS dan masyarakat. Masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan, wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia saat ini belum memadai, seperti peralatan komputer, meubelair, sarana telekomunikasi, dan kendaraan operasional sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pelayanan dan pembinaan kepada PNS dan masyarakat. Masih kurangnya dukungan pengadaan sarana dan prasarana kerja dari

pemerintah tingkat atas sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

3) Pembiayaan

Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Langsung (program dan kegiatan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas sehingga pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan secara optimal. Masih terbatasnya dukungan alokasi penganggaran untuk Belanja Tidak Langsung (insentif PNS) dalam anggaran kas, sehingga mempengaruhi motivasi dan etos kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

18. Kecamatan Kuala Mandor B

Permasalahan Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya SDM personil/staf yang dibutuhkan di kecamatan baik secara kuantitas mau pun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan ;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

19. Kecamatan Rasau Jaya

Permasalahan Kecamatan Rasau Jaya adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (Personil) yang belum memadai;
- 2) Proses Pelaksanaan Kegiatan maupun penyusunan laporan cenderung lamban sehingga menghambat penyerapan dana anggaran untuk kegiatan dan memperlambat kegiatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

20. Kecamatan Teluk Pakedai

Permasalahan Kecamatan Teluk Pakedai adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Wilayah
Keadaan wilayah/medan Kecamatan Teluk Pakedai terdiri atas dataran rendah, pegunungan, dan sungai, lokasi

pemukiman penduduk di sekitar pegunungan cukup jauh, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sungai sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas lapangan dan memerlukan waktu, biaya yang besar, serta tidak semua jenis pertanian/ dapat berkembang dengan baik karena jenis tanah yang terdapat di dataran rendah yaitu gambut.

2) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama dan atas, masih terbatas dan belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar terutama di wilayah terpencil dan pedalaman, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Teluk Pakedai.

3) Tingkat Perekonomian Masyarakat

Tingkat Perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan pembinaan, terbatasnya akses pemasaran, masih rendahnya semangat bekerja/berwirausaha dari masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

4) Keadaan Infrastruktur

Keadaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai, seperti jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi belum memadai terutama di wilayah Desa sungai Nibung, Desa Kuala Karang, Tanjung Bunga, sehingga mempengaruhi perkembangan tingkat perekonomian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta aspek-aspeknya lainnya.

5) Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai masih relative rendah, antara lain disebabkan oleh

Handwritten signature/initials in blue ink.

terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan seperti Polindes dan Pustu, masih kurangnya tenaga paramedis terutama di wilayah desa terpencil / pedalaman, luasnya jangkauan wilayah binaan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga berdampak terhadap perkembangan tingkat kesehatan masyarakat.

- 6) Dukungan Pembiayaan, Personil dan Perlengkapan Kerja
Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan pembiayaan, personil dan perlengkapan kerja. Alokasi ketiga faktor tersebut.
- 7) Batas Tingkat Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
Batas wilayah administrasi pemerintahan di Kecamatan Teluk Pakedai baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat masih menjadi hambatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kependudukan, dan pelaksanaan perizinan pembangunan baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sehingga mempengaruhi percepatan pelayanan dan investasi.

21. Kecamatan Kubu

Permasalahan Kecamatan Kubu adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kerja.

22. Kecamatan Terentang

Permasalahan Kecamatan Terentang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan;

- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan dan kelengkapan kerja.

23. Kecamatan Batu Ampar

Permasalahan Kecamatan Batu Ampar adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya personil yang dibutuhkan di Kecamatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan.
- 3) Terbatasnya sarana kerja yang diperlukan yang meliputi kendaraan operasional, peralatan, listrik yang belum nyala 24 jam dan kelengkapan kerja.

2.3.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggaran :

Jumlah pagu Anggaran pada Tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Kesekretariatan masih kurang, yaitu pada program dan kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran ;

- a. Belanja Jasa Administrasi Keuangan
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir Tahun
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan makan dan minum rapat
- f. Pengadaan peralatan gedung kantor
- g. Pengadaan perawatan peralatan gedung kantor
- h. Pengadaan mebeleur
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- 2) Kondisi SDM

Untuk SDM di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya masih dinyatakan kurang, pada eselon IV kekurangan 2 jabatan struktural yang sampai Desember 2014 belum terisi. Sedangkan jumlah pegawai BPMPD yang berjumlah 23 orang masih dianggap kurang. Untuk

h
f
t

mengatasi kekurangan staf tersebut dengan merekrut beberapa tenaga honorer untuk diperbantukan di Sekretariat dan bidang.

3) Lingkungan Internal

Untuk hubungan dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya sangat baik dan rasa kekeluargaan.

4) Lingkungan Eksternal

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya untuk koordinasi dengan Legeslatif, antar SKPD Kabpaten, Provinsi dan pusat dalam rangka koordinasi dan konsultasi berjalan baik dan tidak ada permasalahan. Demikian dengan Aparatur Pemerintahan di Desa berlangsung baik dalam rangka pembinaan pemberdayaan pemerinntah dan masyarakat desa.

2.3.22 Urusan Sosial

Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Sosnakertrans;
- 2) Belum tersedianya data PMKS dan PSKS yang riil di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.23 Urusan Kebudayaan

Permasalahan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum terakomodirnya para pekerja seni, budayawan, yang berprestasi sedangkan mereka perlu sebuah penghargaan khusus dari pemerintah setempat;
- 2) Dalam pelaksanaanya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat menampilkan seluruhnya kesenian yang berakar pada tradisi dikarenakan terbentur oleh keterbatasan dana yang dimilikinya. Untuk menampilkan kesenian tradisional berbentuk seni tari dan music tradisional;
- 3) Kurangnya berbagai elemen suku yang berada di Kab. Kubu Raya dalam peran serta pada kegiatan pagelaran lintas budaya dikarenakan keterbatasan waktu yang dinilai kurang siap oleh

para paguyuban keluarga besar suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya;

- 4) Kurangnya penghargaan yang diperoleh para pelaku seni dan ruang pengapresiasian karya seni yang telah dihasilkan oleh sanggar dan para pekerja seni;
- 5) Budaya dan kesenian tradisional semakin punah, banyak orang mulai melupakan atau bahkan tidak mengetahui ragam seni budaya, maka sesuai program dan kegiatan yang ada di bidang kebudayaan, agar dapat mengenalkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat akan kekayaan budaya berupa barang peninggalan sejarah dan asset budaya baik benda dan tak benda.

2.3.24 Urusan Statistik

Permasalahan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Data PDRB dan Kabupaten Dalam Angka belum bisa tersaji pada Tahun berjalan;
- 2) Pemerintah daerah masih tergantung terhadap data-data BPS, dalam kaitanya dengan perencanaan pembangunan daerah tidak semua data dapat disediakan oleh BPS;
- 3) Keterlambatan mitra kerja dalam hal ini BPS dalam menyelesaikan produk pekerjaan;
- 4) Sering terjadi perbedaan data antara BPS dengan SKPD di Pemerintahan Kabupten Kubu Raya;
- 5) Jarangnya sinkronisasi antara BPS dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.25 Urusan Kearsipan

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam

- Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
 - 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.26 Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya atensi pimpinan Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Kubu Raya dalam membangun dan mengembangkan bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- 2) Minimnya dana bidang kearsipan dan Perpustakaan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan sebagaimana tuntutan dan sanksi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undangn No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 3) Minimnya prasarana dan sarana pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya tuk melakukan pengolahan pada arsip dan buku;
- 4) Kurangnya SDM tenaga fungsioanal Arsiparis dan tidak adanya tenaga fungsional Pustakawan pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Belum adanya gedung penyimpanan arsip di Kantor Kersipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

2.3.27 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum indikator kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014 telah tercapai, diantaranya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap, pengolahan hasil perikanan serta peningkatan sarana

dan prasarana perisisir telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi pencapaian indikator kinerja ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat perikanan karena peningkatan pendapatan masyarakat masih rendah karena usaha yang dimiliki masyarakat pembudidaya ikan pada umumnya masih skala kecil;

- 2) Sarana dan prasarana dinas perikanan yang diserahkan kepada masyarakat banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu dinas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perikanan. Salah satu program yang ada adalah pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan bantuan kepada masyarakat perikanan, yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah usulan yang diajukan masyarakat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan masih banyak yang belum dapat diakomodir karena terbatasnya jumlah anggaran yang ada;
- 4) Terbatasnya jumlah SDM khususnya staf, karena itu dalam penyelesaian pekerjaan banyak yang belum tepat waktu dan banyak kegiatan yang baru dapat diselesaikan pada akhir Tahun.
- 5) Masih banyak Desa yang belum memiliki Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

2.3.28 Urusan Pertanian

Permasalahan Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

- 2) Masalah Sarana dan Prasarana

Di samping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

- 3) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.29 Urusan Kehutanan

Permasalahan Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya upaya pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- 2) Kemampuan pasokan produksi kayu bulat dari hutan alam semakin berkurang yang berimbas banyaknya industri pengolahan kayu yang tutup;
- 3) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan;
- 4) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan, perkebunan dan pertambangan;
- 5) Masih sering terjadi gangguan keamanan hutan (illegal logging, kebakaran hutan) maupun klaim terhadap lahan perkebunan oleh masyarakat;
- 6) Adanya kecenderungan konflik sosial antara masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan pelaku usaha dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 7) Tingkat ekonomi sosial masyarakat sekitar hutan masih rendah;
- 8) Belum adanya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran dibidang kehutanan dan perkebunan;
- 9) Kemampuan dan potensi hasil perkebunan dalam memenuhi kebutuhan industri dan mengakomodir kebutuhan lokal masyarakat belum tercukupi dengan baik dan belum terkelola dengan azas manfaat;

- 10) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- 11) Kebakaran hutandan lahan masih sering terjadi dimusim kemarau dikarenakan kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan atau penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar;
- 12) Rehabilitasi hutan melalui program belum dapat mengimbangi laju kerusakan hutan dan rehabilitasi lahan masih bertumpu pada dana yang dikucurkan oleh pemerintah sehingga pengurangan lahan kritis berjalan lambat;
- 13) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan;
- 14) Pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengembangan pemanfaatan hasil perkebunan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- 15) Keberadaan fungsi kawasan hutan masih kerap berbenturan dengan masyarakat sekitar hutan yang sangat bergantung kepada keberadaan hutan;
- 16) Usaha pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa rotan, damar, kulit medang dan lain-lain masih memiliki potensi untuk dikembangkan namun belum digali dan dikelola dengan baik;
- 17) Masih banyak desa yang belum memiliki penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 18) Masih kurangnya sarana mobilitas bagi personil BP4K dalam mendukung aktifitas kerja seperti roda dua dan roda empat.

2.3.30 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- 1) Belum memadai dan terbatasnya sumber daya manusia profesional dan berkualitas dibidang pertambangan.
- 2) Belum sepenuhnya peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan dan pertambangan dapat diterapkan.
- 3) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan pertambangan.

2.3.31 Urusan Pariwisata

Permasalahan Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Promosi (Arakan Pengantin)

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Promosi ini (Festival Arakan Pengantin) merupakan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 yang menjadikannya terlalu mendadak untuk dilaksanakan sehingga waktu untuk melakukan persiapan dalam mengikuti kegiatan ini menjadi terlalu sempit.

2) Kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wisata Hiburan dan Rekreasi ini adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah masalah Plotting Lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menampilkan hiburan musik tersebut masih belum terakomodir.

3) Kegiatan Pengembangan Desain Kreatif

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desain Kreatif ini tidak mengalami kendala yang berarti, hanya saja dalam proses pencetakan terhambat karena file Desain dengan hasil yang diaplikasikan kemesin cetak mengalami perubahan sehingga harus di Desain ulang untuk menyesuaikan lagi, belum adanya usaha cetak batik di Kabupaten Kubu Raya sehingga proses pencetakan sedikit mengalami kesulitan karena harus mencetak di luar Kabupaten Kubu Raya.

4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek Pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Hambatan :

Belum adanya pengelolaan terhadap objek dan atraksi wisata di Kabupaten Kubu Raya serta kurangnya koordinasi dengan lembaga/dunia usaha.

5) Penyusunan rencana pengembangan wisata Gunung Ambawang

Hambatan :

Belum terencananya pengembangan objek wisata yang difokuskan pada wisata alam untuk pemanfaatan keasrian alam dan aksesibilitas yang kurang memadai.

fy

6) Kajian potensi dan peluang Investasi Pariwisata Daerah KKR

Hambatan :

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan pada 3 (tiga) objek Wisata Unggulan Kabupaten Kubu Raya, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih minimnya Atraksi Wisata yang ditawarkan pada masing-masing objek Wisata yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Rendahnya akses menuju objek Wisata terutama Pantai Paloh Nibung dan Gunung Ambawang.
3. Minimnya sarana Wisata di objek-objek Wisata di Kabupaten Kubu Raya mulai dari sarana pokok, sarana pelengkap hingga sarana penunjang Pariwisata.

7) Valuasi Ekonomi Pembangunan Pariwisata KKR

Hambatan :

Kurangnya usaha kecil pada sektor Pariwisata yang berdampak pada penggandaan pendapatan ekonomi Pariwisata.

8) Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Hambatan :

Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pengiriman kontingen Promosi Kabupaten Kubu Raya pada kegiatan Explore Exotica Of Borneo yang diselenggarakan di Anjungan Kalimantan Selatan TMII Jakarta Tahun 2014 ini adalah kurangnya anggaran dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

9) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Hambatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Tahun 2014 ada beberapa hambatan dan kendala tetapi dapat diantisipasi dengan melibatkan Duta-duta Wisata Kabupaten Kubu Raya yang dikenal dengan nama GEMA, hanya saja peserta yang dikirim dari Kecamatan banyak yang tidak memenuhi persyaratan diantaranya kurangnya tinggi badan yang sudah ditentukan oleh Tingkat Nasional.

ff

- 10) Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan di bidang Pariwisata

Hambatan :

1. Kurangnya kuantitas SDM untuk menangani perizinan saat turun lapangan.
2. Belum maksimalnya penyampaian laporan tingkat hunian kamar (THK) dari pengusaha hotel kepada dinas.

2.3.32 Urusan Indsutri

Permasalahan Urusan Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM masih minim karena masih banyak pelaku IKM belum terbina;
- 2) Tidak maksimalnya penyerapan uji analisa laboratorium dan belanja bahan percontohan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER5/2009 tentang ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa. Arahan dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

2.3.33 Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak agenda pameran yang tidak dapat diikuti karena anggaran tidak mencukupi untuk memehui semua undangan kegiatan pameran;
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, tidak maksimalnya penyerapan dikarenakan kesulitan dalam hal mencari pihak kompeten sebagai tenaga ahli dalam tim monitoring gula terpadu;
- 3) Belum terlasananya penataan PKL yang diharapkan dapat berdagang dengan lokasi yang layak;
- 4) Belum terdatanya seluruh PKL dan pedangan tradisional di Kubu Raya dengan akurat.

2.3.34 Urusan Ketrasmigrasian

Permasalahan Urusan Ketrasmigrasian adalah sebagai berikut:

RF

- 1) Minimnya kuantitas dan terbatasnya SDM yang ada, bila dibandingkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosnakertran Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Minimnya anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan Dinas.



BAB III**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 serta proyeksi perekonomian tahun 2017 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kubu Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Dengan adanya review RPJMD tahun 2016 ini, maka ada perubahan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, yaitu adanya isu Good Governance dan isu Kewilayahan dan Infrastruktur.

Isu Good Governance ini muncul karena adanya prioritas nasional (Nawa Cita no.2), yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. Isu ini juga di dukung dengan adanya prioritas nomor 4 Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik. Untuk mendukung dan memperkuat prioritas di atas, salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD 2014-2019 adalah Mewujudkan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga dalam program pembangunannya di nomor D memprioritaskan Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa.

Isu Kewilayahan dan Infrastruktursesuai dengan Nawa Cita Nomor 4, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dalam sasaran pokok pembangunan nasional nomor 4 dan 5 adalah Sasaran Pembangunan dimensi Pemerataan dan Dimensi Kewilayahan dan antar Wilayah. Prioritas Nasional dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional ini didukung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat nomo 7, yaitu : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai, serta Ketahanan Budaya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung isu Kewilayahan dan Infrastruktur ini dengan Prioritas Peningkatan Infrastruktur.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Kubu Raya kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat ini harus di dukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi : (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai langkah antisipasi dan informasi penting arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 harus menggambarkan:

- a. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
- b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Sesuai dengan sasaran nasional kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, untuk itu konsep pembangunan ekonomi yang pro poor, pro job dan pro growth akan terus dilanjutkan.

Sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran

serta pemerataan distribusi pendapatan. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkah-langkah strategis di atas tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan kondisi ekonomi makro daerah dan trend perkembangannya yang tentunya menjadi dasar untuk dilakukan perkiraan/proyeksi perkembangan ekonomi di tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi didorong untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan minat investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor tetap diupayakan dengan meningkatkan daya tarik investasi baik dalam maupun luar negeri dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, dan diupayakan memberikan insentif dan kemudahan investasi, harmonisasi kebijakan di semua tingkatan dan sektor, mendorong fasilitasi pembiayaan, memberikan fasilitasi ekspor.

Berbagai tantangan yang dikemukakan di atas tentunya memerlukan kebijakan yang handal dengan menggunakan berbagai potensi yang ada serta berbagai prospek yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah :

1. Potensi jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang besar untuk memperkuat dan mendukung kebijakan ekonomi daerah. Berdasarkan jumlah penduduk yang dilansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya di semester 2 tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berjumlah 597.502 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 306.949 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 290.553 jiwa.
2. Potensi sumber daya alam yang berlimpah, diantaranya perikanan, baik perikanan laut dan perikanan umum maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2011 produksi perikanan laut sebesar 7.906,4 ton dan senilai 110,06 milyar rupiah. Produksi perairan umum sebanyak 124,9 ton dan nilai produksinya sebesar 1,41 milyar rupiah, sedangkan produksi ikan budidaya sebanyak 1.601,5 ton dan nilai produksinya sebesar 26,74 milyar rupiah.
3. Potensi pertanian dan kehutanan, Sektor pertanian memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya yang cukup signifikan di

tahun 2011 sebesar 18,66% dari total PDRB. Semenatra berdasarkan data Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan luas hutan lebih kurang 831.679 hektar dengan rincian 388.392,73 hektar atau 46,70% merupakan kawasan hutan lindung dan 443.286,83 hektar merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan lahan dengan kondisi yang sangat kritis seluas 875,11 hektar.

4. Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur adalah fokus fasilitas wilayah atau ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 176, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana.
5. Kebijakan nasional yang memperkuat kelembagaan di desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian di perkuat dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka memperkuat keberadaan dan peningkatan kesejahteraan 118 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
6. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 sebesar 6,44% dan meningkat sedikit pada tahun 2015 sebesar 6,54%. Target Pertumbuhan Ekonomi Kubu Raya tahun 2016 di targetkan mencapai 6.80%, dan proyeksi tahun 2017 menjadi 6,94%. Sektor ekonomi yang memberikan andil terbesar dalam pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 15,69% serta sektor pengangkutan dan komunikasi 12,45%.
7. Angka Kemiskinan Tahun 2013 berjumlah 6,04% dan turun 0,47% pada tahun 2014 menjadi 5,57%. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan menjadi 5,50% dan target tahun 2016 akan turun menjadi 5,44% serta di proyeksi pada tahun 2017 menjadi 5,31%.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan ragam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dalam bentuk indikator makro sangat diperlukan untuk melihat gambaran tentang kondisi suatu daerah yang dilihat dari perspektif masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang,

serta perkembangan kinerja perekonomian daerah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi. Adapun Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

→
R
R

Tabel 3.1

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2017

No	Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	Revisi Target 2016	Proyeksi 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,54	6,61	6,66	6,44	6,54	6,67	6,80	6,94
2	PDRB Harga Berlaku (Rp. Juta)	11.864,58	13.105,80	14.670,64	16.701,41	16.951,93	17.206,21	17.464,30	17.726,27
3	PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta)	11.294,02	12.040,89	12.842,74	13.669,89	13.874,94	14.083,06	14.294,31	14.508,72
4	Jumlah Penduduk	511.235,00	522.174,00	529.320,00	596.699,00	605.649,49	614.734,23	623.955,24	633.314,57
5	Pendapatan Perkapita Berlaku (Rp Ribu)	23.100,00	25.100,00	27.700,00	30.900,00	35.090,00	-	-	-

Handwritten signature in blue ink.

8	Inflasi (%)	6,46	5,25	5,00	5,00	4,94	4,88	4,82	4,76
9	Angkatan Kerja (Jiwa)	253.598,00	227.891,00	222.970,00	244.818,00	248.490,27	252.217,62	256.000,89	259.840,90
10	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	11.468,00	13.808,00	20.650,00	15.132,00	14.950,42	14.771,01	14.593,76	14.418,63
11	Tingkat Pengangguran (%)	4,52	6,06	9,26	6,18	6,07	5,96	5,85	5,75
12	Penduduk yang Bekerja (Jiwa)	242.130,00	214.083,00	202.320,00	229.686,00	233.131,29	236.628,26	240.177,68	243.780,35
13	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	31.900,00	32.800,00	32.100,00	29.470,00	28.939,54	28.418,63	27.907,09	27.404,77
14	Angka Kemiskinan (%)	6,67	6,27	6,04	5,57	5,50	5,44	5,37	5,31
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,56	63,42	63,94	64,52	65,49	66,47	67,47	68,48
	- Angka Melek Huruf (%)	81,04	87,23	85,02	85,32	88,32	89,64	90,99	92,35
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,37	66,43	66,83	69,64	70,68	71,74	72,82	73,91
	- Pengeluaran Riil Perkapita (Rp. 000/bln)	626,22	629,72	632,59	797,00	808,96	821,09	833,41	845,91
	- Lama Sekolah (Tahun)	6,74	6,83	6,91	7,03	7,14	7,24	7,35	7,46
16	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	4,52	6,27	6,04	5,57	5,65	5,74	5,82	5,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan berada diatas rata-rata Kalimantan Barat. Perekonomian Kabupaten Kubu Raya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 6,54% pada tahun 2011, tahun 2012 mencapai 6,61%, dan pada tahun 2013 naik menjadi 6,66%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,44%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah terjadinya perubahan ekonomi secara global dan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2014. Namun pada tahun 2015 naik lagi menjadi 6,54%, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 menjadi 6,80%, serta diproyeksikan tahun 2017 menjadi 6,94%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya ini diikuti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 5,57% pada tahun 2014, dan tahun 2015 menjadi 5,50%. Ditargetkan tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 5,37% serta diproyeksikan menjadi 5,31% pada tahun 2017. Tren Penurunan angka kemiskinan ini bersamaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yang cenderung naik dan Pemerintah Daerah mendorong positif investasi masuk dengan bekerjasama Polda, TNI dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik lokal.

Akan tetapi pertumbuhan positif perekonomian dan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya tidak diiringi dengan penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014 yang mencapai angka 6,18%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya mengalami trend naik yakni dari 4,52 % pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 6,06 % di tahun 2012, dan tahun 2013 TPT ini mencapai 9,26%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kubu Raya perlu mendapat perhatian yaitu sebagian besar atau sekitar 31,01% penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja tidak mendapatkan upah secara resmi, dan produktivitasnya juga cenderung belum/kurang optimal. Angka pengangguran terbuka Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya menempati urutan tertinggi di Kalimantan Barat.

Selain upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, upaya untuk menurunkan penduduk miskin juga akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Upaya tersebut akan didorong oleh berbagai program

yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaanya dengan akses dan harga terjangkau. Hal ini mulai tampak pada tahun 2014, dimana TPT Kabupaten Kubu raya turun menjadi 6,18% dan 6,07% pada tahun 2015. Diprediksi TPT Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 menjadi 5,85% dan diproyeksikan tahun 2017 tersisa 5,75%.

Sementara itu, Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar 64,52 dan tahun 2015 sebesar 64,49 sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 67,47 dan Proyeksi Tahun 2017 Sebesar 68,48. IPM dibentuk dengan 3 dimensi, yaitu Umur panjang dan hidup sehat (unsur kesehatan yang diukur dengan Usia harapan Hidup), Pengetahuan (Unsur Pendidikan yang diukur dari Rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah), dan Standar Hidup Layak (yang diukur dari Pendapatan Nasional Bruto per kapita). Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2014 ini didasarkan pada Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Sebesar (7,03 tahun) dan tahun 2015 Sebesar (7,14 tahun) sedangkan target Tahun 2016 Sebesar (7,24 tahun) dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar (7,46 tahun). Pengeluaran Riil Perkapita pada Tahun 2014 Sebesar 797.000,00/bulan dan tahun 2015 Sebesar 808.000,96/bulan, sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 821.000,09/bulan dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar 845.000,91/bulan.

Usia Harapan Hidup pada tahun 2014 yaitu Sebesar 69,64 tahun dan tahun 2015 Sebesar 70,68 tahun sedangkan target tahun 2016 Sebesar 71,74 tahun dan diproyeksikan tahun 2017 Sebesar 73,91 tahun.

PDRB Harga Berlaku di Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 16.701,41 Juta dan tahun 2015 Sebesar Rp. 16.951,93 Juta sedangkan target Tahun 2016 Sebesar Rp. 17.464,30 Juta dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar Rp. 17.726,27 Juta. Sedangkan PDRB Harga Konstan 2000 pada Tahun 2014 Sebesar Rp. 13.669,89 Juta dan tahun 2015 Sebesar Rp. 13.874,94 Juta sedangkan target Tahun 2016 Sebesar Rp. 14.294,31 Juta dan diproyeksikan Tahun 2017 Sebesar Rp. 14.508,72 Juta, Inflasi yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Sebesar 5,00% dan tahun 2015

sebesar 4,94% sedangkan target Tahun 2016 Sebesar 4,82% dan Proyeksi Tahun 2017 Sebesar 4,76%.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan. Berbagai perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan seperti bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan.

Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94% pada Tahun 2017 tersebut, tidak semata-mata sekedar pertumbuhan dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kecamatan-kabupaten) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Ditargetkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 5,37% pada tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan sisa 5,31%.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan tingkat pengangguran.
- d. Upaya pencapaian dari sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tujuan MDG's, Standar Pelayanan Minima (SPM), Food Estate serta penanganan komoditi unggulan secara signifikan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan memecahkan permasalahan penting dan mendesak menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sektor), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Prinsip-prinsip keuangan daerah sebagai berikut :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. Semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
5. Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan surplus penerimaan daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan pokok-pokok kebijakan suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya. Secara umum pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017, didasarkan pada :

- a. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan kegiatan yang mendukung *program pro growth, pro poor, pro job dan pro enviroentment*.
- b. Pelaksanaan kebijakan keuangan didasarkan pada upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan penggunaanya diarahkan kepada upaya mengatasi masalah pembangunan dengan intensitas keterdesakan tinggi, yang menjadi kendala utama pembangunan.
- c. Kebijakan Keuangan Daerah mengedepankan keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Keuangan daerah dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh pengeluaran maupun penerimaan.
- f. Meningkatkan peran redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antardaerah, atau antar golongan pendapatan.
- g. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada upaya menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- h. Keuangan daerah harus dapat memberikan keleluasaan kepada para pelaksanaannya untuk memaksimumkan pengelolaan dananya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk seluruh siklus anggaran pengeloaan keuangan daerah harus taat azas dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggung-jawabannya baik dalam kerangka hukum maupun dalam kerangka administrasi.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2013-2015 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengingat

besarnya potensi perolehan PAD Kabupaten Kubu Raya, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berakibat pada penciptaan ekonomi biaya tinggi, inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Upaya peningkatan pendapatan daerah selain *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- b. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proyeksi pendapatan daerah bukan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi mengalami peningkatan sebesar 10% tiap tahunnya. Untuk mewujudkan pendapatan daerah pada tahun 2017, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
2. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan publik.
3. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi PAD dan penerimaan daerah lainnya.
4. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti, sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak.
5. Optimalisasi hasil usaha Badan Hukum Milik Daerah (BHMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kube Raya Tahun 2014 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	(%)	Target 2016 *)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pendapatan Asli Daerah	97.407.483.796,39	118.088.916.074,71	86.450.579.334,38	73,21	132.323.164.813,71	133.939.888.901,71
1.1.1	Pajak Daerah	64.729.599.444,05	82.538.049.986,00	54.864.886.735,52	66,47	87.781.508.500,00	89.398.264.095,00
1.1.2	Retribusi Daerah	25.180.126.655,62	7.274.697.775,00	6.003.747.900,46	82,53	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	563.736.663,41	2.750.000.000,00	1.724.724.757,82	62,72	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.934.021.033,31	25.526.168.313,71	23.857.219.940,58	93,46	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71
1.2	Dana Perimbangan	841.715.445.482,00	892.894.089.000,00	891.952.775.985,00	97,59	1.208.962.825.500,00	1.208.962.825.500,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	38.796.383.958,00	68,54	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	732.770.242.000,00	100	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	103.521.030.000,00	103.521.030.000,00	100	371.479.160.000,00	371.479.160.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	153.166.891.640,91	247.118.941.315,90	248.315.565.779,10	100,48	149.475.800.315,90	151.476.339.138,00
1.3.1	Hibah	410.910.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Handwritten signature in blue ink.

NO	Uraian	Jumlah					
		Realisasi 2014	Target 2015 *)	Realisasi 2015	(%)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	27.118.612.640,91	65.936.946.315,90	68.862.470.779,10	104,44	66.564.316.315,90	68.564.855.138,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	8.974.000.000,00	100	0,00	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	136.041.442.000,00	98,75	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	34.437.653.000,00	34.437.653.000,00	100	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	1.092.289.820.919,30	1.258.101.946.390,61	1.209.853.801.071,48	976,91	1.490.761.790.629,61	1.494.379.053.539,71

*) Perubahan APBD 2015

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuba Raya Tahun 2016

Sedangkan Target Pendapatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuba Raya disajikan pada Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target Pendapatan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14.843.909.619,00	88.138.698.876,80	94.308.407.744,21	100.909.996.286,90	107.973.639.025,72
1.1.1	Pajak Daerah	8.902.316.568,20	47.122.347740,00	50.420.912.082,00	53.950.375.928,00	57.726.902.242,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.219.980.489,00	10.831.710.970,00	11.589.930.738,00	12.401.225.890,00	13.269.311.702,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.721.612.561,80	30.184.640.166,80	32.297.564.924,21	34.558.394.468,90	36.977.482.081,72
1.2	Dana Perimbangan	623.799.571.814,020	837.455.694.000,00	921.263.400.000,00	100.909.996.286,90	1.114.653.527.704,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.922.298.160,00	55.678.984.000,00	61.246.882.400,00	67.371.570.640,00	74.108.727.704,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.838.274.854,00	699.700.430.000,00	769.670.473.000,00	846.637.520.000,00	931.301.272.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.038.998.800,00	82.076.280.000,00	90.283.908.000,00	99.312.298.000,00	109.243.528.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.003.513.049,20	144.403.606.735,00	191.810.967.408,00	210.992.064.149,00	232.091.270.534,00
1.3.1	Hibah	10.980.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.700.858.049,20	56.525.330.000,00	62.177.863.000,00	68.395.649.300,00	75.235.214.200,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	10.321.905.000,00	0,00	0,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	30.000.000,00	33.000.000.000,00	36.300.000.000,00	39.930.000.000,00

Handwritten signature

NO	Uraian	Target Pendapatan Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	0,00	87.848.276.735,00	96.633.104.408,00	106.296.414.849,00	116.926.056.334,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	671.646.994.482,20	1.069.997.999.611,80	1.207.320.638.552,21	1.325.223.449.075,90	1.454.718.494.263,72

Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014

**) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Dari Tabel 3.3. diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari Tahun ke Tahun semakin meningkat. Jumlah pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 955.668.022.681,27 atau naik sebesar 42,29% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 671.646.994.482,20 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.277.117.327,27 atau naik sebesar 333,02% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 14.843.909.619,00. Dana Perimbangan Rp. 774.980.539.716,00 atau naik sebesar 24,24% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 623.799.571.814,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 116.410.365.638,00 atau naik sebesar 252,72% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 33.003.513.513.049,20.

Tahun 2014 target pendapatan sebesar Rp. 1.218.198.405.395,00 atau naik sebesar 0,90% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.069.997.999.611,80 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.150.899.043,10 atau naik sebesar 4,07% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 88.138.698.876,80. Dana Perimbangan Rp. 892.894.089.000,00 atau turun sebesar 3,07% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 837.455.694.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 227.153.417.351,00 atau naik sebesar 18,43%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 144.403.606.735,00.

Tahun 2015 target pendapatan sebesar Rp. 1.218.198.405.395,00 atau naik sebesar 0,90% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 98.150.899.043,10 atau naik sebesar 4,07% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 94.308.407.744,21, Dana Perimbangan Rp. 892.894.089.000,00 atau turun sebesar 3,07% dari proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 921.201.263.400,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 227.153.417.351,00 atau naik sebesar 18,43%% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 191.810.967.408,00.



Tahun 2016 target pendapatan sebesar Rp. 1.490.761.790.629,61 atau naik sebesar 12,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Meningkatnya target pendapatan Tahun 2016 ada pada komponen dari Dana Perimbangan dikarenakan pada Tahun 2016 adanya tambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari pemerintah pusat. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 target sebesar Rp. 132.323.164.813,71 atau naik sebesar 31,13% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 100.909.996.286,90. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah target sebesar Rp. 149.475.800.315,90 atau turun sebesar 28,16% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan target sebesar Rp. 210.992.064.149,00, dikarenakan adanya pemindahan pos pendapatan sertifikasi guru yang pada tahun 2016 termasuk dalam DAK Non Fisik. Sedangkan Tahun 2017 proyeksi target pendapatan sebesar Rp. 1.494.379.053.539,71 atau naik sebesar 2,73% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang menargetkan sebesar Rp. 1.454.718.494.263,72. Meningkatnya target pendapatan Tahun 2017 ada pada ketiga komponennya yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk Target PAD 2017 sebesar Rp. 133.939.888.901,71 atau naik sebesar 24,05% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang hanya sebesar Rp. 107.973.696.025,72. Target Dana Perimbangan pada Tahun 2017 masih mengikuti angka Tahun 2016 sebesar Rp. 1.208.962.825.500,00 atau naik sebesar 8,46% dari jumlah proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.114.653.527.704,00. Untuk target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 .

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja

langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan Belanja Langsung.

Belanja Daerah yang akan disusun dalam Alokasi Belanja Tak Langsung dan Alokasi Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

- a. Tujuan, Sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
- b. Indikator kinerja harus jelas;
- c. Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus tetap memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai, dan diprioritaskan kepada strategi untuk menjalankan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 yaitu:

- a. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas;
- c. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Daerah;
- d. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Handwritten signature/initials in blue ink.

Tabel 3.4

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015 *)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	576.428.603.053,00	666.471.709.995,00	894.932.515.775,00
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.963.000.000,00	8.344.000.000,00	15.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	68.269.968.100,00	144.772.114.200,00	171.494.550.200,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	150.000.000,00	8.043.198.065,00	2.000.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.854.901.789,60	522.075.355.561,23	652.188.571.153,00	829.131.022.260,00	1.085.427.065.975,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	48.635.195.726	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	261.315.963.686,00	-	-

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015 *)	Target 2016	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	375.190.877.245,00	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	461.487.906.788,00	509.807.831.069,00	685.142.036.657,00	719.713.368.139,61	403.451.987.564,71
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	948.342.808.577,60	1.031.883.186.630,23	1.337.330.607.810,00	1.548.844.390.399,61	1.488.879.053.539,71
	Surplus/(Defisit)	7.325.214.103,67	60.406.634.289,07	(58.147.261.419,39)	(58.082.599.770,00)	5.500.000.000,00

*) Perubahan APBD 2015

Sumber : Data Diolah Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Sedangkan Target Pendapatan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Target Belanja Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Target Belanja Dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	533.014.991.714,00	444.158.038.679,00	488.573.842.547,00	537.431.226.802,00	591.174.349.482,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.075.916.500,00	24.102.000.000,00	24.584.000.000,00	25.075.000.000,00	25.577.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.280.281.709,00	6.067.000.000,00	6.370.000.000,00	6.688.000.000,00	7.023.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	27.118.060.200,00	25.519.680.000,00	27.306.057.000,00	29.217.481.000,00	31.262.705.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.196.150.000,00	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	1.200.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	577.685.400.123,00	500.146.718.679,00	547.433.899.547,00	599.311.707.802,00	656.237.054.482,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	19.614.405.536,00	47.385.176.742,00	49.754.435.579,00	52.242.157.358,00	54.854.265.225,00

Handwritten signature

NO	Uraian	Jumlah Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya				
		Target 2013 *)	Target 2014 **)	Target 2015 **)	Target 2016 **)	Target 2017 **)
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.888.435.864,00	209.778.988.022,04	230.756.886.824,21	253.832.575.506,90	279.215.833.058,00
2.2.3	Belanja Modal	146.129.585.063,00	373.641.971.060,00	379.375.416.602,00	419.837.008.409,00	464.411.341.499,00
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	250.632.426.463,00	630.806.135.824,04	659.886.739.005,21	725.911.741.273,90	798.481.439.782,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	828.317.826.586,00	1.130.952.854.503,04	1.207.320.638.552,21	1.325.223.449.075,90	1.454.718.494.264,00
	Surplus/(Defisit)	(156.670.832.103,80)	(60.954.854.891,24)	0,00	0,00	(0,28)

Sumber : *) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014
**) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 948.342.808.577,60 atau naik sebesar 14,49% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 828.317.826.586,00. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 486.854.901.789,60 atau turun sebesar 15,72% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 577.685.400.123,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 461.487.906.788,00 atau naik sebesar 84,13% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 sebesar Rp. 250.632.426.463,00.

Pada Perubahan APBD Tahun 2015 jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.337.330.607.810,00 atau naik sebesar 10,77% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.207.320.638.552,21. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 652.188.571.153,00 atau naik sebesar 19,14% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 547.433.899.547,00. Belanja Langsung sebesar Rp. 685.142.036.657,00 atau naik sebesar 3,83% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 659.886.739.005,21.

Tahun 2016 Target jumlah Belanja Daerah sebesar Rp. 1.548.844.390.399,61 atau naik sebesar 16,87% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.325.223.449.075,90. Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 829.131.022.260,00 atau naik sebesar 38,35% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 599.311.707.802,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp. 719.713.368.139,61 atau turun sebesar 0,85% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 725.911.741.273,90.

Dan Proyeksi Tahun 2017 Belanja Daerah sebesar Rp. 1.488.879.053.539,71 atau naik sebesar 2,35% dari Proyeksi RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 1.454.718.494.264,00. Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.085.427.065.975,00 atau naik sebesar 65,40% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 656.237.054.482,00. Proyeksi Belanja Langsung sebesar Rp. 403.451.987.564,71 atau turun sebesar 97,91% dari proyeksi pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebesar Rp. 798.481.439.782,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran daerah diantaranya pembentukan dana cadangan; Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang semakin besarnya peran pengeluaran konsumsi rumah tangga menyebabkan sifat pertumbuhan ekonominya kurang berkualitas, karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak disertai penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seperti yang telah menjadi target pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk menyediakan infrastruktur yang memadai memerlukan

biaya yang sangat besar, yang tidak mungkin dibiayai oleh APBD saja, perlu digali alternatif-alternatif sumber pembiayaan daerah pada umumnya, dan khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.



Tabel 3.6

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	8.375.000.000,00	5.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	970.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.523.626.000,00	7.000.000.000,00	3.470.000.000,00	8.625.000.000,00	5.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	885.413.026,65	1.210.627.130,32	58.147.261.419,39	58.082.599.770,00	(5.500.000.000,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Jumlah pengeluaran pembiayaan netto Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar Rp. 885.413.026,65 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 34.409.039.026,65 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 33.523.626.000,00. Tahun 2014 jumlah pengeluaran pembiayaan netto sebesar Rp. 1.210.627.130,32 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 8.210.627.130,32 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Untuk APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp. 58.147.261.419,39 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 61.617.261.419,39 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.470.000.000,00. Sedangkan untuk target Tahun 2016 sebesar Rp. 58.082.599.770,00 dengan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 66.707.599.770,00 dan jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 8.625.000.000,00. Dan proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dari jumlah pengeluaran pembiayaan.

Dari jumlah realisasi pendapatan dikurangi jumlah realisasi belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 terdapat Surplus sebesar Rp. 7.325.214.103,67 begitu juga Tahun 2014 Surplus sebesar Rp. 60.406.634.289,07. Tahun 2015 data sementara masih terdapat defisit sebesar Rp. 57.647.261.419,39 yang diakibatkan dari target pendapatan yang belum tercapai dari target pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk lebih jelas Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sampai dengan Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

Realisasi, Target Dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Kabupaten Kubu Raya

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	64.277.117.327,27	97.407.483.796,39	118.088.916.074,71	132.323.164.813,71	133.939.888.901,71
1.1.1	Pajak Daerah	48.513.648.885,95	64.729.599.444,05	82.538.049.986,00	87.781.508.500,00	89.398.264.095,00
1.1.2	Retribusi Daerah	11.575.759.260,00	25.180.126.655,62	7.274.697.775,00	7.565.488.000,00	7.565.488.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	166.756.499,13	563.736.663,41	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.020.952.682,19	6.934.021.033,31	25.526.168.313,71	34.226.168.313,71	34.226.168.313,71
1.2	Dana Perimbangan	774.980.539.716,00	841.715.445.482,00	913.975.489.000,00	1.208.962.825.500,00	1.208.962.825.500,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.438.716,00	59.938.735.482,00	56.602.817.000,00	50.421.469.500,00	50.421.469.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	627.894.391.000,00	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	787.062.196.000,00	787.062.196.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.923.710.000,00	82.076.280.000,00	124.602.430.000,00	371.479.160.000,00	371.479.160.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.410.365.638,00	153.166.891.640,91	247.118.941.315,90	149.475.800.315,90	151.476.339.138,00
1.3.1	Hibah	1.380.802.021,00	410.910.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.174.451.617,00	27.118.612.640,91	65.936.946.315,90	66.564.316.315,90	68.564.855.138,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
	Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.724.000.000,00	30.474.000.000,00	8.974.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Dana Tunjangan Profesi Guru Dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi)	73.131.112.000,00	95.163.369.000,00	137.770.342.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Dana Kapitasi FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	0,00	0,00	34.437.653.000,00	77.211.484.000,00	77.211.484.000,00
A	JUMLAH PENDAPATAN	955.668.022.681,27	1.092.289.820.919,30	1.279.183.346.390,61	1.490.761.790.629,61	1.494.379.053.539,71
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	410.102.974.015,78	459.863.440.395,90	576.428.603.053,00	666.471.709.995,00	894.932.515.775,00
2.1.2	Belanja Bunga	251.426.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	51.491.983.657,00	34.334.044.734,00	4.963.000.000,00	8.344.000.000,00	15.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.823.602.168,86	2.961.527.608,33	2.377.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RT

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.184.915.000,00	24.688.805.000,00	68.269.968.100,00	144.772.114.200,00	171.494.550.200,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	227.537.823,00	150.000.000,00	8.043.198.065,00	2.000.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.854.901.789,60	522.075.355.561,23	652.188.571.153,00	829.131.022.260,00	1.085.427.065.975,00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	35.175.442.409,00	48.813.960.114,00	48.635.195.726	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.844.700.074,00	150.730.613.970,00	261.315.963.686,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	271.467.764.305,00	310.263.256.985,00	375.190.877.245,00	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	461.487.906.788,00	509.807.831.069,00	685.142.036.657,00	719.713.368.139,61	403.451.987.564,71
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	948.342.808.577,60	1.031.883.186.630,23	1.337.330.607.810,00	1.548.844.390.399,61	1.488.879.053.539,71
	Surplus/(Defisit)	7.325.214.103,67	60.406.634.289,07	(58.147.261.419,39)	(58.082.599.770,00)	5.500.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RT

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.409.039.026,65	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	66.707.599.770,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	8.375.000.000,00	5.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	31.023.626.000,00	0,00	970.000.000,00	250.000.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.523.626.000,00	7.000.000.000,00	3.470.000.000,00	8.625.000.000,00	5.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	885.413.026,65	1.210.627.130,32	58.147.261.419,39	58.082.599.770,00	(5.500.000.000,00)
G	Sisa Lebih Pembiayaan	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2013	Realisasi 2014	Target 2015	Target 2016*)	Proyeksi 2017
1	2	3	4	5	6	7
	Anggaran Tahun Rencana (SILPA)					
H	PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)	477.909.161.048,64	633.042.353.907,78	746.759.298.076,39	719.713.368.139,61	403.451.987.564,71

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
 *) Proyeksi Sementara Tahun 2016

214

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna memadukan langkah para pemangku kepentingan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Dari masalah-masalah yang ada, maka disusunlah sasaran-sasaran pencapaiannya menunjukkan tingkat kinerja program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 sebagai tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memiliki arti strategis karena meletakkan landasan bagi pencapaian target-target pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dan melanjutkan pembangunan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan pencapaian target kinerja pembangunan tahun 2017 tersebut tidak terlepas dan saling terkait pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta Memiliki Daya Saing”** yang dapat dijelaskan bahwa:

Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Harmonis dan Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (**isu Good Governance**) ;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas (**isu Sosial-Budaya**) ;

- 3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah (**isu Ekonomi**) ;
- 4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat (**isu Kewilayahan dan Infrastruktur**).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Visi dan Misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, telah ditetapkan dan dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019

TAHUN					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan	Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah	Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, maka arah kebijakan tahunan yang akan menjadi Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yaitu **Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**.

RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 memprioritaskan fokus pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah, serta membuka isolasi daerah dan mendorong berkembangnya sektor perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2016 ini juga sudah dilakukan peningkatan dan pemantapan Infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang mencakup urusan identitas hukum, perlindungan,

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Mengurangi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan serta memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya.

Selanjutnya pada Tahun 2018 pembangunan infrastruktur wilayah dan prasarana umum lain masih terus ditingkatkan yang disertai dengan peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah melalui sektor-sektor unggulan Kabupaten Kubu Raya terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pada Tahun 2019 dalam rangka memberikan akselerasi pada pertumbuhan ekonomi dilakukan pembangunan, peningkatan keunggulan dan daya saing daerah serta pengembangan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan sentra-sentra ekonomi unggulan Kabupaten Kubu Raya khususnya pada kawasan kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan tanaman pangan berkelanjutan (food estate), kawasan industri, jasa dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi peningkatan nilai tambah pada usaha-usaha ekonomi berbasis agroindustri, sumber daya alam dan potensi masyarakat.

Pada akhir RPJMD kedua Tahun 2019 diharapkan target-target prioritas pembangunan jangka menengah sebagian besar sudah dapat dicapai sehingga dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan pada semua aspek prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur wilayah sehingga dapat memberikan daya tarik dan nilai tambah bagi Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi tujuan investasi yang kondusif dan tempat hunian yang didukung oleh infrastruktur wilayah, sarana dan prasarana yang memadai.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

LSX

Tabel 4.2

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RKPD 2017 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing			
MISI I	:	Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik Dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>)			
TEMA RKPD 2017	:	“Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing”			
RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD
1	2	3	4	5	6
1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional	1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional	1. Memberi peluang yang seluas-luasnya kepada aparatur teknis dan fungsional untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	1. Peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif

Lat

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

			2. Pengkajian dan evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)	2. Penataan SKPD/Badan dalam rangka efisiensi dan efektifitas	2. Memperkuat SOPD dalam kerangka efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas public
			3. Penempatan aparaturnya yang sesuai dengan kompetensi	3. Penajaman analisis jabatan dan analisis SWOT birokrasi	3. The right man on the right place
		2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	1. Memberikan porsi pembiayaan pembangunan berbasis perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis secara proporsional dan akuntabel	1. Pembiayaan pembangunan harus berorientasi manfaat dan prioritas	1. Perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dan terpadu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program
			2. Memberikan akses informasi sistem perencanaan pembangunan berbasis Informasi Teknologi (IT)	2. Menyusun perencanaan pembangunan dengan program IT dan melatih operatornya secara berkala	2. Memperkuat dan mempercepat penyusunan perencanaan pembangunan secara transparan dan mudah di akses
	1. Mendorong keterlibatan dan peran serta aktif stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan				

247

2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatkan kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik	1. Mengembangkan kapasitas dan mengefektifkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat	1. Meningkatkan fasilitas sapras dalam mempercepat pelayanan publik
			2. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2. Memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan SOP pelayanan publik	2. Pemberdayaan sumber daya aparatur yang profesional
			3. Peningkatan pelayanan publik yang kompeten dan berorientasi pada pemanfaatan IT dalam proses kerja	1. Membiasakan penggunaan IT dalam proses pelayanan publik	3. Memperkuat pelaksanaan SOP dengan disiplin dan konsisten
					1. Sosialisasi dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan publik
					2. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
					1. Membangun unit layanan pengaduan yang efektif dan efisien
		2. Menyediakan akses layanan pengaduan yang cepat	1. Membentuk unit layanan pengaduan yang responsif dan akuntabel	1. Unit yang mempermudah konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder yang ada	

19

			2. Memberikan kemudahan/fasilitasi dalam pelayanan pengaduan publik	2. Meningkatkan respon balik yang tepat sebagai layanan yang profesional	2. Meningkatkan kualitas fasilitas dalam pelayanan publik
--	--	--	---	--	---

221

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing					
MISI II	: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas Dan Memiliki Kreativitas (Isu Sosial Budaya)					
TEMA RKPD 2017	: “Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing”					
RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019						RKPD KABUPATEN KUBU RAYA 2017
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD	
1	2	3	4	5	6	
1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat	1. Melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM	1. Peningkatan pelayanan pendidikan dasa dan menengah bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali	1. Memperluas bantuan Program Indonesia Pintar dan beasiswa

24-1

		3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak	1. Memprioritaskan anggaran untuk kepentingan fisik dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dengan prasarana yang layak
		4. Pemerataan jumlah sekolah	1. Mendata secara valid jumlah usia anak sekolah dengan ketersediaan sekolah yang ada	1. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan bersekolah
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Memberikan kesempatan secara objektif kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi	1. Rekrutmen tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan dan keahlian
		3. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	1. Pendataan yang valid untuk penduduk miskin dalam kerangka bantuan pendidikan yang sistematis dan komprehensif 2. Tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan biaya pendidikan	1. Selektif dalam pemberian beasiswa dan reward untuk siswa

247

			2. Mengkembangkan pentingnya pendidikan	1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan info tentang sekolah / pendidikan	1. Pendataan online status siswa dan sekolah yang bisa diakses oleh stakeholder
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat	1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	1. Menerapkan Jaminan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat	1. Memperluas kepesertaan program SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan	1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
			2. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah	1. Meningkatkan sarana kesehatan di masyarakat	1. Pemenuhan sapsas fasilitas layanan kesehatan
			3. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			4. Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan desa siaga	1. Memenuhi persyaratan desa siaga	1. Memperkuat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			5. Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pedesaan	1. Peningkatan kualitas lingkungan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak	1. Meningkatkan pengadaaan air bersih dan ODF / tidak ada buang air besar sembarangan

Lat

	6. Meningkatkan kualitas surveillance berbasis masyarakat	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam memperhatikan kualitas kesehatan lingkungan	1. Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan memelihara kesehatan bersama
		1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan suami-istri dalam kepesertaan KB Mandiri	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
		7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB Mandiri	
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	1. Peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan dan rekrutimen SDM kesehatan yang transparan dan berkualitas	1. Penyediaan dan penempatan Sumber Daya Manusia kesehatan
		2. Meningkatkan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	1. Penguatan sistem informasi dan akses masyarakat terhadap masalah kesehatan
		3. Mengembangkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit	1. Menggalakan pola hidup sehat dan disiplin mengimplementasikannya
			1. Memperkuat upaya promotif dan preventif

243

3. Meningkatkan peran stakeholder dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam melestarikan seni dan budaya	1. Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh	1. Pengembangan destinasi pariwisata daerah
			2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan seni budaya yang kreatif	1. Internalisasi nilai-nilai kesenian dalam proses pembelajaran ekstra di sekolah	2. Pemantapan nilai-nilai positif (kebiasaan) dalam kehidupan bermasyarakat
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1. Meningkatkan kegiatan keagamaan masyarakat	1. Memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan	1. Memberi akses dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan
			2. Membina kerukunan kehidupan beragama	1. Meningkatkan pemberan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan ibadahnya	1. Meningkatkan toleransi antar umat beragama
			3. Mengembangkan lembaga pembina keagamaan	1.	1. Mengayomi dan membina semua lembaga keagamaan yang diakui negara

221

		2. Meningkatkan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder	1. Penataan sistem aktivitas dan kualitas kehidupan beragama	1. Membangun komunikasi efektif dalam kerangka hubungan antar umat beragama
			2. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan	1. Meningkatkan pembangunan rumah ibadah dan penunjang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat	1. Memperkuat dalam keberpihakan anggaran daerah untuk kepentingan saptas keagamaan

Handwritten signature/initials

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing			
MISI III	:	Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah (Isu Ekonomi)			
TEMA RKPD 2017	:	“Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing”			
RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	1. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif	1. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah		1. Peningkatan daya saing dan produktivitas
			2. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat		
			3. Meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah		
			4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif		1. Menciptakan kondisi yang stabil dan nyaman dalam berusaha

191

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

		2. Peningkatan kemitraan usaha koperasi / usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang ekonomi kreatif masyarakat	1. Meningkatkan akses pemodaln bagi UMKM dan koperasi	1. Meningkatkan akses pemodaln dan layanan kredit mikro	1. Memberi kemudahan dalam proses pemodaln dan pemasaran
			2. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna	1. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi	1. Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan (koperasi)
			3. Memfasilitasi pemenuhan standar mutu dan label halal bagi produk UMKM dan koperasi		1. Mengoperasionalkan pusat layanan usaha terpadu
					2. Memfasilitasi pelatihan dan bimtek bagi UMKM
	2. Meningkatkan investasi penanaman modal daerah	1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan investasi untuk	1. Mempermudah proses perizinan	1. Menyederhanakan peraturan dan perizinan	1. Memperkuat kepastian berusaha yang baik
			2. Meningkatkan infrastruktur perekonomian daerah		

29

	menunjang perekonomian daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	3. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan produk unggulan daerah	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang mengolah komoditi utama daerah	1. Mendorong tumbuhnya industri yang mengolah komoditi utama daerah yang mendukung pengembang sektor primer
		1. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja		
	2. Peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah	2. Meningkatkan dan mengembangkan diverifikasi usaha		
		3. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah		

2017

	3. Meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat		
			2. Mengembangkan kawasan-kawasan sentra industri		
			3. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha		
			1. Mengembangkan pemanfaatan tata ruang kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh berbasis daya dukung lingkungan		
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan kawasan strategis yang berkelanjutan	2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi cepat tumbuh		

281

		2. Pengelolaan potensi sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dengan fungsi lingkungan hidup	1. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		
			2. Melakukan perlindungan / konservasi terhadap Sumber Daya Alam yang rawan kepunahan		
	2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan akses, kualitas dan ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan ketahanan pangan dan cadangan pangan yang berkelanjutan		
			2. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian		
			3. Membangun dan meningkatkan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan		

Let

		2. Peningkatan revitalisasi pertanian dan pengembangan pusat agrobisnis dan agroindustri	4. Mengembangkan kawasan budi daya untuk ketahanan pangan		
			1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan		
			2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian		
			3. Mengembangkan kawasan agropolitan dan agroindustri		
			4. Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat agrobisnis dan agroindustri		

221

		3. Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	1. Mengembangkan kawasan produksi kelautan dan perikanan		
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan		
			3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan		
	3. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan kualitas lingkungan hidup	1. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		
			2. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup		
			3. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup		

2017

			4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup		
--	--	--	---	--	--

2017

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing			
MISI IV	:	Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat (Isu Kewilayahan)			
TEMA RKPD 2017	:	“Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur Menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing”			
RPJMD KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2019					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD
1	2	3	4	5	6
1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya	1. Meningkatkan pelayanan penyediaan sarana prasarana transportasi	1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk mendukung pertumbuhan wilayah	1. Peningkatan pelayanan kualitas dan kuantitas angkutan transportasi	1. Pengembangan infrastruktur transportasi, perhubungan (darat, danau, sungai, laut) dan penyeberangan guna memudahkan aliran barang, jasa dan orang
			2. Peningkatan aksesibilitas pusat-pusat permukiman		1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau disertai sarana dan prasarana yang memadai

241

			3. Peningkatan akses dan membuka isolasi wilayah sebagai sentra produksi dan akses pasar	1. Mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra-sentra produksi barang dan jasa menuju pasar	1. Mendorong peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten dan provinsi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
				2. Peningkatan sapsas daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra produksi	
			4. Pengembangan, peningkatan dan fasilitasi penyediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informasi	1. Kerjasama dengan stakeholder media dan jaringan komunikasi dalam mempercepat penyediaan sapsas informasi	

24

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata	1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi	1. Pengembangan jaringan listrik PLN bagi daerah yang masih terisolir	1. Melakukan diversifikasi dan konversi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah yang masih terisolir
		2. Pengembangan energi alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan	1. Penelitian, pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan	2. Peningkatan penggunaan PLTS
				1. Mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan energi terbarukan
				2. Memantapkan pemahaman kepada masyarakat bahwa energi terbarukan harus ramah lingkungan
3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik	1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	1. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih yang merata dan berkualitas	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengadaaan air bersih yang ramah lingkungan	1. Menjamin ketersediaan air bersih dengan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air bersih dan pengelolaan sanitasi
				2. Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku secara optimal dan merata

Lat

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan, pengolahan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana air limbah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembangunan sapsas air baku dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi dan pengendalian daya rusak air
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	1. Meningkatkan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman 2. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebutuhan jalan, listrik, air bersih dan perangkat infrastruktur lainnya sebagai landasan utama untuk berinvestasi 1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak, aman dan terjangkau 1. Memberikan kemudahan kepada pengembang untuk membangun kawasan perumahan yang layak

29

			<p>3. Memfasilitasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman</p> <p>4. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih</p>	<p>1. Meningkatkan pembangunan sapsas permukiman</p>	<p>1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung sapsas yang memadai</p>
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	<p>1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya</p>	<p>1. Menetapkan rencana umum dan rencana rinci Kabupaten Kubu Raya</p> <p>2. Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan</p>	<p>1. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan</p> <p>1. Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>1. Mendorong peran aktif masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten</p> <p>1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten dan pemahaman masyarakat lingkungan hidup yang sehat untuk generasi berikutnya</p>

LA

			3. Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan		1. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan
			4. Pengembangan dan perlindungan sumber-sumber air baku untuk air bersih		
		3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penataan ruang	1. Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat		
		4. Perlindungan kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam tata ruang	1. Penetapan ruang terbuka hijau		
	2. Terkendalinya pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		

221

4. Meningkatkan Cakupan Layanan Persampahan	1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	1. Pembangunan tempat penampungan sampah sementara yang representatif	1. Peningkatan jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di setiap kecamatan	1. Pemenuhan ruang (lahan) untuk fasilitas pengelolaan sampah sementara
			2. Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) persampahan yang layak	1. Peningkatan luas TPA yang sudah ada, dan menginventarisir lahan alternatif lainnya	1. Pemenuhan lahan TPA yang representatif dan jauh dari permukiman
			3. Penambahan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan	1. Penambahan jumlah armada dump truck, armada roll, container sampah dan unit TPS	1. Peningkatan jumlah armada, pekerja (supir, pekerja, operator dan KPL) dan teknologi pengolahan persampahan
			4. Pengembangan pengolahan persampahan sebagai sumberdaya ekonomi	1. Peningkatan pengolahan sampah di TPA	

24

		2. Peningkatan kapasitas personil pengelolaan persampahan	1. Penambahan petugas pengelolaan persampahan	1. Rekrutmen SDM pengelola persampahan	1. Peningkatan jumlah SDM pengelola persampahan
			2. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial dan kesejahteraan petugas pengelola persampahan	1. Memberikan kemudahan akses mengenai SJSN	1. Peningkatan keikutsertaan SJSN Kesehatan dan SJSN Ketenagakerjaan

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020 atau disebut “**Nawa Cita**” adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan Nasional Tahun 2017 yang berkenaan dengan Nawacita adalah “**Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah**”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah “**Hilirisasi Pembangunan Industri Bderbasis Sumber Daya Alam dan Modernisasi Infrastruktur Perdagangan untuk Kalimantan Barat yang berdaya Saimg dan Berkeadilan**”

Dengan mengacu agenda Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, maka tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah “**Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing**”

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap mengacu kepada Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Kubu Raya dengan

pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Barat
Dan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

NASIONAL	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA
1	2	3
<i>Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah</i>	<i>Hilirisasi Pembangunan Industri Berbasis Sumber Daya Alam dan Modernisasi Infrastruktur Perdagangan untuk Kalimantan Barat yang berdaya Saing dan Berkeadilan</i>	<i>Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dengan didukung Pembangunan Infrastruktur menuju Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis, dan Berbudaya serta Berdaya Saing</i>

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa tema pembangunan daerah tahun 2017 secara umum selaras dan saling terkait, dimana pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai pondasi menunjang pembangunan ekonomi yang berkualitas dalam rangka membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan antar wilayah. Sementara di Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kuu Raya juga sama memfokuskan pembangunan infrastruktur dalam kerangka mendukung pembangunan industry dan peningkatan ekonomi kerakyatan agar mampu meningkatkan kualitas produk dan berdaya saing untuk menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi dengan Kabupaten Kubu Raya yang tercermin dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan dan Pemantapan Infrastruktur, didukung dengan upaya:
 - a. Peningkatan Infrastruktur.

- b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
 - c. Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota.
 - d. Peningkatan Pembangunan Maritim dan Kelautan.
2. Peningkatan dan Pemantapan Pelayanan Dasar, didukung dengan upaya:
- a. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan.
 - b. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa.
 - c. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual.
 - d. Peningkatan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum.
3. Mendorong Percepatan Pembangunan, didukung dengan upaya:
- a. Peningkatan Kesejahteraan.
 - b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.
 - c. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif.

Selain keselarasan tema, keselarasan prioritas pembangunan juga sangat menentukan terwujudnya sinkronisasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat dengan Prioritas Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten,
Provinsi, Dan Nasional

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat (Prioritas 1) - Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia (Prioritas 2) - Meningkatnya Derajat Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Sasaran No.2) ; (Pendidikan dan Kesehatan) 	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (NC.5)

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	2	3	4	5
		Masyarakat (<i>Prioritas 3</i>)		
2	Peningkatan Kesejahteraan	- Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat (<i>Prioritas 1</i>)	- Sasaran Makro (<i>Sasaran No.1</i>) ; (Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Ekonomi Makro)	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (<i>NC.5</i>)
3	Peningkatan Infrastruktur	- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar (<i>Prioritas 5</i>)	- Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (<i>Sasaran No.3</i>)	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (<i>NC.6</i>) dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (<i>NC.7</i>)
4	Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Baik dan Berwibawa	- Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik (<i>Prioritas 4</i>)	- Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (<i>Sasaran No.6</i>) ; (Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah)	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya (<i>NC.2</i>)
5	Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spritual	- Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, keadilan, Aman, Damai erta Ketahanan Budaya (<i>Prioritas 7</i>)	- Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (<i>Sasaran No.2</i>)	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (<i>NC.8</i>) dan Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial (<i>NC.9</i>)
6	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang	- Meningkatnya Derajat Kesejahteraan	Sasaran Pembangunan Sektor	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	2	3	4	5
	Berwawasan Lingkungan	n Masyarakat (Prioritas 1)	Unggulan (Sasaran No.3)	Internasional (NC.6) dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (NC.7)
7	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat (Prioritas 1) - Meningkatkan Kecerdasan Sumber Daya Manusia (Prioritas 2) - Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan (Prioritas 6) 	Sasaran Makro (Sasaran No.1) ; (Pembangunan Manusia dan Ekonomi Makro)	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (NC.6) dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (NC.7)
8	Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan (Prioritas 6) - Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya (Prioritas 7) 	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Sasaran 3)	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (NC.6) dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (NC.7)
9	Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya (Prioritas 7)	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan (Sasaran No.4) dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah (Sasaran No.5)	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan (NC.4) dan Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa

NO	PRIORITAS KABUPATEN KUBU RAYA	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL	KAITAN DENAGN NAWACITA (PRIORITAS NASIONAL)
1	2	3	4	5
				dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara (NC. 1)
10	Meningkatkan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum	Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Masyarakat (Prioritas 3)	Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Sasaran No.6)	Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara (NC. 1) dan Memperkuat kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (NC.4)
11	Meningkatkan Pembangunan Maritim dan Kelautan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar (Prioritas 5) dan Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya (Prioritas 7)	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Sasaran No.3)	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (NC.6) dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik (NC. 7)

Prioritas pembangunann Kabupaten Kubu Raya menentukan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yaitu dengan menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan masyarakat dengan melihat indikator :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- Kemiskinan.
- Tingkat Pengangguran.
- Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran pembangunan kewilayahan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan Kewilayahan Tahun 2017

NO	INDIKATOR SASARAN KEWILAYAHAN	TAHUN 2014/2015		
		NASIONAL	KALBAR	KUBU RAYA
1	2	3	4	5
1	IPM	68,90/69,55	64,89/NA	64,52/65,49
2	IPMas	0,55/-	-	-
3	Kemiskinan (%)	10,97/11,22	8,07/8,44	5,57/5,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,94/6,18	4,04/4,81	6,18/6,07
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02/4,80	5,02/4,81	6,44/6,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2016

IPMas adalah Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut di atas, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 naik dari 64,52 tahun 2014 menjadi 65,49, berada masih berada dibawah IPM Provinsi Kalbar Dan IPM Nasional. Sementara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 sebesar 5,57% dan turun pada tahun 2015 menjadi 5,50%, angka ini lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalbar dan Nasional yang sudah mencapai dua digit. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 sebesar 6,54% berada diatas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan Nasional yang masing-masing 4,81% dan 4,80%.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 maka Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya prioritas nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Kubu Raya, sinkronisasi dalam menyusun RKPD 2017 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional harus sejalan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD. RKP 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan. Sedangkan RKPD 2017 Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Untuk lebih memahami penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Tahun 2017 pada table 4.6 di bawah ini :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA					
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017					
PENJELASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN, SASARAN, DAN PRIORITAS RKP 2017					
NO	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017			RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017	
	PRIORITAS	SASARAN	TUJUAN	STRATEGI RKPD	ARAH KEBIJAKAN RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAWACITA VIII : NAWACITA IX :					
MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL					
1	REVOLUSI MENTAL	A Meningkatkan Integritas	1 Meningkatkan perilaku anti korupsi	a Memberikan tauladan di lingkungan bekerja dan masyarakat b Peningkatan kampanye publik "Perilaku Anti Korupsi" di media-media	- Meningkatkan pelayanan publik dengan cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif - Reformasi tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa
			2 Indeks penegakan hukum berkualitas	a Tegas dalam pemberian sanksi/hukuman dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku b Meningkatkan sosialisasi akan sadar hukum di masyarakat	- Pendidikan yang berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras) - Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dan memilih

	3	Percentase aparaturn pemerintah/ penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum	a	Penegakan disiplin/hukum tanpa pandang bulu dan status	- Fokus pada prioritas pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan atas azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
	4	Percentase kepuasan publik atas penanganan perkara	a	Penanganan perkara dengan menjunjung asas kebenaran dan keadilan	- Harmonisasi dan simplifikasi perda dan aturan lainnya untuk mendorong kreativitas masyarakat
	5	Efektivitas pendidikan karakter di sekolah dan Perguruan Tinggi	a	Meningkatkan pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia	- Peningkatan peran lembaga dan media dalam pembangunan karakter bangsa
			b	Pejabat dan pemimpin daerah harus menjadi tauladan	- Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan bekerja berorientasi pada hasil yang bermutu dan nilai tambah
			c	Penggalakan baca-tulis Al-Qur'an dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	- Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat
	6	Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan	a	Sosialisasi perda secara efektif dan efisien	- Peningkatan semangat kerja keras, kreatif dan profesional

	B Meningkatnya Etos Kerja	7 Efektivitas belanja pemerintah (manfaat, biaya, dan kualitas)	a Belanja berdasarkan prioritas program	- Meningkatkan semangat berkompetisi sehat dalam berkarya
		1 Peningkatan kualitas pelayanan publik di K/L, legislatif, dan pemerintah daerah	b Semua belanja Pemda harus dipertanggungjawabkan	- Meningkatkan perilaku kerja sehat dan selamat di tempat kerja
			a Meningkatkan kualitas SDM di K/L, legislatif, dan pemerintah daerah	- Percaya diri dan selalu bangga pada karya anak bangsa
			b Saling memperkuat fungsi dan tugas masing-masing kelembagaan	- Meningkatkan karya cipta dan inovasi yang siap bersaing dengan daerah bahkan negara lain
		2 Peningkatan produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah wiraswasta, hasil riset, publikasi ilmiah)	a Meningkatkan perlindungan hasil karya intelektual individu maupun masyarakat b Memberikan akses kepada masyarakat untuk	- Peningkatan kontribusi produk daerah dalam konsumsi rumah tangga
		3 Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja	a Meningkatkan kinerja guru dengan monev secara berkala	- Meningkatkan etos kerja dan disiplin bekerja
		4 Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	a Meningkatkan dan memotivasi masyarakat cinta dan bangga memakai produk dalam negeri	

		5 Peningkatan semangat persaingan yang sehat (cooperate and compete)	a Promosi dan mutasi secara berkala dan sesuai aturan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan toleransi, gotong royong dan rasa aman masyarakat- Menurunnya angka kekerasan dan anak telantar- Penguatan jati diri sebagai anak bangsa dengan jiwa patriot dan cinta damai- Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan
		6 Perilaku hidup bersih, dan sehat	a Memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari hidup sederhana dan bersih	
			b Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di tempat bekerja	
			a Mengaktifkan kembali kerja bakti rutin di lingkungan tempat tinggal	
			b Meningkatkan kualitas toleransi kepada teman yang berbeda SARA	
C Meningkatkan Gotong Royong	1 Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)		a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	
	2 Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat		a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	
	3 Meningkatkan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme		a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	
	4 Indeks Ketahanan Keluarga (angka perceraian, anak telantar)		a Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan keluarga	

14

				b Menjaga dan mengawasi pergaulan anak dengan lingkungan	
		5 Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme, dan pornografi		a Meningkatkan kualitas kegiatan rohani, olahraga dan berorganisasi yang bermanfaat	
NAWACITA V : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA					
2 PENDIDIKAN	A Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	1 Meningkatkan ketepatan waktu menamatkan pendidikan dasar 9 tahun	a Memberikan latihan dan try out secara rutin dan berkala khususnya kepada siswa kelas 9 SMP/MTs	- Melanjutkan layanan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas	
		2 Meningkatkan angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	a Menambah dan memperkuat kelompok belajar dalam pelaksanaan Keaksaraan Fungsional	- Memperkuat jaminan kualitas pelayanan pendidikan	
		3 Meningkatkan rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	a	- Memperkuat kurikulum dan sistem penilaian yang komprehensif dan kredibel	
			b	- Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan	

RT

	B	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	1	1	Percentase SD/MI berakreditasi minimal B	a	Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
			2	2	Percentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	a	Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Mempersiapkan persyaratan administrasi dan faktual untuk keperluan akreditasi sekolah
			3	3	Percentase SMA/MA berakreditasi minimal B	a	Memperkuat kelengkapan persyaratan akreditasi di satuan pendidikan	- Meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan agama, kewargaan dan karakter
	C	Penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata	1	1	Percentase guru berakreditasi minimal S1/D-IV	a	Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya yang linear serta pemberian beasiswanya	- Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
			2	2	Percentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge)	a	Guru diberi kesempatan dan kemudahan untuk mengikuti pelatihan dan kursus dalam rangka meningkatkan kompetensi	- Membangun budaya sekolah yang kondusif dan menyenangkan bagi penciptaan lingkungan belajar

RT

	D Pengembangan pembelajaran yang berkualitas	1 Kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman	b	
			a Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri dan kemampuan dasar	- Peningkatan kualitas standarisasi pendidikan nasional
			b Penguatan kerjasama dan umpan balik guru, kepek, dan pengawas untuk mendukung efektivitas pembelajaran	- Penerapan Muatan Lokal dalam pembelajaran
			c Diversifikasi kurikulum	- Peningkatan kualitas pelaksanaan OSN, D2SN, FLS2N dan kompetisi lainnya
				- Implementasi pendidikan tanpa kekerasan
		2 Nilai test PISA dan ranking (dari 65 negara) : Matematika (ranking 64 dari 65 negara), Sains (ranking 64 dari 65 negara), Membaca (ranking 60 dari 65 negara)		
		3 Persentase pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment)	a Peningkatan pendidikan mengenal lingkungan (orientasi) dengan program yang menyenangkan tanpa kekerasan	- Peningkatan pemahaman pendidikan seksualitas

67

E	Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter	1 Pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia	a	Menguatkan internalisasi nilai-nilai agama : akhlak mulia, toleran, saling menghormati	- Memperkuat praktek nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti
			b	Guru harus menjadi role model, memberikan teladan bagi siswa dan meningkatkan kompetensi dirinya	- Membangun dan meningkatkan lingkungan tempat tinggal dan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dalam bergaul dan berinteraksi
			c	Membina siswa untuk meningkatkan kualitas budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik	- Pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap pergaulan anak dan lingkungan
			2	Tingkat integritas lingkungan pendidikan SD-SMP (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme)	- Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan
			a	Diberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang melakukan kejahatan pendidikan	- Meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan agama, kewargaan dan karakter
F	Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif	1 Bantuan biaya operasional pendidikan	b	Meningkatkan kualitas kejujuran dan tanggung jawab kepada insan pendidikan	-
			a	Pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana BOS dan BOSDA sesuai aturan	- Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS

	2.4	Terlaksananya pelaksanaan program, Evaluasi dan Pelaporan	2.4a	Pembinaan dan pengawasan Program, Evaluasi dan Pelaporan	2.4a.1	Peningkatan kualitas program, evaluasi dan pelaporan	2.d	Jumlah program yang terlaksana dan semakin tingginya evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	
	2.5	Tercapainya publikasi dan sosialisasi PAUD	2.5a	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.5a.1	Promosi dan sosialisasi PAUD	2.e	Jumlah publikasi dan sosialisasi PAUD	
	2.6	Terlaksananya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	2.6a	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.6a.1	Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pengembangan kurikulum	2.f	Persentase daya serap pelaksanaan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	
	2.7	Tercapainya program meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah	2.7a	Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) TK	2.7a.1	Peningkatan kualitas program bantuan operasional TK	2.g	Jumlah siswa TK yang mendapatkan BOS Daerah	
	2.8	Terlaksananya penyelenggaraan dan pengembangan PAUD	2.8a	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.8a.1	Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu	2.h	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan PAUD	
	3	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	3.1	Terlaksananya pembinaan guru TK	3.1a	Pembinaan berkala Guru TK secara berjenjang dan sistematis	3.1a.1	Peningkatan kualitas pembinaan guru TK	3.a



4 Apresiasi seni, budaya dan olahraga siswa TK/PAUD	3.2 Terlaksananya bantuan Gugus TK (KKG)	3.2a Bantuan Gugus TK (KKG)	3.2a.1 Membangun kerjasama positif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal bantuan gugus TK Pembentukan Musyawarah Kerja Kepala TK dan penusunan program kerjanya	3.b Jumlah bantuan Gugus TK (KKG) yang diberikan
	3.3 Terlaksananya pembentukan musyawarah kerja kepala TK dan realisasi programnya	3.3a Mendorong dan mendukung secara finansial dan program	3.3a.1 Mendorong dan meningkatkan kreativitas guru TK melalui Pekan Olahraga dan Seni	3.c Jumlah pertemuan atau kegiatan yang dilaksanakan musyawarah kerja kepala TK
	3.4 Terlaksananya Porseri Guru TK	3.4a Lomba TK / Porseri TK Guru	3.4a.1 Mendorong dan meningkatkan kreativitas guru TK melalui Pekan Olahraga dan Seni	3.d Jumlah cabang dan bidang porseri yang dilombakan, serta jumlah pemenangnya
	3.5 Tercapainya pelatihan kompetisi tenaga pendidik PAUD	3.5a Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik PAUD	3.5a.1 Peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD	3.e Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang dilatih
	4.1 Terlaksananya Perayaan Hari Anak Nasional dan Gebyar Pengembangan PAUD	4.1a Kegiatan HAN dan Gebyar Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	4.1a.1 Meningkatkan kualitas perayaan Hari Anak Nasional	4.a Jumlah kegiatan dan peserta HAN serta Gebyar Pengembangan PAUD
	4.2 Terlaksananya Porseri Anak TK	4.2a Lomba TK / Porseri TK anak	4.2a.1 Mendorong dan meningkatkan kreativitas anak TK melalui Pekan Olahraga dan Seni	4.b Jumlah cabang dan bidang porseri yang dilombakan, serta jumlah pemenangnya
	4.3 Terpenuhinya Alat Permainan Edukatif anak-anak PAUD	4.3a Peningkatan kualitas Pengadaan APE PAUD PNF yang berbasis lokal/tradisional	4.3a.1 Memantapkan bahan- bahan lokal untuk APE	4.c Jumlah APE yang diadakan

II. PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

1	Pembarugnan dan rehabilitasi gedung SD dan SMP	1.1	Terpenuhinya ruang belajar, ruang pendukung, pagar dan atau gedung SD dan SMP	1.1a	Pembarugnan ruang kelas, ruang pendukung, pagar dan atau gedung SD dan SMP	1.1a.1	Jumlah ruang, pagar dan atau gedung SD dan SMP yang dibangun	1.a	Penyediaan subsidi dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah
		1.2	Terpenuhinya buku-buku perpustakaan	1.2a	Pengadaan buku-buk perpustakaan	1.2a.1	Jumlah buku perpustakaan yang diadakan	1.b	
		1.3	Terpenuhinya rehabilitasi ruang kelas dan ruang pendukung	1.3a	Rehabilitasi ruang kelas dan ruang pendukung SD-SMP	1.3a.1	Jumlah ruang kelas dan ruang pendukung yang direhabilitasi	1.c	Penyediaan dukungan terhadap pengembangan MBS dan keterlaksanaan akreditasi sekolah
2	Peningkatan mutu dan pelayanan SD-SMP	2.1	Tercapainya pengadaan alat praktik siswa, alat laboratorium, dan mebeleur sekolah	2.1a	Pengadaan alat praktik siswa, alat laboratorium, dan mebeleur sekolah	2.1a.1	Peningkatan kualitas pra sarana SD-SMP	2.a	Jumlah alat praktek, alat lab dan mebeleur yang diadakan
		2.2	Terpenuhinya pelaksanaan ujian pendidikan dasar 9 tahun	2.2a	Pelaksanaan ujian pendidikan dasar 9 tahun	2.2a.1	Peningkatan kualitas lulusan peserta didik Pendas	2.b	Jumlah siswa yang mengikuti ujian dan yang lulus ujian pendidikan dasar 9 tahun
		2.3	Terlaksananya akreditasi SD-SMP	2.3a	Penyelenggaraan Akreditasi SD-SMP	2.3a.1	Peningkatan kualitas akreditasi SD-SMP	2.c	Jumlah SD-SMP yang diakreditasi
		2.4	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SD-SMP	2.4a	Pelaksanaan Monitoring, Eivaluasi dan Pelaporan SD-SMP	2.4a.1	Peningkatan kualitas monev dan pelaporan SD-SMP	2.d	Jumlah program yang terlaksana dan semakin tingginya evaluasi dan pelaporen yang dilaksanakan

2.5	Tercapainya program meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah	2.5a	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat maupun BOSDA)	2.5a.1	Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelengkapan bagi sekolah/madrasah	2.e	Jumlah siswa SD-SMP yang mendapatkan BOS maupun BOSDA
2.6	Terpenuhinya penyelenggaraan Paket A dan Paket B	2.6a	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	2.6a.1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SMP	2.f	Jumlah orang tua yang mengikuti pelaksanaan Paket A dan Paket B
2.7	Terlaksananya Try Out SD dan SMP atau yang sederajat	2.7a	Try Out SD/MI dan SMP/MTs	2.7a.1	Jumlah siswa yang mengikuti Try Out SD dan SMP atau yang sederajat	2.g	Jumlah siswa yang mengikuti Try Out SD dan SMP atau yang sederajat
2.8	Terlaksananya pelaksanaan MBS di SD-SMP	2.8a	Tata kelola pendidikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman O2SN/FLS2N SD-SMP	2.8a.1	Peningkatan kualitas pelaksanaan MBS di SD-SMP	2.h	Jumlah SD-SMP yang telah melaksanakan MBS
2.9	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN/FLS2N SD-SMP	4.2a	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN/FLS2N SD-SMP	4.2a.1	Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik dan penjurangan bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar	2.i	Jumlah cabang olahraga, bidang seni dan pemenang O2SN/FLS2N SD-SMP
2.10	Terlaksananya LSS SD-SMP	4.3a	Lomba Sekolah Seirat (LSS) SD-SMP	4.3a.1	Peningkatan kualitas lomba LSS SD-SMP	2.j	Jumlah sekolah dan pemenang yang mengikuti LSS
2.11	Terlaksananya pemilihan siswa berprestasi SD-SMP	4.4a	Penghargaan bagi siswa berprestasi	4.4a.1	Peningkatan kualitas pemilihan siswa berprestasi	2.k	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan jumlah pemenang siswa berprestasi SD-SMP

3	Pelaksanaan SPM	3.1 Terlaksananya SPM dengan indikator yang telah ditetapkan	3.1a Pelaksanaan SPM pendidikan	3.1a.1 Pelaksanaan SPM secara bertahap dan bertanggung jawab	3.a Jumlah indikator SPM yang dapat dicapai (13 indikator satuan pendidikan dan 14 indikator kabupaten)
III. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL					
1	Pembarungan dan rehabilitasi ruang/gedung pendidikan Non formal beserta prasarananya	1.1 Terpenuhinya ruang belajar dan ruang pendukung lainnya	1.1a Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	1.1a.1 Peningkatan kualitas pengadaaan ruang belajar baru dan ruang pendukung lainnya	1.a Jumlah ruang dan atau gedung yang di bangun dan direhabilitasi
2	Peningkatan kualitas pendidikan Non Formal	2.1 Terpenuhinya bantuan operasional pendidikan Non formal	2.1a Pemberian Operasional Pendidikan Non Formal	2.1a.1 Selektivitas pemberian bantuan kepada pendidikan Non Formal	2.a Jumlah siswa dan lembaga yang mendapatkan bantuan operasional pendidikan
		2.2 Terpenuhinya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	2.2a Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	2.2a.1 Peningkatan pembinaan pendidikan Non Formal	2.b Jumlah kursus yang diberikan pembinaan
		2.3 Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan	2.3a Pengembangan pendidikan keaksaraan	2.3a.1	2.c Jumlah kelompok dan orang yang memperoleh pengembangan pendidikan keaksaraan
		2.4 Terwujudnya pengembangan pendidikan kecakapan hidup (SKB)	2.4a Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (SKB)	2.4a.1 Perluasan pendidikan kecakapan hidup di masyarakat	2.d Jumlah lembaga dan orang yang mendapatkan pendidikan kecakapan hidup
		2.5 Terpenuhinya pengembangan sertifikasi pendidikan Non formal	2.5a Pengembangan sertifikasi pendidikan Non formal	2.5a.1 Peningkatan akses dan pengembangan sertifikasi pendidikan	2.e Jumlah pendidik yang mendapatkan sertifikasi

	2.6 Terpenuhiinya publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal 2.7 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.8 Terlaksananya pembinaan kesetaraan Paket A, B dan C	2.6a Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal 2.7a Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.8a Pembinaan Kesetaraan Paket A, B dan C	2.6a.1 Peningkatan kampanye pendidikan Non Formal 2.7a.1 Pelaksanaan monev dan pelaporan secara berkala 2.8a.1 Peningkatan pembentukan kelompok belajar kesetaraan Paket A, B, dan C	2.f Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal yang dilaksanakan 2.g Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan 2.h Jumlah kelompok dan peserta yang mengikuti kesetaraan Paket A, B dan C
3 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	3.1 Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PNFI 3.2 Terwujudnya Jambore PTK PNF (Karya Tulis dan Olah Raga) SKB 3.3 Terlaksananya ujian Paket A dan B 3.4 Terpenuhiinya Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal 3.5 Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan Non formal 3.6 Terselenggaranya POR Paket A, B dan C	3.1a Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNFI 3.2a Jambore PTK PNF (Karya Tulis dan Olah Raga) SKB 3.3a Ujian Paket A dan B 3.4a Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal 3.5a Sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan non formal 3.6a POR Paket A, B dan C	3.1a.1 Peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan PTK PNFI 3.2a.1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Jambore PTK PNF 3.3a.1 Jumlah PTK yang terlibat dalam pelaksanaan ujian Paket A dan B 3.4a.1 Peningkatan kualitas Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non Formal 3.5a.1 Peningkatan kualitas sosialisasi ujian pendidikan Non Formal 3.6a.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan POR paket A dan B	3.a Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PNFI yang mengikuti pelatihan kompetensi 3.b Jumlah peserta dan pemenang Jambore PTK PNF 3.c Jumlah PTK yang terlibat dalam pelaksanaan ujian Paket A dan B 3.d Jumlah PTK yang mengikuti Bimtek penyusunan silabus pendidikan Non formal 3.e Jumlah PTK yang melaksanakan sosialisasi pelaksanaan ujian pendidikan Non formal 3.f Jumlah PTK yang mengikuti POR Paket A dan B

	3.7	Terpenuhinya data base PNFI	3.7a	Pembuatan Data Base pendidikan Non Formal dan informal	3.7a.1	Peningkatan kualitas data base PNFI	3.g	Jumlah FTK yang terlibat dalam pembuatan data base PNFI	
IV. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	1.1	Terlaksanannya sertifikasi Guru dan pengawas yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan faktual	1.1a	Mendata PNS atau guru honorer yang memiliki NUPTK dan minimal S-1 sesuai ijazah	1.1a.1	Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan nominasi dalam data dapodik	1.a	Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan nominasi dalam data dapodik
2	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	2.1	Guru yang memenuhi persyaratan untuk Pendidikan Lanjutan	2.1a	Memberi kesempatan yang terbuka kepada semua pendidik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi	2.1a.1	Jumlah Pendidik yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2.a	Jumlah Pendidik yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan
3	Pengawasan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.1	Meningkatkan disiplin dan kinerja Tenaga Kependidikan	3.1a	Peningkatan kualitas kontrol dan pengawasan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	3.1a.1	Jumlah Tenaga Kependidikan yang dikontrol dan diawasi	3.a	Jumlah Tenaga Kependidikan yang dikontrol dan diawasi
4	Bintek Penilaian Angka kredit dan Karya Tulis Ilmiah Bagi Tenaga Pendidikan	4.1	Pengawas yang terhambat dalam pengurusan kepegawaian dan golongan	4.1a	Kepala Sekolah dan guru yang mengikuti seleksi calon Pengawas	4.1a.1	Pengawas Sekolah yang belum atau dalam proses penulisan karya tulis ilmiah	4.a	Pengawas Sekolah yang belum atau dalam proses penulisan karya tulis ilmiah
5	Pengembangan Mutu dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	5.1	Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (SD-SMP)	5.1a	Kepala Sekolah mempersiapkan persyaratan yang diminta untuk penilaian kinerjanya	5.1a.1	Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah terakreditasi	5.a	Kepala Sekolah yang sekolahnya sudah terakreditasi

16

	G Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	2	Bantuan peningkatan prestasi	a	Selektif dan terseleksi dengan terbuka dan transparan	- Selektivitas dalam pemberian beasiswa dan reward untuk siswa yang berprestasi
		3	Bantuan afirmasi penduduk tidak mampu/daerah khusus	a	Selektif dan tepat sasaran dalam memberikan bantuan	- Pendataan on line status siswa dan sekolah yang bisa di akses oleh stakeholder
		1	Peningkatan ketersediaan ruang belajar dan ruang penunjang lainnya	a	Pendataan yang valid terhadap kondisi fisik sekolah	- Rehabilitasi sedang atau berat terhadap ruang kelas sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan gedung penunjang lainnya
		b	Pengisian DAPODIK yang jujur dan selalu di evaluasi secara rutin dan berkala			- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan ruang penunjang belajar lainnya
3	A Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	2	Peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM	a	Pelaksanaan SPM secara efektif dan efisien	
		1	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), diukur dengan proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%)	a		- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
						- Meningkatkan usia harapan hidup

RT

		2	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), diukur dengan proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (%)		- Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (%)		- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
		4	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)		- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Ibu (AKI)
	B Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Prevalensi HIV (%)		- Memperkuat upaya promotif dan preventif
		2	Prevalensi Tuberkulosis (%)		- Menurunkan kasus penyakit menular dan tidak menular
		3	Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%)		
		4	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)		
		5	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)		

Handwritten signature

C Meningkatnya Perlindungan Finansial	1 Penduduk yang menjadi peserta BPJS - kesehatan (%)		- Menggalakan Gerakan Masyarakat Sehat - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
	1 Memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	a Membangun rumah sakit yang representatif disertai kelengkapan tenaga medis dan peralatannya	- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
	2 Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	b Peningkatan pemahaman keluarga akan pentingnya imunisasi dan kesehatan bayi	- Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
	3 Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	c Tersedianya tenaga medis berkualitas untuk masyarakat	- Pemerataan sapras kesehatan di 9 kecamatan KKR
D Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Meningkatnya IPM KKR dari aspek kesehatan	a Peningkatan indikator IPM (kesehatan) masyarakat	- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		b Pelibatan dan pemberdayaan aktif masyarakat dalam promosi kesehatan (pencegahan dan pengobatan)	- Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan - Penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan
E Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			

4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	A Akses air minum dan sanitasi yang layak	1 Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi	a Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi	- Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan , perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
			b Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan	- Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan dari perencanaan, penganggaran, investasi dan pemeliharaan	
			c Rehabilitasi infrastruktur air minum dan sanitasi yang menua dan kena bencana	- Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di kabupaten, kecamatan dan desa	
			d Inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase	- Efektivitas dan efisiensi infrastruktur air minum dan sanitasi	
			e Penyehatan pengelolaan infrastruktur air minum, limbah, dan persampahan	- Peningkatan akses masyarakat berpendapat rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau	
			2 Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi	- Penyediaan saran dan prasarana serta utilitas yang memadai	

64

					- Diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah
				b Peningkatan kualitas rencana dan implementasi RI-SPAM dan SSK	
				c Integrasi peningkatan promosi higiene dan sanitasi dalam rangka demand generation	
				d Advokasi kepada stackholder	
		3 Peningkatan ketersediaan air baku	a Jaga air		
			b Simpan air		
			c Hemat air		
			d Bauran Air Domestik		
B Kawasan permukiman kumuh perkotaan	1 Fasilitas peningkatan kualitas hunian dan permukiman kumuh	a Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru dan berkualitas			- Penataan dan pembangunan sarana-prasarana pendukung di kawasan perumahan / permukiman kumuh secara bertahap

RT

		2	Diversifikasi Pangan (Jagung, Kedelai, dan Gula)	a	Penggunaan pangan lokal non beras	- Penguatan cadangan pangan dan stabilitas harga pangan
		3	Peningkatan Produksi Sumber Protein (Daging Sapi, dan Ikan)	a	Meningkatkan konsumsi protein seperti telur, ikan, daging, sayur dan buah	- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	B Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Irigasi	1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Permukaan, Air Tanah dan Rawa	a		-
		2	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Air Tanah dan Rawa			- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan
		3	Pembangunan Irigasi Tambak			
6	KEDAULATAN ENERGI	4	Pembangunan Waduk			
						- Percepatan dan penyederhanaan proses pengadaan tanah
						- Inventarisir aset daerah secara administrasi dan hukum

64

7 KEDAULATAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN	A Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim	1 Pemberantasan Tindakan Perikanan Ilegal	a Peningkatan penegakan hukum perikanan dan kelautan	- Pembenaan iklim ketenagakerjaan yang tidak memberatkan dunia usaha
		2 Meningkatkan Ketaatan Pelaku Perikanan	a Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum kepada stakeholder perikanan	- Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dan kelautan
		B Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	a	- Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda
				- Percepatan pengembangan ekonomi kelautan

C	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	1	Peningkatan Produksi Hasil Kelautan (seperti ikan, rumput laut, dan garam)	a	Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan produksi hasil kelautan	- Meningkatkan dan mempertahankan kualitas , daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
		2	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	a	Peningkatan pengadaan pelabuhan perikanan	- Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK kelautan
		3	Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Laut	a	Memperkuat ketahanan dan kelestarian kawasan konservasi laut	- Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir
8	PARIWISATA DAN INDUSTRI	A	Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1	Peningkatan devisa atau PAD	- Pemasaran pariwisata dengan pembangunan destinasiya
				2	Peningkatan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa lokal	- Pembangunan industri pariwisata dengan memperkuat kelembagaan pariwisata
				a	Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pendidikan/penyuluhan, pendanaan, dan kemudahan berusaha	
B	Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1	Memfaatkan potensi lokal dengan menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja	a	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha	- Pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan sumber daya alam

			b Pengembangan SDM, IPTEK, regulasi dan kebijakan	- Peningkatan daya saing dan produktivitas
NAWACITA III : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN				
9 PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN	A Penciptaan Lapangan Kerja	1 Penyediaan lapangan kerja	a Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas	- Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas
	B Peningkatan kualitas dan keterampilan Pekerja	1 Pelatihan kerja untuk mendapatkan sertifikasi	b Mendorong pengeluaran Penda dan penciptaan investasi yang padat karya	- Pengembangan ekonomi produktif
			a Peningkatan kompetensi dan keahlian kerja melalui pelatihan yang berstandar ISO dan bersertifikasi	- Peningkatan profesional pekerja dan pelaku usaha dalam menghadapi MEA
	C Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil	1 Diklat dan Pendampingan Usaha serta Subsidi KUR	a Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha	- Adanya perlindungan dan kepastian dalam berusaha
			b Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha	- Meningkatkan kualitas perizinan satu atap dan bebas pungli
			c Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro	- Meningkatkan kerjasama dengan pihak Bank, CU atau lembaga keuangan lainnya

Handwritten signature/initials in blue ink.

D Akses Terhadap Pelayanan Dasar	1 Kepemilikan Akte Lahir	a Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana	- Perluasan peningkatan pelayanan dasar
	2 Akses Perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan	b Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar	
E Perlindungan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	1 Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (Individu)	a Penataan asistensi sosial KIS, KIP, dan KKS	- Pendataan yang valid penduduk miskin dan rentan miskin
	2 Bantuan tunai bersyarat / PKH (Keluarga)	b Efektifitas program Bidik Misi	- Pemberian bantuan dan jaminan sosial / pendidikan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab
	3 Bantuan pendidikan / KIP (anak usia sekolah)	c Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat / PKH	- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan pedesaan/transmigrasi yang menuju klasterisasi permukiman
	4 Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)		
10 PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	A Pembangunan Perdesaan	1 Penurunan desa tertinggal	a Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi

RF

		b Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikordinir oleh pemerintah daerah	- Pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
	2 Pembangunan perkotaan	a Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, danlayak huni	- Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/pemukiman transmigrasi
		b Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	- Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan/transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota
			- Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparat pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan
			- Pengembangan kota cerdas yang bedaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

NAWACITA IV :

MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

11	KEPASTIAN DAN PENEKAGAKAN HUKUM	A	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat	1	Pembangunan kesadaran hukum yang berkualitas	a	Masyarakat menjadi pelopor utama kesadaran hukum	-	Penghormatan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia
		B	Memberikan tauladan dan sikap hidup sederhana dan bersahaja	2	Menumbuhkan perilaku hidup hemat dan tidak boros	b	Pelaksanaan hukum dan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu	-	Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
						a	Membiasakan diri melakukan penghematan biaya kegiatan dan operasional di kantor		
12	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	C	Mencegah dan melawan perilaku korupsi	3	Mengutamakan pencegahan dan meminimalisasi resiko kesalahan administrasi dan kebijakan	a	Setiap kegiatan wajib mengikuti juknis dan juklak yang telah ditentukan	-	Gerakan hidup hemat, bersahaja dan banyak bersedekah
		A	Membangun lingkungan masyarakat bersih dari	1	Birokrasi yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	a	Tes urine untuk deteksi dini kepada birokrasi yang menggunakan narkoba	-	Gerakan hidup sehat tanpa rokok, tanpa narkoba dan rutin berolahraga

NAWACITA I : MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERI RASA AMAN PADA

SELURUH WARGA NEGARA

<p>NAWACITA IX :</p> <p>13 POLITIK DAN DEMOKRASI</p>	<p>penyalahgunaan narkoba</p>		<p>b Penyuluhan dan pendampingan secara sistematis dan berkala kepada birokrasi mengenai bahaya laten narkoba</p>	<p>- Memberikan sanksi kepada birokrasi yang menggunakan bahkan pengedar narkoba sesuai aturan yang berlaku</p>
	<p>B Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme</p>	<p>1 Kondisi aman dan nyaman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara</p>	<p>a Memberikan akses dan informasi kepada birokrasi mengenai bahaya laten paham radikalisme dan ancaman terorisme</p>	<p>- Pendataan penduduk yang valid dan meningkatkan tali silaturahmi di masyarakat</p>
	<p>A Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil</p>	<p>1 Memperkuat hak-hak sipil dalam memilih dan dipilih</p>	<p>a Memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya</p>	<p>- Aspirasi masyarakat menggunakan hak pilih semakin meningkat</p>
		<p>2 Pelaksanaan demokrasi (pilkada, pilkades) dapat berjalan dengan aman dan jujur</p>	<p>a Pilkada dan Pilkades adalah proses memperkuat kebhinekaan dan memperkoko NKRI</p>	<p>- Membantu dan memperkuat pendanaan dalam pelaksanaan pilkada dan pilkades</p>
	<p>B Peningkatan efektivitas penanganan konflik dan kekerasan dalam masyarakat</p>	<p>1 Menghilangkan traumatis dan mencegah munculnya tindak kekerasan yang baru</p>	<p>a Komunikasi sosial dan toleransi (baik inter maupun antar agama)</p>	<p>- Meningkatkan komunikasi sosial</p>

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL

PK

NAWACITA II : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA					
14	TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI	A	Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan	1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel
		a	Memperthankan laporan keuangan Opini WTP dan Skor B LAKIP		- Meningkatkan disiplin birokrasi dan sanksi yang tegas
		B	Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Bimtek Pelaksanaan RB	1	Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien
		a	Meningkatkan kompetensi dan profesional birokrasi		- Meningkatkan sikap keteladanan birokrasi agar menjadi panutan masyarakat
C	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan			1	Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani
		a	Meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin percaya dengan birokrasi pemerintah		- Menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil
		b	Akses perizinan yang mudah dan sederhana tanpa pungli		- Deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan daerah dan pusat

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dan strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Nasional Pembangunan untuk memenuhi Nawa Cita. Nawa Cita merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni :

- (1). Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja ;
- (2). Tiga Dimensi Pembangunan ;
- (3). Kondisi Perlu ; serta
- (4). Quick wins dan program lanjutan lainnya.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2017. Pembuatan RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 harus sinkron dengan tiga dimensi tersebut. Dalam table 4.7 [table 4.7.a (Revolusi Mental), 4.7.b (Pendidikan), 4.7.c (Kesehatan), dan 4.7.d (Perumahan dan Permukiman)], dilanjutkan dengan table 4.8 (table 4.8.a (Kedaulatan Pangan), 4.8.b (Maritim dan Kelautan), 4.8.c (Kedaulatan Energi), dan 4.8.d (Pariwisata)] serta table 4.9 [(table 4.9.a (Antar kelompok Pendapatan) dan 4.9.b (Pemerataan desa dan Kota)] di bawah dijelaskan uraian strategi dan arah kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sektor-Sektor Unggulan dan Pemerataan-Kewilayahan yang terkait dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIAANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMELANGUNAN IMANUSIA

REVOLUSI MENTAL					
NO	KEGIATAN	SASAFIAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. MENINGKATKAN INTEGRITAS					
1	Melanjutkan reformasi birokrasi secara sistematis, terencana dan bertanggung jawab	1.1. Sikap dan tindakan PNS memberikan contoh positif kepada lingkungan sekitar 1.2. Persentase PNS yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan hukum	1.1.a Memberikan tauladan di lingkungan bekerja dan masyarakat 1.2.a Penegakan disiplin tanpa pandang bulu dan status	1.1.a.1 Reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa 1.2.a.2 Penerapan disiplin yang simpatik dan tegas dalam birokrasi	1.1.a Semakin banyaknya PNS yang menjadi contoh baik di masyarakat 1.1.b Turunnya jumlah PNS yang terkena sanksi disiplin dan pelanggaran hukum
2	Peningkatan mutu pelayanan publik	2.1. Pelayanan yang memuaskan dan tercapainya target yang diinginkan 2.2. Terlaksananya sikap/tindakan Tegas dan taat terhadap SOP yang dijalankan	2.1.a Bekerja dengan hati dan senyum dalam memberikan pelayanan publik 2.2.a Kualitas pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan pelayanan yang prima	2.1.a.1 Meningkatkan pelayanan publik dengan cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif 2.2.a.2 Peningkatan ketepatan dan kedisiplinan pelayanan publik berdasarkan SOP yang ada	2.1.a Publik sangat puas dengan pelayanan yang diberikan 2.1.b SOP yang pendek dan tidak berbelit-belit

3	Peningkatan pendidikan karakter di rumah dan sekolah	3.1 Efektivitas pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan	3.1.a Meningkatkan pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia	3.1.a.1 Pendidikan yang berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras)	3.a Peningkatan nilai-nilai karakter dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
4	Fokus pada prioritas pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan atas azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif	4.1 Belanja harus tepat sasaran dan kegunaannya sesuai prioritas yang telah ditetapkan 4.2 Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja Pemda	4.1.a Belanja berdasarkan prioritas program 4.2.a Semua belanja Pemda harus dipertanggungjawabkan	4.1.a.1 Memprioritaskan program layanan dasar, pembangunan manusia dan masyarakat, sektor-sektor unggulan dan kewilayahan 4.2.a.2 Membangun perencanaan yang sinergis dengan kemampuan belanja dan pendapatan daerah	4.a Pelaksanaan prioritas lebih tersepat dan berhasil dilaksanakan sesuai perencanaan awal 4.b Semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berjalan
5	Harmonisasi dan simplifikasi perda dan aturan lainnya untuk mendorong kreativitas masyarakat	5.1 Kualitas perda yang dikeluarkan dan penurunan kuantitas perda dan aturan lainnya 5.2 Memaksimalkan pelaksanaan perda yang ada	5.1.a Sosialisasi perda secara efektif dan efisien 5.2.a Penurunan jumlah/kuantitas perda tiap tahunnya	5.1.a.1 Peningkatan kualitas pembuatan Perda 5.2.a.2 Pemda menyesuaikan dengan Perda-perda yang dibatalkan dan jangan sampai melanggar peraturan yang ada di atasnya	5.a Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perda yang ada 5.b Semakin efektif dan efisienya kepatuhan masyarakat terhadap perda yang diberlakukan

6	Peningkatan peran lembaga dan media dalam pembangunan karakter bangsa	6.1 Terlaksananya kerjasama dengan lembaga dan media dalam mengkampanyekan contoh-contoh perilaku dan perbuatan yang terpuji	6.1a Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan media dalam kerangka memberikan tonjolan dan bacaan yang positif kepada masyarakat	6.1a.1 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan media dalam mengkampanyekan karakter positif dalam kehidupan	6.a Semakin meningkatnya tontonan dan bacaan yang positif dalam mengubah atau mempengaruhi pembaca atau publik
		6.2 Terpenuhinya kelambagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan yang kuat	6.2a Meningkatkan kerjasama antara eksekutif dan yudikatif secara komprehensif	6.2a.1 Perkuat kelambagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan	6.b Semakin erat dan kokohnya koordinasi antar lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing
		6.3 Terwujudnya pelaksanaan tupoksi lembaga-lembaga dan perannya di masyarakat	6.3a Saling memperkuat fungsi dan tugas masing-masing kelembagaan	6.3a.1 Menata dan mereformasi tupoksi kelenbagaan	6.c Semakin kuat dan membawanya lembaga-lembaga yang ada
7	Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat	7.1 Terselenggaranya kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi lembaga peradilan	7.1a Meningkatkan sosialisasi akan sadar hukum di masyarakat	7.1a.1 Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi lembaga peradilan	7.a Semakin meningkatnya disiplin dan pelaksanaan hukum oleh aparat pemerintah dan penegak hukum
		7.2 Terwujudnya integritas aparat hukum dalam menjalankan tugasnya	7.2a Meningkatkan kepercayaan lembaga yudikatif melalui tauladan SDM nya	7.2a.2 Peningkatan integritas aparat hukum dalam menjalankan tugasnya	7.b Semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum

8	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dan memilih sebagai	8.1 Terselenggaranya Pendidikan dan penghormatan politik di masyarakat	8.1.a Meningkatkan semangat bhinneka tunggal ika dalam kerangka persatuan dan kesatuan	8.1.a.1 Pendidikan dan penghormatan politik di masyarakat	8.a Semakin rendahnya atau hilangnya pepecahan atau konflik horisontal di masyarakat
		8.2 Terpenuhinya Kesadaran perempuan-perempuan akan hak politiknya	8.2.a Meningkatkan peran perempuan dalam berpolitik praktis	8.2.a.2 Peningkatan hak-hak politik perempuan dalam berbangsa dan bernegara	8.b Semakin tingginya penggunaan hak politik perempuan
II. MENINGKATKAN ETOS KERJA					
1	Peningkatan semangat kerja keras, kreatif dan profesional	1.1 Terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan hati dan profesional	1.1.a Membangun suasana kerja yang mampu meningkatkan etos kerja	1.1.a.1 Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan hati dan profesional	1.a Semakin meningkatnya loyalitas terhadap organisasi
		1.2 Terpenuhinya anak bangsa dalam rangka menyebarkan 'virus' interpreneur	1.2.a Memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk kreatif dan menghasilkan karya	1.2.a.2 Pemantapan nilai-nilai inovasi dan interpreneur	1.b Semakin meningkatnya anak bangsa berkarya dan tidak tergantung dengan pemerintah daerah
2	Percaya diri dan selalu bangga pada karya anak bangsa	2.1 Terwujudnya produktivitas dan daya saing masyarakat	2.1.a Meningkatkan dan memotivasi masyarakat untuk percaya diri dalam berkarya	2.1.a.1 Memacu produktivitas dan daya saing masyarakat	2.a Semakin meningkatnya produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa
		2.2 Terwujudnya Masyarakat tidak konsumerisasi dan pelaku usaha kecil	2.2.a Meningkatkan budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi	2.2.a.2 Peningkatan nilai-nilai hidup hemat dan bersahaja serta sikap memanfaatkan potensi-potensi yang produktif	2.b Menekan kebiasaan konsumsi yang berlebihan dan tekun menghasilkan barang dan jasa

3	Meningkatkan perilaku kerja sehat dan selamat di tempat kerja	3.1 Tercapainya keselamatan dan keamanan bekerja di kantor 3.2 Tercapainya tempat kerja yang menyenangkan dan mendukung mobilisasi kerja	3.1.a Menjalankan semua SOP yang berlaku di kantor 3.2.a Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di tempat bekerja	3.1.a.1 Meningkatkan keselamatan dan keamanan bekerja di kantor 3.2.a.2 Membangun suasana tempat kerja yang menyenangkan dan mendukung mobilisasi kerja	3.a Semakin tingginya tingkat keselamatan bekerja di kantor 3.b Semakin meningkatkan kebiasaan yang bersih di tempat kerja
4	Peningkatan kontribusi produk daerah dalam konsumsi rumah tangga	4.1 Terwujudnya sikap Mencintai dan bangga produk dalam negeri	4.1.a Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dari kesadaran produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri	4.1.a.1 Terwujudnya sikap Mencintai dan bangga produk dalam negeri	4.a Semakin meningkatnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
		4.2 Terlaksananya sikap senang dan bangga masyarakat menggunakan barang-barang produksi anak bangsa	4.2.a Menggunakan barang-barang hasil karya bangsa sendiri	4.2.a.2 Mengajak dan meneladani masyarakat menggunakan barang-barang produksi anak bangsa	4.b Semakin tingginya masyarakat membeli dan memanfaatkan barang-barang yang berasal dari dalam negeri
5	Meningkatkan karya cipta dan inovasi yang siap bersaing dengan daerah bahkan negara lain	5.1 Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berbudaya yang memacu daya cipta dan daya saing 5.2 Terwujudnya budaya inovasi di masyarakat	5.1.a Terbangun budaya swadesi Do It Yourself (DIY) 5.2.a Membangun suasana yang kondusif dalam mendukung kreativitas dan inovasi	5.1.a.1 Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan berbudaya yang memacu daya cipta dan daya saing 5.2.a.2 Meningkatkan budaya inovasi di masyarakat	5.a Peningkatan kemandirian ekonomi lokal dan daya saing 5.b Semakin banyak dan berkualitas inovasi-inovasi yang dibuat masyarakat

6	Membangun semangat berkompetis sehat dalam berkarya	6.1 Terwujudnya nilai-nilai berkompetisi wirausaha dalam berkompetisi	6.1.a Membangun dan mendukung suasana berkompetisi yang sehat dalam berkarya	6.1.a.1 Meningkatkan nilai-nilai berkompetisi wirausaha dalam berkompetisi	6.a Jumlah wirausaha yang dihasilkan
		6.2 Tarbangunnya motivasi dan reisa optimis dalam berusaha	6.2.a Mengatur persaingan usaha dengan perda dan aturan pendukung lainnya	6.2.a.2 Meningkatkan motivasi dan rasa optimis dalam berusaha	6.b Semakin meningkatnya kemandirian dan pantang menyerah dari sikap pelaku usaha
7	Meningkatkan persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete) dan bekerja berorientasi pada hasil yang bermutu dan nilai tambah	7.1 Terlaksananya persaingan usaha yang dinamis dan sehat	7.1.a Mengatur persaingan usaha dengan perda dan aturan pendukung lainnya	7.1.a.1 Peningkatan persaingan usaha yang dinamis dan sehat	7.a Jumlah konflik atau sengketa dalam berusaha menurun
		7.2 Tercapainya pelaksanaan nilai-nilai positif dalam menghasilkan nilai tambah	7.2.a Menerapkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam menghasilkan nilai tambah suatu produk barang dan jasa	7.2.a.2 Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai positif dalam menghasilkan nilai tambah	7.b Jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari produk atau jasa yang dihasilkan
III. MENINGKATKAN GOTONG ROYONG					
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	1.1 Meningkatkan toleransi, gotong royong dan rasa aman masyarakat	1.1.a Mengaktifkan kembali kerja bakti rutin di lingkungan tempat tinggal	1.1.a.1 Membangun nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan	1.a Semakin tingginya kesadaran Masyarakat yang hidup bertetangga
		1.2 Lingkungan atau kompleks perumahan	1.2.a Mengaktifkan kembali ronda malam di sekitar rumah	1.2.a.2 Memantapkan nilai-nilai rasa saling percaya dan menjaga rasa aman di lingkungan tempat tinggal	1.b Semakin menurunnya tindakan kriminal di lingkungan sekitar tempat tinggal

2	Menurunnya angka perceraian dan anak telantar	2.1 Keluarga yang rentan dalam perceraian atau brokenhome	2.1.a Meningkatkan kualitas dan kuantitas pertemuan dengan keluarga	2.1.a.1 Membangun nilai-nilai rumah tangga yang sakina, mawaddah dan arrahmah	2.a Semakin meningkatnya indeks ketahanan keluarga
		2.2 Anak-anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian dari keluarga atau lingkungan	2.2.a Menebarkan kasih sayang dalam keluarga dan pergaulan	2.2.a.2 Memantapkan nilai-nilai kasih sayang dalam keluarga terutama terhadap anak-anak	2.b Semakin tingginya perhatian terhadap anak-anak yang terlantar atau kurang mendapat perhatian keluarga dan lingkungan
3	Peneguhan jati diri sebagai anak bangsa dengan jiwa patriot dan cinta damai	3.1 Menurunnya jumlah konflik karena SARA	3.1.a Meningkatkan toleransi bermasyarakat	3.1.a.1 Meningkatkan kesadaran atas perbedaan SARA sebagai fitrah dari Sang Pencipta	3.a Semakin rendahnya konflik horizontal di masyarakat karena SARA
		3.2 Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap remaja dan pemuda	3.2.a Melaksanakan kegiatan yang memotivasi rasa nasionalisme dan patriotisme remaja dan pemuda	3.2.a.2 Pemantapan nilai-nilai kebangsaan terhadap remaja dan pemuda	3.b Semakin tinggi kesadaran remaja akan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme
4	Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan	4.1 Terwujudnya daya tangkal masyarakat dan lingkungan dari pengaruh kekerasan, radikalisme, terorisme, pornografi dan kebencian	4.1.a Proses rekrutmen siswa secara terbuka dan transparan	4.1.a.1 Peningkatan daya tangkal masyarakat dan lingkungan dari pengaruh kekerasan, radikalisme, terorisme, pornografi dan kebencian	4.a Semakin meningkatnya kepercayaan diri peserta didik baru untuk bersekolah di lingkungan yang bebas kekerasan dan intimidasi
		4.2 Terselenggaranya pengawasan dan kontrol kegiatan siswa di internal sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah	4.2.a Kontrol sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah	4.2.a.2 Peningkatan pengawasan dan kontrol kegiatan siswa di internal sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah	4.b Semakin meningkatnya kenyamanan siswa dalam bergaul di sekolah dan sekitarnya

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017**

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIA NYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDIDIKAN					
NO	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					
1	Pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan TK	1.1 Terpenunjinya ruang belajar TK Pembina	1.1a Pembangunan Gedung Tk Pembina	1.1a.1 Peningkatan kualitas pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan TK	1.a Jumlah TK Pembina yang akan di bangun
		1.2 Terpenunjinya ruang belajar PAUD Non Formal	1.2a Pembangunan Gedung PAUD Non Formal	1.2a.1 Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana PAUD Non Formal yang merata dan berkeadilan di setiap desa	1.b Jumlah gedung PAUD yang dibangun
		1.3 Terpenunjinya rehabilitasi gedung PAUD PNF	1.3a Rehabilitasi Gedung PAUD PNF	1.3a.1 Mendukung pemenuhan standar mutu dan keterlaksanaan akreditasi lembaga PAUD	1.c Jumlah PAUD Non Formal yang akan di rehabilitasi
2	Peningkatan mutu dan pelayanan PAUD dan TK	2.1 Terpenunjinya alat praktik siswa dan alat bermain anak	2.1a Pengadaan alat praktik siswa dan alat bermain anak	2.1a.1 Peningkatan kualitas pengadaan alat praktik dan alat bermain anak	2.a Jumlah alat praktik siswa dan alat bermain anak
		2.2 Terpenunjinya meubeler sekolah	2.2a Pengadaan meubeler sekolah	2.2a.1 Pengadaan meubeler sekolah yang berkualitas	2.b Jumlah mebeleur sekolah yang diadakan
		2.3 Terlaksananya akreditasi PAUD Non formal	2.3a Akreditasi Lembaga PAUD Non formal	2.3a.1 Peningkatan kualitas PAUD yang diakreditasi	2.c Jumlah PAUD Non formal yang di akreditasi

6	Pendidikan dan Pelatihan Menulis Buku Non Fiksi Bagi Guru SD dan SMP	6.1	Guru SD dan SMP	6.1a	Diklat yang melibatkan penulis buku eksternal dan bekerjasama dengan Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	6.1a.1	Minimal 100 guru SD dan SMP yang ikut Diklat	6.a	Minimal 100 guru SD dan SMP yang ikut Diklat
7	Pelatihan Pengawas Sekolah	7.1	Pengawas Sekolah Pendas	7.1a	Syarat wajib untuk pengawas dalam melaksanakan tugasnya	7.1a.1	Jumlah Pengawas Sekolah yang ikut pelatihan	7.a	Jumlah Pengawas Sekolah yang ikut pelatihan
8	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operator Dapodik	8.1	Tenaga Operator Dapodik yang jujur dan berintegritas	8.1a	Pengadaan Diklat Tenaga Operator Dapodik secara rutin setiap tahun	8.1a.1	minimal 1 tenaga operator dapodik yang dilatih	8.a	minimal 1 tenaga operator dapodik yang dilatih
9	Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Daerah Terpencil	9.1	Guru dan Pengawas di daerah terpencil	9.1a	Memperketat kontrol kewajiban guru dan pengawas untuk mendapatkan tunjangan	9.1a.1	Jumlah guru dan pengawas yang mendapat tunjangan daerah terpencil	9.a	Jumlah guru dan pengawas yang mendapat tunjangan daerah terpencil
10	Bimtek Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah Bagi Pendidikan	10.1	Guru mata pelajaran yang di ujikan di sekolah	10.1a	Dipilih guru yang cakap dan berkompetensi tinggi untuk mengikuti Bimtek	10.1a.1	Tersusunnya Bank Soal untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah	10.a	Tersusunnya Bank Soal untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah
11	PCR Guru Nasional	11.1	Guru yang mempunyai kemampuan dan kompetensi olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan dalam POR Guru Nasional	11.1a	Konsolidasi internal guru dalam menghadapi POR Guru Nasional	11.1a.1	Juara Umum Tingkat Propinsi Kalimantan Barat	11.a	Juara Umum Tingkat Propinsi Kalimantan Barat
12	OSN Guru	12.1	Guru yang berprestasi di bidang sains dan teknologi	12.1a	Diberi latihan dan dikaranilina minimal sebulan oleh instruktur yang berpengalaman di bidang sains dan	12.1a.1	Juara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	12.a	Juara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

13	Pelaksanaan PCRSENI Mahasiswa Kubu Raya	13.1 Mahasiswa Universitas Terbuka	13.1e Koordinasi dan konsolidasi mahasiswa UT untuk menghadapi PORSENI	13.1a.1 Juara umum Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	13.a Juara umum Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
14	Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.1 Sekolah dan Tenaga Pendidik	14.1e Peningkatan kualitas penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.1a.1 Tercapainya Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah	14.a Tercapainya Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Evaluasi Diri Sekolah
15	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSENI Guru Nasional	15.1 Guru yang berprestasi di bidang olahraga dan seni	15.1e Seleksi yang ketat dan terbuka kepada guru yang mengikuti PORSENI Guru Nasional	15.1a.1 Jumlah juara yang diperoleh dalam PORSENI Guru Nasional	15.a Jumlah juara yang diperoleh dalam PORSENI Guru Nasional
16	Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.1 Pendidik dan Tenaga Pendidik yang masih kecil Angka Kreditnya	16.1e Peningkatan penyelesaian administrasi persyaratan Penilaian Angka Kredit	16.1a.1 Terpuhinya Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.a Terpuhinya Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17	Pendidikan dan Pelatihan Guru Kesenian	19.1 Guru Kesenian SD-SMP yang berlatar belakang kompetensi kesenian	19.1e Pelaksanaan Diklat Guru Kesenian yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan akar budaya dan seni lokal	19.1a.1 Jumlah Guru Kesenian yang mengikuti Diklat	17.a Jumlah Guru Kesenian yang mengikuti Diklat
18	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah	20.1 Kepala Sekolah yang baru di lantik	20.1e Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	20.1a.1 Terpuhinya pelaksanaan MBS di sekolah	18.a Terpuhinya pelaksanaan MBS di sekolah

19	Pendidikan dan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP	21.1 Guru SD-SMP	21.1e Diklat Tindakan Kelas yang berkala dan sistematis	21.1a.1 Jumlah guru SD-SMP yang melaksanakan Diklat Tindakan Kelas	19.a Jumlah guru SD-SMP yang melaksanakan Diklat Tindakan Kelas
20	Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Bagi Guru SD dan SMP	22.1 Guru SD-SMP selaku pembina dan Pelatih Pramuka di SD-SMP	22.1e Diklat Kepramukaan terpadu untuk guru SD-SMP	22.1a.1 Terpenuhnya jumlah pembina dan pelatih pramuka di SD-SMP	20.a Terpenuhnya jumlah pembina dan pelatih pramuka di SD-SMP

V. MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	1.1 Terwujudnya SD dan SMP yang mendapatkan bantuan DAK	1.1a Pelaksanaan DAK Pendas harus mengikuti semua juknis yang berlaku pada tahun pelaksanaannya	1.1a.1 Peningkatan sarana dan prasarana SD-SMP yang berkualitas dari APBN melalui DAK	1.a Jumlah SD-SMP yang mendapatkan DAK fisik dan mutu sesuai aturan yang berlaku
2	Verifikasi Bantuan Sosial/Hibah	2.1 Terwujudnya bantuan hibah dan bansos untuk SD-SMP	2.1a Memperhatikan peraturan baru tentang hibah dan bansos	2.1a.1 Peningkatan bantuan hibah dan bansos pendidikan	2.a Jumlah hibah dan bansos yang diberikan
3	Pelaksanaan Operasional Sekolah	3.1 Terwujudnya Semua siswa SD-SMP yang bersekolah gratis	3.1a Peningkatan Sosialisasi dan pendataan siswa yang teratur di Dapodik	3.1a.1 Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab	3.a Jumlah siswa yang terdaftar dalam Dapodik
4	Penyediaan Buku Raport Siswa	4.1 Terlaksananya penyediaan Buku Raport Siswa untuk Pendas	4.1a Peningkatan kualitas pengadain raport siswa secara transparan dan terbuka	4.1a.1 Laporan kemajuan akademik dan non akademik siswa	4.a Jumlah raport yang diceetak untuk siswa SD-SMP
5	Pembinaan Forum Komite Sekolah Kecamatan	5.1 Terselenggaranya Pembinaan Forum Komite Sekolah Kecamatan	5.1a Peningkatan pembinaan Komite Sekolah di setiap Kecamatan	5.1a.1 Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua stakeholder di sekolah	5.a Jumlah Komite Sekolah yang mendapatkan pembinaan
6	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendidikan	6.1 Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pendidikan	6.1a Peningkatan koordinasi dan konsolidasi organisasi dan program	6.1a.1 Konsolidasi organisasi dan program pendidikan	6.a Jumlah Faktor dengan Stakeholder Pendidikan minimal sekali dalam satu

			pendidikan		semester
7 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi	7.1 Semua Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas yang memenuhi persyaratan	7.1a Sosialisasi dan proses pemilihan yang jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik	7.1a.1 Peningkatan selektivitas pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi	7.a Terpilihnya Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas (minimal salah satunya) berprestasi dari Kabupaten Kubu Raya	
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (evaluasi terpadu)	8.1 Semua kegiatan yang dibiayai daerah, negara maupun partisipasi masyarakat	8.1a Perencanaan dan pelaksanaan yang wajib diukur setiap semester	8.1a.1 Peningkatan Monev dan pelaporan kegiatan, terutama bansos dan hibah	8.a Jumlah kegiatan yang di monev dan membuat laporan	
9 Pembuatan Profil Pendidikan	9.1 Terwujudnya pembuatan Profil Sekolah untuk SD-SMP, UPT, SKB, serta lembaga pendidikan lainnya	9.1a Memasukkan isu-isu strategis pendidikan yang terkini dan strategis	9.1a.1 Peningkatan kualitas buku Profil Pendidikan	9.a Jumlah Profil Pendidikan yang dicetak	
10 Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	10.1 Sekolah yang belum mendapatkan akreditasi sekolah dan atau sekolah yang mau meningkatkan akreditasi sekolah	10.1a Mendorong dan membantu sekolah-sekolah dalam kesiapan administrasi dan non administrasi sekolah	10.1a.1 Pelaksanaan Akreditasi SD-SMP	10.a Jumlah sekolah yang diakreditasi	
11 Pelatihan Tenaga Operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas	11.1 Tenaga operator yang profesional dan bertanggung jawab	11.1a Peningkatan mutu pelatihan secara sistematis minimal setahun sekali	11.1a.1 Peningkatan kemampuan operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas	11.a Jumlah tenaga operator NISN, Padati WEB dan Teknisi Jardiknas yang mendapatkan pelatihan	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDINYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN NASIONAL

KESEHATAN					
NO	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN					
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.1 Terpenuhiya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.1a Peningkatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1.1a1 Peningkatan kualitas obat dan perbekalan kesehatan dan gartis	1.a Jumlah obat dan perbekalan yang tersedia
2	Pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1 Terpenuhinya pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1a Peningkatan pelatihan pemanfaatan TOGA serta pemberdayaan BATRA	2.1a1 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2.a Terlaksananya pelatihan pemanfaatan TOGA dan BATRA
3	Peningkatan pengawasan sarana distribusi obat dan perbekalan kesehatan	3.1 Tercapainya pengawasan distribusi obat dan perbekalan kesehatan	3.1a Pengawasan yang komprehensif dan penegakan hukum atas pidana distribusi dan pemanfaatan obat-obatan	3.1a1 Menurunkan dan mengendalikan jumlah penyakit yang disebabkan faktor lingkungan	3.a Tercapainya pengawasan distribusi obat dan perbekalan kesehatan
II. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1.1 Masyarakat yang tidak terbiasa atau takut dengan tenaga medis	1.1a Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	1.1a.1 Pemberdayaan masyarakat menuju keluarga sadar gizi	1.a Jumlah orang sakit yang dapat diatasi/diobati

2	Peningkatan kesehatan masyarakat	2.1	Tercapainya pola hidup sehat masyarakat	2.1a	Memberikan teladan secara kolektif kepada masyarakat pentingnya pola hidup sehat dan bersih	2.1a.1	Memenuhi kebutuhan obat, mengawasi keamanan obat dan makanan serta pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan pemberdayaan pengobat tradisional (BATRA)	2.a	Jumlah rujukan masyarakat ke puskesmas terdekat
3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	3.1	Terpenuhinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	3.1a	Peningkatan koordinasi program dalam pencapaian tujuan	3.1a.1	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	3.a	Jumlah tenaga medis yang proaktif melayani masyarakat
4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	4.1	Masyarakat miskin dan jauh dari akses kesehatan	4.1a	Memberikan kemudahan dan akses BPJS kesehatan	4.1a.1	Memenuhi akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	4.a	Jumlah masyarakat yang mendapatkan BPJS kesehatan
5	Penyelenggaraan penyesuaian lingkungan	5.1	Terpenuhinya lingkungan yang sehat dan menyenangkan	5.1a	Menjadikan beberapa rumah/kepala keluarga sebagai pelopor kesehatan	5.1a.1	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu	5.a	Jumlah rumah yang dilibatkan sebagai pelopor kesehatan lingkungan
6	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	6.1	Kegiatan prioritas dan terkait langsung dengan pelayanan publik	6.1a	Monev dengan melibatkan stakeholder	6.1a.1	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita	6.a	Jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

III. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1.1	Terpenuhinya rasa aman masyarakat belanja di Warung, toko, mall yang menjual makanan dan minuman kemasan	1.1a	Pengawasan yang berkala dan berkeutias dalam pengamanan makana dan minuman yang bereadr di pasaran	1.1a1	Meningkatkan upaya pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.a	Jumlah makanan dan minuman yang aman dari bahan berbahaya yang beredar di masyarakat
2	Sosialisasi program BPJS kesehatan untuk warga	2.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang murah dan gratis	2.1a	Pendataan peserta BPJS dengan valid dan jujur	2.1a1	Peningkatan dan perluasan akses BPJS kesehatan	2.a	Jumlah peserta BPJS kesehatan
3	Bimbingan teknis penggunaan obat dengan metode CBIa	3.1	Terpenuhinya bimbingan teknis penggunaan obat dengan metode CBIa	3.1a	Peningkatan bimbingan teknis penggunaan obat dengan metode CBIa	3.1a1	Menurunkan jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3i)	3.a	Jumlah ibu menjadi bagian dari Cara Belajar Insan Aktif

IV. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	1.1	Terwujudnya Masyarakat Kubu Raya yang sadar akan kesehatan	1.1a	Peningkatan kampanye dan kegiatan yang mendukung sadar hidup sehat	1.1a.1	Meningkatkan peran media dalam memberikan informasi pentingnya sadar hidup sehat	1.a	Terpenuhinya informasi strategis dan valid tentang sadar hidup sehat
2	Peningkatan kompetensi tenaga penyuluhan kesehatan	2.1	Tersedianya tenaga penyuluhan yang lulus administrasi dan persyaratan	2.1a	Memberikan kesempatan dan beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga penyuluhan kesehatan	2.1a.1	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan	2.a	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang mendapat beasiswa pendidikan lanjut
3	Pembinaan UKBM	3.1	Terwujudnya UKBM yang baru atau belum berpengalaman menjadi berkualitas	3.1a	Peningkatan kualitas pembinaan UKBM	3.1a.1	Peningkatan pembinaan UKBM	3.a	Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam UKBM

4	Reorientasi bidang desa terhadap percepatan desa siaga	4.1	Terutama dusun-dusun di daerah yang sulit akses transportasi	4.1a	Rekrutimen bidang honor maupun PNS dalam menambah SDM untuk ditempatkan di dusun-dusun	4.1a.1	Peningkatan peran bidang desa di dusun	4.a	Jumlah bidang siaga di 401 dusun
V. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT									
1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	1.1	Terselenggaranya perbaikan gizi masyarakat	1.1a	Peningkatan penggunaan data primer dan menjalin komunikasi efektif dengan warga	1.1a.1	Peningkatan gizi masyarakat	1.a	Jumlah masyarakat kurang gizi
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.1	Terperuhnya tambahan makanan dan vitamin untuk Ibu hamil KEK, balita kurus	2.1a	Peningkatan pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.1a.1	Peningkatan vitamin untuk ibu hamil dan balita	2.a	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurus yang kurang makanan tambahan dan vitamin
3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	3.1	Terwujudnya Ibu hamil, Balita gizi buruk, remaja putri dari bahaya KEP dan GAKY	3.1a	Peningkatan penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY	3.1a.1	Peningkatan kesadaran akan KEP dan GAKY	3.a	Jumlah ibu hamil, balita dan remaja putri yang terkena KEP, GAKY, dan anemia gizi besi
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1	Terperuhnya KK untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1a	Peningkatan pemberdayaan KK untuk pencapaian keluarga sadar gizi	4.1a.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan sadar gizi	4.a	Jumlah KK yang sadar gizi

RV

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1.1	Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat	1.1a	Fokus pada pengkajian isu-isu strategis kesehatan di lingkungan sekitar	1.1a.1	Peningkatan kualitas pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1.a	Jumlah kajian yang dilakukan
2	Penyuluhan dalam menciptakan lingkungan sehat	2.1	Terwujudnya lingkungan yang sehat	2.1a	Prioritas pada penyuluhan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan	2.1a.1	Peningkatan penyuluhan dalam menciptakan lingkungan sehat	2.a	Jumlah penyuluhan yang dilakukan
3	Bimbingan teknis Program Penyakit Berbasis Binatang (P2B2)	3.1	Terwujudnya masyarakat terbebas dari penyakit yang disebabkan hewan/binatang	3.1a	Pelaksanaan bimbingan teknis P2B2 secara terpadu	3.1a.1	Peningkatan pengetahuan P2B2	3.a	Jumlah penyakit yang disebabkan hewan/binatang yang ditemukan
4	Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	4.1	Terwujudnya Sanitasi Berbasis Masyarakat yang sehat	4.1a	Pelaksanaan STBM secara terpadu	4.1a.1	Peningkatan STBM	4.a	Jumlah Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diadakan

VII. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1.1	Terwujudnya lingkungan yang bebas dari penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk	1.1a	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk secara berkala dan merata	1.1a.1	Peningkatan kualitas penyemprotan sarang nyamuk	1.a	Jumlah orang yang terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk
2	Pelayanan vaksinasi kepada masyarakat	2.1	Terwujudnya pencegahan dan kekebalan dari penyakit	2.1a	Peningkatan kualitas dan keamanan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat	2.1a.1	Peningkatan kualitas dan keamanan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat	2.a	Jumlah balita dan anak yang diberikan vaksinasi

3	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.1 Terwujudnya masyarakat terbebas dari penyakit menular	3.1a Pelayanan dan penanganan yang cepat dan tepat dalam mengatasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.1a.1 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.a Jumlah orang yang terkena penyakit menular
4	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1 Terselenggaranya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1a Fokus kepada akar permasalahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.1a.1 Peningkatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	4.a Jumlah orang yang terkena penyakit endemik/epidemik
5	Peningkatan imunisasi	5.1 Terwujudnya kekebalan dan perkembangan pada bayi dan batita	5.1a Peningkatan kualitas dan keamanan imunisasi kepada bayi dan batita	5.1a.1 Pemberian imunisasi berkala dan tepat waktu kepada bayi dan batita	5.a Jumlah bayi dan batita yang diberikan imunisasi
6	Penanggulangan penyakit tidak menular	6.1 Terselenggaranya penanggulangan penyakit tidak menular	6.1a Fokus pada penanggulangan penyakit tidak menular yang meresahkan masyarakat	6.1a.1 Peningkatan penanggulangan penyakit tidak menular	6.a Penanggulangan penyakit tidak menular
7	Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1 Terlaksananya pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1a Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.1a.1 Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria	7.a Pelaksanaan pengobatan pencegahan massal/POPM malaria
VIII. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN					
1	Jaminan kesehatan penduduk miskin	1.1 Jumlah penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan kesehatan	1.1a Penduduk miskin yang terdata di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	1.1a.1 Peningkatan jaminan kesehatan penduduk miskin	1.a Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan

2	Jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)	2.1 Terpenuhihinya jaminan kesehatan masyarakat miskin	2.1a Peningkatan akses untuk mendapatkan JAMKESNAS	2.1a.1 Memperkuat sistem penanganan JAMKESNAS	2.a Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan JAMKESNAS
3	Rapat koordinasi program BPJS	3.1 Terpenuhihinya program BPJS kepada masyarakat	3.1a Konsolidasi stakeholder program BPJS	3.1a.1 Meningkatkan konsolidasi BPJS dengan pemerintah daerah	3.a Jumlah peserta program BPJS
4	Sosialisasi program SJSN	4.1 Tercapainya program SJSN sesuai dengan rencana yang dibuat	4.1a Peningkatan program SJSN kepada masyarakat	4.1a.1 Kampanye sistematis dan terstruktur program SJSN	4.a Jumlah peserta program SJSN
5	Pelayanan kapitasi pusat kesehatan masyarakat	5.1 Terlaksananya kapitasi puskesmas	5.1a Peningkatan akses pelayanan kapitasi puskesmas	5.1a.1 Peningkatan akses pemberian BPJS kesehatan	5.a Jumlah pasien kapitasi puskesmas
6	Pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1 Terlaksananya pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1a Peningkatan pelayanan non kapitasi rujukan pasien BPJS	6.1a.1 Peningkatan akses pemberian BPJS kesehatan	6.a Jumlah pasien non kapitasi rujukan pasien BPJS
7	Pelayanan non kapitasi persalinan	7.1 Terpenuhihinya pelayanan non kapitasi persalinan	7.1a Peningkatan pelayanan non kapitasi persalinan	7.1a.1 Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu yang sedang mengalami persalinan	7.a Jumlah pasien non kapitasi persalinan
8	Kapitasi untuk rawat inap	8.1 Tercapainya pasien binaan dokter keluarga untu rawat inap	8.1a Peningkatan pasien kapitasi untuk rawat inap	8.1a.1 Peningkatan perlengkapan puskesmas dengan fasilitas rawat inap	8.a Jumlah pasien yang mendapatkan kapitasi rawat inap

IX. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANAN DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1	Pengadaan puskesmas keliling	1.1 Terselenggaranya puskesmas keliling di setiap kecamatan	1.1a Pengadaan puskesmas keliling setiap kecamatan	1.1a.1 Peningkatan pengadaan puskesmas keliling	1.a Jumlah puskesmas keliling yhang ada di setiap kecamatan
2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2.1 Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas	2.1a Pembiayaan diprioritaskan kepada sapras yang sangat penting dan mendesak	2.1a.1 Peningkatan kualitas sapras puskesmas	2.a Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang diadakan
3	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	3.1 Tercapainya rehabilitasi puskesmas yang rusak minimal 30%	3.1a Peningkatan rehab sedang/berat puskesmas	3.1a.1 Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas	3.a Persentase puskesmas yang di rehabilitasi

X. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1	Perencanaan pembangunan rumah sakit umum daerah	1.1 Terwujudnya rumah sakit umum daerah	1.1a Pembiayaan sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat	1.1a.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1.a Terbangun 1 rumah sakit umum daerah di tempat yang strategis
---	---	---	--	--	--

XI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

1	Penyuluhan kesehatan anak balita	1.1 Tercapainya kesehatan balita yang berkualitas	1.1a Meningkatkan pemahaman orang tua akan pentingnya kesehatan sejak balita	1.1a.1 Peningkatan penyuluhan kesehatan untuk anak balita	1.a Jumlah balita sehat yang terdata di puskesmas atau poli kesehatan
2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	2.1 Terlaksananya pelatihan dan pendidikan perawatan balita	2.1a Peningkatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	2.1a.1 Peningkatan kompetensi perawa/bidan/tenaga kesehatan dalam merawat anak balita	2.a Jumlah perawat bayi atau orang tua yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan merawat balita

3	Surveilance/pelacakan kasus kematian bayi	3.1 Terselenggaranya pelacakan kasus kematian bayi	3.1a Pemberian akses kepada masyarakat mengenai data kelahiran bayi	3.1a.1 Peningkatan pelacakan kasus kematian bayi	3.a Jumlah kematian bayi yang ditemukan
XII. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA					
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	1.1 Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan berbasis Masyarakat	1.1a Peningkatan kebiasaan hidup sehat dan teratur serta lingkungan yang bersih	1.1a.1 Peningkatan pemeliharaan kesehatan secara komprehensif	1.a Jumlah permukiman dan perumahan yang sadar akan pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan
2	Pelayanan kesehatan	2.1 Terlaksananya SPM kesehatan secara konsisten dan terencana	2.1a Peningkatan pelayanan kesehatan	2.1a.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2.a Jumlah orang yang puas terhadap pelayanan kesehatan
XIII. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK					
1	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	1.1 Tercapainya pemeliharaan kesehatan ibu hamil secara rutin	1.1a Peningkatan perawatan dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil	1.1a.1 Peningkatan pelayanan dan perawatan kepada ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1.a Jumlah ibu hamil yang rutin diperiksa ke puskesmas atau poliklinik
2	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	2.1 Terpenuhinya persalinan gratis bagi ibu hamil yang kurang mampu	2.1a Peningkatan persalinan dengan bidan secara gratis	2.1a.1 Peningkatan kualitas persalinan ibu dari keluarga kurang mampu	2.a Jumlah keselamatan ibu melahirkan
3	Kemitraan bidan dan dukun	3.1 Terlaksananya kemitraan bidan dan dukun	3.1a Kerjasama positif antara teknik modern kesehatan dengan tradisi turun temurun keluarga ataupun lingkungan	3.1a.1 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder kesehatan ibu dan anak	3.a Jumlah bidan dan dukun yang tersedia di setiap dusun

XIV. PROGRAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN					
1	Pengumpulan data kesehatan	1.1 Terselenggaranya data kesehatan yang lengkap dan valid	1.1a Selain data sekunder, diutamakan memperoleh data primer	1.1.a.1 Validasi dan realibilitas data kesehatan	1.a Dokumen kesehatan masyarakat (jumlah dan jenis kesehatan masyarakat)
XV. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KESEHATAN					
1	Peningkatan mutu manajemen kesehatan	1.1 Terepenuhinya manajemen kesehatan yang berkualitas dan standar mutu yang baik	1.1a Melaksanakan SOP dari perencanaan sampai MONEV dan pelaporan	1.1.a.1 Reformasi manajemen kesehatan secara utuh dan terpadu	1.a Jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan semakin profesional dan baik
2	Penyusunan dokumen perencanaan program SPM dan MDGS	2.1 Tercapaiinya tujuan pembangunan millenium kesehatan	2.1a Pelaksanaan SPM secara bertahap dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan millenium kesehatan	2.1.a.1 Peningkatan kualitas SPM dan MDGS	2.a Jumlah SPM kesehatan yang terlaksana di masyarakat
3	Evaluasi pengelolaan keuangan	3.1 Tercapaiinya SOP keuangan yang transparan dan akuntabilitas	3.1a Pemanfaatan keuangan dengan prioritas kebutuhan dan tercatat dengan baik dan disiplin	3.1.a.1 Pelaporan kegiatan fisik dan keuangan secara transparan dan akuntabel	3.a Jumlah keuangan yang masuk dengan efisiensi yang diterapkan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIAANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMANGUNAN MANUSIA

NC		PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
KEGIATAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN					
1	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	1.1 Terpenuhi sarana dan prasarana di kawasan/permukiman kumuh	1.1a Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kawasan perumahan/permukiman kumuh secara bertahap, seperti keterseediaan MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan	1.1a.1 Menjaga ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air rumah dan pengelolaan sanitasi	1.a Jumlah MCK, sanitasi, air bersih dan lampu penerangan jalan meningkat
		1.2 Terpuinnya Penampungan Air Hujan buat masyarakat miskin khususnya	1.2a Penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH)	1.2a.1 Stop buang sampah dan air besar sembarangan serta gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1.b Jumlah Penampungan Air untuk masyarakat miskin semakin bertambah
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.1 Terlaksananya pemberdayaan komunitas perumahan	2.1a Pembersihan perit dan bahan baku	2.1a.1 Meningkatkan akses masyarakat berpendapat rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta tertib pengurusan IMB	2.a Jumlah kegiatan pemberdayaan komunitas perumahan meningkat

3	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	3.1 Terpenuhinya perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	3.1a Pendataan yang akurat untuk memperbaiki perumahan akibat bencana alam/sosial	3.1a.1 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendataan infrastruktur air minum dan sanitasi	3.a Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana alam/sosial
II. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN					
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.1 Teraksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	1.1a Melaksanakan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman baik berupa kegiatan pembangunan secara bertahap	1.1a.1 Peningkatan pemeliharaan dan tertib pengurusan lahan pemakaman	1.a Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara setiap tahunnya

RT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAUULATAN PANGAN					
NO	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN					
1	Peningkatan produksi padi	1.1 Terlaksananya peningkatan produksi padi Kubu Raya	1.1a Pencetakan sawah baru dan perluasan area pangan lainnya	1.1a.1 Pernetakar sawah baru	1.a Produksi padi (pangan utama) meningkat dari tahun sebelumnya
2	Rapat koordinasi evaluasi DEMAPAN, F2KP dan daerah rawan pangan	2.1 Terlaksananya rapat koordinasi masalah pangan	2.1a Peningkatan koordinasi dan konsolidasi organisasi dan program pangan	2.1a.1 Peningkatan konsolidasi organisasi dan kegiatan DEMAPAN, P2KP dan daerah rawan pangan	2.a Minimal setiap 3 bulan sekali rapat koordinasi masalah pangan
3	Peningkatan teknologi pertanian dan perikanan	3.1 Terperuhnya alat dan mesin pertanian dan perikanan	3.1a	3.1a.1 Bantuan alat dan mesin pertanian-perikanan	3.a Setiap desa di setiap kecamatan mendapatkan bantuan alat dan mesin
4	Peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.1 Terperuhnya rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.1a Memprioritaskan Kecamatan yang menjadi lumbung desa untuk pertanian Kubu Raya	4.1a.1 Rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan waduk	4.a Setiap kecamatan minimal 1 rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan 2 waduk
5	Peningkatan diversifikasi pangan dan sumber protein	5.1 Terlaksananya produksi pangan lainnya (diversifikasi pangan : jagung, kedelai, gula) dan produksi sumber protein	5.1a Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan dan protein yang sehat	5.1a.1 Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat	5.a Meningkatkan produksi diversifikasi pangan dan produksi sumber protein (dagang sapi dan ikan)

Handwritten signature in blue ink.

6	Peningkatan penyaluran subsidi pupuk dan benih serta penguatan Desa Mandiri Benih	6.1 Terpenuhnya pupuk dan benih kepada masyarakat tani	6.1a Kelancaran distribusi subsidi pupuk dan akses benih kepada masyarakat	6.1a.1 Penyaluran subsidi pupuk dan benih serta pengembangan Desa Mandiri Benih	6.a Meningkatkan persebaran pupuk dan benih di tengah-tengah petani
7	Penyaluran beras sejahtera (Rastra) KKR	7.1 Terpenuhnya beras sejahtera untuk RTSPM	7.1a Pendataan yang valid untuk masyarakat yang berhak mendapatkan Rastra	7.1a.1 Bantuan penyaluran beras sejahtera (Rastra)	7.a Semua Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
8	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	8.1 Terlaksananya penanganan gangguan terhadap produksi pangan	8.1a Bantuan input produksi akibat bencana dan pengembangan budaya adaptif	8.1a.1 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	8.a Meningkatkan penanganan gangguan terhadap produksi pangan
9	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	9.1 Terpenuhnya pangan dan gizi masyarakat	9.1a Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	9.1a.1 Advokasi diversifikasi konsumsi (termasuk ikan)	9.a Peningkatan pangan dan gizi masyarakat
10	Penyelenggaraan peringatan HKP, HPS dan PKK Tingkat Propinsi	10.1 Terselenggaranya peringatan HKP, HPS dan PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi	10.1a Penyelenggaraan HKP, HPS, dan PKK dari tingkat desa sampai provinsi	10.1a.1 Mendorong kreativitas dan inovasi rumah tangga dalam memaknai peringatan HKP, HPS dan PKK	10.a Di setiap Desa menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peringatan HKP, HPS, dan PKK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEJU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	KEMARITIMAN DAN KELAUTAN				
	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN					
1	Peningkatan produksi penangkapan ikan legal	1.1 Terlaksananya keekonomian nelayan lokal dan penegakan hukum perikanan liar	1.1a Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan (KKP, Bakamla, Polair)	1.1a.1 Pemberantasan tindakan perikanan liar (ilegal)	1.a Jumlah perikanan liar yang dapat ditangani/ditangkap
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi maritim dan kelautan	2.1 Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang berwawasan dan berbudaya bahari dalam kehidupan sehari-hari	2.1a Memasukkan wawasan dan budaya bahari dalam muatan lokal	2.1a.1 Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan iptek Kelautan	2.a Jumlah sekolah yang memasukkan wawasan dan budaya bahari dalam muatan lokal
3	Peningkatan kompetensi SDM dan Iptek Kelautan	3.1 Terpenuhinya SDM dan Iptek Kelautan yang berkualitas	3.1a Konsolidasi dengan pusat dalam rangka dukungan real akan SDM dan Iptek Kelautan	3.1a.1 Peningkatan bantuan SDM dan Iptek Kelautan	3.a Jumlah SDM dan Iptek Kelautan semakin meningkat

4	Distribusi penjualan hasil laut oleh nelayan setempat/lokal	4.1 Terpenuhi nya distribusi penjualan hasil laut tanpa ijon	4.1a Membantu dalam proses penjualan dan distribusi pasar (tidak diatur oleh ijon, tapi ada koperasi yang mewadahi)	4.1a.1 Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakata pesisir	4.a Jumlah tangkapan ikan oleh nelayan setempat
5	Meningkatkan pengadaan armada sungai/laut	5.1 Terselenggaranya sistem transportasi lokal dan kewilayahan secara aman dan tertib	5.1a Meningkatkan pembangunan sistem transportasi lokal dan kewilayahan	5.1a.1 Membina dan ikut menjaga keseimbangan transportasi sungai/laut yang berorientasi lokal dan kewilayahan	5.a Jumlah armada transportasi sungai/laut meningkat
6	Peningkatan kualitas lingkungan air	6.1 Terselenggaranya pelestarian lingkungan air khususnya	6.1a Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, swasta, LSM dan masyarakat pesisir dalam menjaga kestabilan ekosistem sungai dan rawa	6.1a.1 Konservasi kawasan perairan dan rehabilitasi pesisir, serta meningkatkan kualitas lingkungan sungai dan rawa	6.a Jumlah lahan dan area yang direhabilitasi dan tidak terkena perusakan atau pencemaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA JRAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAUHLATAN ENERGI					
NC	KEGIATAN	STRATEGI	SASARAN	TARGET 2017	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN					
1	Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	1.1 Memberi pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya stabilitas ekosistem lingkungan/hutan	1.1.a Tercapainya kelestarian lingkungan dan pelaksanaan AMDAL	1.1.a.1 Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1.a Jumlah kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan
II. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN					
1	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.1 Memudah akses bantuan PLTS atau pembangunan pembangkit listrik dengan energi alternatif	1.1.a Terpenulihnya listrik di daerah 3T	1.1.a.1 Peningkatan kualitas pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.a Jumlah pengguna PLTS dan tenaga listrik dengan sumber energi alternatif lainnya

Handwritten signature

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDINYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

NO	PARIWISATA				
	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pelaksanaan promosi pariwisata	1.1 Terselenggaranya promosi pariwisata ke daerah terdekat dan negara yang berbatasan langsung dengan kalbar	1.1a Bekerjasama dengan daerah dan negara tetangga terdekat dalam membangun kerjasama promosi	1.1a.1 Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan nusantara dan mendorong peningkatan wisatawan manca negara	1.a Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat 10% dari tahun sebelumnya
		1.2 Memperkuat sinergisasi dengan stakeholder pariwisata di kalbar	1.2a Terlibat langsung dalam kepanitiaan dan ikut serta menjadi sponsorship kegiatan	1.2a.1 Mengikutsertakan aparaturnya dalam berbagai pendidikan formal dan teknis fungsional	1.b Terlaksananya minimal 2 kali event besar bekerjasama dengan Provinsi Kaltar
		1.3 Wisatawan nusantara yang belum mengenal dan mengetahui Kabupaten Kubu Raya	1.3a Membandingkan kerjasama yang solid dengan stakeholder pariwisata yang ada di daerah terdekat atau yang sudah berpengalaman	1.3a.1 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan	1.c Terpenyuhnya program mempromosikan keunggulan dan ciri khas Kabupaten Kubu Raya

	1.4	wisatawan nusantara dan mancanegara, terutama negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalbar	1.4a	Pelaksanaan yang sinergis dengan program propinsi dan nasional sehingga memudahkan pengkondisian dan promosi	1.4a.1	Membangun kerjasama khususnya dengan Negara Malaysia yang mempunyai 5 wilayah perbatasan langsung dengan malaysia	1.d	Selama 3 hari pelaksanaan dikunjungi masyarakat di luar kalbar minimal 1jt orang	
II. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA									
1	Pengembangan 10 destinasi wisata	1.1	Terpenuhinya pengembangan 10 destinasi wisata oleh penggeliat wisata khususnya dan masyarakat umumnya	1.1a	Menawarkan paket-paket wisata yang menarik dan tidak mahal serta ramah lingkungan	1.1a.1	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	1.a	Bergairahnya persaingan usaha travel dan menghidupkan potensi unggulan daerah
	1.2	Memperkuat koordinasi stakeholder pariwisata di Kabupaten Kubu Raya	1.2a	Peretapan Rancangan Peraturan Daerah Tertang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	1.2a.1	Koordinasi lintas sektoral dalam penetapan kawasan pariwisata di dalam RTRW dan perencanaan kawasan pariwisata di dalam RDTR	1.b	Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tentang Tata Ruang Wilayah Kubu Raya Tahun 2016-2035	
	1.3	Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang sehat	1.3a	Perciptaan Destinasi Wisata yang aman dan tertib	1.3a.1	Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan keterliban Destinasi Wisata	1.c	Kenyamanan Destinasi Wisata yang dibuat/dibangun	
	1.4	Terwujudnya promosi andalan dua tempat wisata andalan Kabupaten Kubu Raya	1.4a	Perbangunan sarana dar pra sarana transportasi dan fasilitas umum lainnya	1.4a.1	Meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata	1.d	Meningkatkan Sadar wisata dan sapta pesona masyarakat Kubu Raya	

	1.5	Pembangunan dan pemeliharaan Keraton untuk tidak lupa dengan sejarah	1.5a	Perdanaan diri Pemda, masyarakat dan swasta secara rutin dan berkala untuk Keraton Kubu	1.5a.1	Penataan Kawasan Keraton Kubu	1.e	Terpelihara dan tertatanya Keraton Kubu sebagai ikon Kabupaten Kubu Raya	
III. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN									
1	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	1.1	Terwujudnya pengembangan SDM yang terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata	1.1a	Pelatihan yang rutin dilaksanakan lembaga kepariwisataan dengan pelaku usaha pariwisata (hotel, kuliner, dan pengelola destinasi wisata)	1.1a.1	Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional	1.a	Setiap tahun 100 orang dilibatkan dalam peningkatan kompetensi dan seni
2	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	2.1	Terwujudnya SDM pariwisata yang handal dan bertanggung jawab	2.1a	Memberikan kesempatan kepada stakeholder kepariwisataan untuk bekerjasama dengan daerah atau lembaga pendidikan kepariwisataan dan hotel yang sudah maju	2.1a.1	Membangun sumber daya manusia pariwisata	2.a	Owner hotel dan restoran yang kompeten dan profesional
3	Pelatihan Pemandu Wisata	3.1	Terlaksananya pelatihan pemandu wisata asing khususnya	3.1a	Perda bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata untuk memberikan pelatihan kepada pemandu wisata	3.1a.1	Meningkatkan kompetensi pemandu wisata terutama pemandu wisata lokal setempat	3.a	Minimal 50 pemandu wisata yang dilatih setiap tahunnya

4	Monitoring dan Pembinaan terhadap usaha / kegiatan di bidang pariwisata	4.1 Terselenggaranya monitoring terhadap Hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Kubu Raya	4.1a Tim more ev yang lintas sektoral dalam rangka pembinaan yang komprehensif dan terpadu	4.1.3.1 Peningkatan kualitas monitoring terhadap usaha kepariwisataan	4.a Monev dilaksanakan setiap 4 bulan sekali
5	Pelaksanaan pagelaran dan promosi pariwisata tingkat nasional	5.1 Terselenggaranya promosi Kabupaten Kubu Raya yang dikenal luas dari sabang sampai merauke	5.1a Menggalakkan potensi lokal dari keunggulan kompetitif lainnya sebagai bahan promosi pariwisata	5.1.3.1 Peningkatan sosialisasi dan promosi potensi lokal Kabupaten Kubu Raya	5.a Minimal satu kali dalam setahun
6	Sosialisasi Peraturan Kepariwisataan	6.1 Terselenggaranya sosialisasi perda kepariwisataan kepada Owner dan stakeholder kepariwisataan khususnya	6.1a Perberian sa nksi yang tegas kepada owner hotel dan restoran yang tidak mengikuti sosialisasi	6.1.3.1 Peningkatan kualitas Perda kepariwisataan	6.a Dalam satu tahun terlaksana 2 kali sosialisasi peraturan kepariwisataan kepada stakeholder pariwisata
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BIDANG EKONOMI KREATIF					
1	Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	1.1 Terselenggaranya Bimtek Pengembangan Industri dan Usaha Kecil Pariwisata	1.1a Pelaku usaha ekonomi kreatif	1.1.3.1 Dalam satu tahun terlaksana 2 kali Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	1.a Menyusun dan menggunakan informasi pembangunan bidang pariwisata ekonomi kreatif
2	Sosialisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	2.1 Terlaksananya sosialisasi aturan HKI kepada masyarakat	2.1a Pelaku dan plagiat ekonomi kreatif khususnya, dan masyarakat umumnya	2.1.3.1 Semakin tingginya kesadaran pelaku dan plagiat ekonomi kreatif untuk tidak plagiat atau meniru tanpa izin	2.a Menguatkan kelembagaan pariwisata ekonomi kreatif

3	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Kreatif	3.1	Monev yang sinergis dengan perencanaan dan pelaksanaan sehingga terukur parameter yang dicapai	3.1a	Serius stake holder melakukan evaluasi bersama untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian target	3.1.a.1	Peningkatan perbaikan manajemen ekonomi kreatif	3.a	Minimal setiap TW anggaran dilaksanakan monev
4	Workshop Animasi	4.1	Terselenggaranya workshop animasi	4.1a	Membarung komunikasi efektif dan kegiatan yang fokus kepada cara animasi	4.1.a.1	Semakin banyaknya yang berminat dengan kegiatan animasi	4.a	Jumlah workshop animasi yang diadakan dan yang diikuti
5	Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.1	Kabupaten Kubu Raya terlibat aktif dalam peserta Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.1a	Potensi-potensi unggulan dan pelaku ekonomi kreatif dan sektor-sektor unggulan di prioritaskan	5.1.a.1	Minimal 50 pelaku ekonomi kreatif dan sektor-sektor unggulan mengikuti Event Kreatif Tingkat Provinsi Kalbar	5.a	Jumlah event yang diikuti Kabupaten Kubu Raya di Tingkat Provinsi
6	Festival Seni dan Musik Tradisional	6.1	Melibatkan masyarakat dan pelaku seni dan musik tradisional secara komprehensif	6.1a	SDM yang terkait dengan pelaku seni dan musik tradisional	6.1.a.1	Menjadi unggulan tahunan kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kubu Raya	6.a	Jumlah festival seni dan musik tradisional yang dilaksanakan setiap tahun

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN					
NO	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
I. PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI PRODUKTIF					
1	Pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dan aparaturnya	1.1 Terlaksananya pendampingan masyarakat desa dan aparaturnya	1.1a Peningkatan pendampingan desa sesuai aturan positif dengan memperhatikan tradisi desa setempat	1.1a.1 Memperkuat pendampingan masyarakat desa dan aparaturnya	1.a Jumlah pendamping dan didampingi yang terlibat dan kegiatan desa
2	Menggalakan pembentukan lembaga keuangan mikro (non Bank)	2.1 Terwujudnya lembaga keuangan mikro (non Bank) yang dapat menunjang usaha masyarakat	2.1a Mendorong dan meyakinkan masyarakat akan penting dan berguna lembaga keuangan yang berbasis komunitas/anggota	2.1a.1 Memperkuat lembaga keuangan berbasis komunitas (perekonomian pedesaan)	2.a Jumlah lembaga keuangan mikro (non Bank) dan anggota yang terlibat
3	Penggalakan pemuda sebagai penggerak dan pelopor ekonomi pedesaan	3.1 Terbentuknya wirausaha-wirausaha yang handal dan pantang menyerah	3.1a Memasukan nilai-nilai kewirausahaan semenjak pendidikan dasar (anak dan remaja)	3.1a.1 Memantapkan nilai-nilai kewirausahaan kepada masyarakat desa	3.a Jumlah wirausaha yang ada di Kube Raya
II. PROGRAM PENINGKATAN TARAF HIDUP PENDUDUK YANG BEREKONOMI TERBAWAH					
4	Membuka lapangan kerja dan berusaha	4.1 Terlaksananya investasi padat karya	4.1a Mendorong aktivitas ekonomi untuk mendukung investasi padat karya	4.1a.1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya	4.a Jumlah investasi padat karya yang diciptakan

5	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	5.1 Penguatan sistem yang terkait dengan penyediaan layanan dasar	5.1a Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung pelayanan dasar	5.1a.1 Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat desa	5.a Jumlah pelayanan dasar yang dapat diberikan
6	Peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan bertanggung jawab	6.1 Terlaksananya penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif	6.1a Membarui penyaluran Bidik Misi, KIS, KIP, KKS, perluasan cakupan SSN dan bantuan Tunai Bersyarat/PKH secara tepat sasaran dan bertanggung jawab	6.1a.1 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan miskin dengan membantu pemerintah pusat dalam menyelesaikan program Bantuan Sosial	6.a Jumlah lahan dan area yang direhabilitasi dan tidak terkena perusakan atau pencemaran



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUEU RAYA,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
INDIKATOR NO.10 : TERSEDIAANYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEEKUIJAKAN DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN**

NC		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDESAAN/TRANSMIGRASI					
1	Peningkatan pembangunan perdesaan dan transmigrasi berfokus pada pelayanan dasar	1.1 Terlaksananya pembangunan yang berfokus pada pelayanan dasar	1.1.3 Pembangunan yang berfokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perumahan-permukiman	1.1.a.1 Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa	1.a Jumlah anak yang bersekolah, rujukan masyarakat ke puskesmas, ketersediaan sanitasi dan pemukiman yang layak huni
2	Pembangunan desa terpadu	2.1 Terwujudnya pembangunan desa terpadu	2.1.3 Sinerji pembangunan desa terpadu	2.1.a.1 Pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota	2.a Jumlah desa terpadu yang dapat dibangun
3	Pembangunan perdesaan/transmigrasi yang berwawasan lingkungan	3.1 Terwujudnya ruang kawasan perdesaan/transmigrasi yang berwawasan lingkungan	3.1.3 Penataan ruang kawasan perdesaan/transmigrasi menuju klasifikasi permukiman	3.1.a.1 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan	3.a Jumlah permukiman yang terbentuk
4	Pembangunan sumber daya insani perdesaan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal	4.1 Terwujudnya SDM perdesaan/transmigrasi yang handal dan tetap menjaga kearifan lokal	4.1.3 Peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan mempertahankan modal masyarakat desa/transmigrasi	4.1.a.1 Pembangunan SDM, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa	4.a Jumlah SDM yang menjadi pelopor dan inovator dalam membangun desa/transmigrasi

II. PEMBANGUNAN PERKOTAAN					
5	Meningkatkan daya saing dan penerapan sistem on line satu atap dalam pengurusan perizinan	5.1 Terlaksananya pembangunan perkotaan yang berdaya saing dan berbasis TIK	5.1a Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan	5.1a.1 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang berdaya saing dan berbasis TIK	5.a Jumlah keluhan dan kritikan masyarakat menurun dalam pelayanan yang diberikan
6	Pembangunan Kota yang berbasis pada ketahanan iklim dan bencana	6.1 Terwujudnya Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	6.1a Pelaksanaan pembangunan kota yang wajib memperhatikan lingkungan dan pencemaran	6.1a.1 Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	6.a Luasan areal yang dapat digunakan untuk ketahanan iklim dan bencana

RT

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

INDIKATOR NO.10 : TERSEDIA NYA URAIAN STRATEGI DAN ARAH KEELOKAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

REFORMASI BIROKRASI					
NO	KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1. PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM INFORMASI PERIJINAN					
1	Peningkatan proses perijinan dengan sistem IT secara transparan dan bertanggung jawab	1.1 Terleaksananya pembuatan perijinan melalui sistem IT	1.1a Merbangun sistem IT (e-commerce) dalam melayani perijinan	1.1a.1 Memperkuat sistem IT dalam proses perijinan	1.a Jumlah perijinan yang dikeluarkan melalui IT
2	Peningkatan kompetensi dan memperkuat integritas birokrat dalam melayani publik	2.1 Terwujudnya birokrat yang profesional, melayani dan berorientasi hasil	2.1a Merbangun dan memperkuat birokrat yang profesional, melayani dan berorientasi hasil	2.1a.1 Birkorasi yang berorientasi melayani, bukan dilayani	2.a Jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan birokrasi
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas perijinan	3.1 Terwujudnya proses perijinan satu pintu dan jalur yang lebih sederhana	3.1a Memperkecil jalur/proses perijinan menjadi lebih sederhana dan cepat	3.1a.1 Proses perijinan satu pintu tanpa pungli dan tepat waktu yang telah ditentukan	3.a Jumlah perijinan yang dikeluarkan tepat waktu tanpa pungli

61

II. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

4 Meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi	4.1 Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan transparan	4.1a Membangun manajemen birokrat yang kuat dan bersih	4.1a.1 Membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel	4.a Jumlah temuan 'eror' dalam pelaporan keuangan
5 Menerapkan aturan dari hukum yang tegas terhadap birokrat	5.1 Terwujudnya aturan dan hukum yang tegas bagi birokrat yang melanggar aturan	5.1a Menegakkan disiplin dan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada birokrat yang melanggar aturan	5.1a.1 Memberikan sanksi yang tegas dan terukur sesuai dengan aturan yang berlaku	5.a Jumlah sanksi yang diberikan kepada birokrat
6 Pelaksanaan pengawasan dan monev kegiatan	6.1 Terlaksananya pengawasan dan monev yang terencana dan berkala	6.1a Melaksanakan pengawasan dan monev secara rutin setiap TW pekerjaan	6.1a.1 Pengawas, monev, dan pelaporan keuangan yang terukur dan bertanggung jawab	6.a Jumlah monev dan pelaporan yang disampaikan

RF


BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017****5.1 Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, Prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Baik dan Berwibawa (terkait dengan isu good governance);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas (terkait dengan isu sosial-budaya);
3. Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah (terkait dengan isu ekonomi); serta
4. Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat (terkait dengan isu infrastruktur/kewilayahan).

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

A. Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program Pendidikan Non Formal
 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 7. Program Meringankan Biaya Pendidikan
 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan
 9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 

12. Program Penyehatan Lingkungan
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
18. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
19. Program Keluarga Berencana
20. Program Pelayanan Kontrasepsi
21. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
22. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
23. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
24. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
26. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
27. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Harus menjadi program prioritas tersendiri dan melibatkan semua SKPD/Badan/Kecamatan)
28. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
29. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

B. Peningkatan Kesejahteraan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C. Peningkatan Infrastruktur

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (LLAJ)
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (LLAJ)
19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (LLAJ)
21. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas (LLAJ)

22. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (LLAJ)
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
28. Pemerataan Pembangunan Antar Desa, Kecamatan dan Kota (Dalam RKP 2017 terdapat Tiga Dimensi Pembangunan, salah satunya adalah Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang terdiri atas Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan, Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pengembangan Konektivitas Nasional). Dipertegas kembali dalam 9 Program Prioritas Nasional (NAWACITA) di Nomor 3 disebutkan bahwa “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.
29. Peningkatan Pembangunan Maritim dan Kelautan (Masih terkait dengan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dipertegas dalam MISI PEMBANGUNAN NASIONAL yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 di nomor 1 dan 6, yaitu “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”, dan “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”, fakta juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya mengandalkan transportasi sungai dan laut, pencarian nafkah masyarakatnya nelayan, serta potensi perikanan dan kelautan yang berlimpah),

D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan
13. Peningkatan Kesadaran Pembangunan Politik dan Hukum (Sesuai dengan isu strategis daerah dan nasional, yaitu pelaksanaan Pilkada Daerah 2017, 2018 dan Pemilu 2019), Dalam MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019 di nomor 2 disebutkan bahwa “Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan Negara hukum”.

E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan
16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Program analisis mengenai dampak lingkungan harus menjadi program prioritas karena kondisi iklim dan perubahan alam yang begitu drastis menjadikan ruang hidup dan berusaha semakin terbatas)
19. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
21. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu
5. Program Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
6. Program Pemberdayaan Kecamatan
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2017

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang diusulkan melalui APBD Kabupaten diperkirakan sebesar Rp. 1.488.879.053.539,71 Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.085.427.065.975,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 403.451.987.564,71.

Proyeksi dari Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.494.379.053.539,71 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 133.939.888.901,71 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung tidak semuanya terakomodir dalam dokumen RKPD.

Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp. 894.932.515.775,00 dengan rincian Belanja Gaji Pokok/Tunjangan Total sebesar Rp. 461.807.665.775,00 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 241.907.950.000,00, Belanja Hibah

sebesar Rp. 15.000.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.000.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 171.494.550.200,00 dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 77.211.484.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 93.283.066.200,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 403.451.987.564,71 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rekapitulasi estimasi jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2017 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :



Tabel 5.1

Estimasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425.229.423.085,00	85.053.855.709,00	510.283.278.794,00
2	Dinas Kesehatan	48.075.861.101,00	51.435.033.928,00	99.510.895.029,00
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	3.960.162.392,00	100.497.947.884,00	104.458.110.276,00
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan	3.526.450.682,00	99.088.692.888,00	102.615.143.570,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.015.955.074,00	3.910.804.452,00	6.926.759.526,00
6	Dinas Perhubungan	4.410.434.829,00	4.379.420.100,00	8.789.854.929,00
7	Badan Lingkungan Hidup	2.353.305.325,00	4.639.854.048,00	6.993.159.373,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.182.406.368,00	2.200.000.000,00	5.382.406.368,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.687.211.119,00	5.917.891.500,00	8.605.102.619,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	3.890.075.607,00	2.900.000.000,00	6.790.075.607,00
11	Dinas Koperasi dan UMKM	2.788.845.687,00	3.100.000.000,00	5.888.845.687,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.736.785.873,00	2.900.000.000,00	5.636.785.873,00
13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga	2.293.425.566,00	2.900.000.000,00	5.193.425.566,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	859.989.532,00	600.000.000,00	1.934.823.475,00

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.334.823.475,00	4.590.028.500,00	5.450.018.032,00
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.954.735.100,00	-	11.954.735.100,00
17	Bupati dan Wakil Bupati	588.554.221,00	-	588.554.221,00
18	Sekretariat Daerah	10.143.859.000,00	59.000.000.000,00	69.143.859.000,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.727.235.473,00	19.000.000.000,00	21.727.235.473,00
20	Inspektorat Daerah	4.104.432.983,00	3.100.000.000,00	7.204.432.983,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	2.802.241.864,00	5.000.000.000,00	7.802.241.864,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.939.671.885,00	6.000.000.000,00	10.939.671.885,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	2.225.622.568,00	5.700.000.000,00	7.925.622.568,00
24	Kecamatan Sungai Raya	2.197.430.490,00	690.000.000,00	2.887.430.490,00
25	Kecamatan Kuala Mandor B	1.489.228.428,00	590.000.000,00	2.079.228.428,00
26	Kecamatan Sungai Ambawang	1.660.468.905,00	600.000.000,00	2.260.468.905,00
27	Kecamatan Terentang	1.431.711.709,00	600.000.000,00	2.031.711.709,00
28	Kecamatan Batu Ampar	1.770.104.733,00	700.000.000,00	2.470.104.733,00
29	Kecamatan Kubu	1.779.069.042,00	580.000.000,00	2.359.069.042,00
30	Kecamatan Rasau Jaya	1.696.563.058,00	640.000.000,00	2.336.563.058,00

31	Kecamatan Teluk Pakedai	1.624.725.080,00	620.000.000,00	2.244.725.080,00
32	Kecamatan Sungai Kakap	1.994.046.883,00	800.000.000,00	2.794.046.883,00
33	Dinas Pedapatan Daerah	3.193.881.772,00	4.400.000.000,00	7.593.881.772,00
34	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.492.237.594,00	2.700.000.000,00	5.192.237.594,00
35	Kantor Kerasipan dan Perpustakaan Daerah	1.217.501.663,00	900.000.000,00	2.117.501.663,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.331.704.009,00	3.000.000.000,00	5.331.704.009,00
37	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.178.177.307,00	34.423.952.000,00	39.602.129.307,00
38	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	9.053.993.613,00	4.086.157.500,00	13.140.151.113,00
39	Dinas Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan	8.609.951.617,00	9.099.076.765,00	17.709.028.382,00
40	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.591.046.193,00	9.981.063.626,00	13.572.109.819,00
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.799.473.922,00	9.981.063.626,00	7.229.663.722,00
	Sub Total (A)	603.942.824.827,00	550.753.968.700,00	1.154.696.793.527,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No	Rincian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
1	2	3	4	5
1	Belanja Hibah	6.261.473.230,00	-	6.261.473.230,00
2	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	124.312.653.000,00	-	124.312.653.000,00
4	Belanja Tidak Terduga	550.000.000,00	-	550.000.000,00
	Sub Total (B)	133.624.126.230,00	-	133.624.126.230,00
	Jumlah Total (A + B)	737.566.951.057,00	550.753.968.700,00	1.288.320.919.757,00

Sumber : Data Kompilasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 ;

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 ini, dikemukakan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Tahun 2017. Rencana Program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini. Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 Kabupaten Kubu Raya disajikan pada Lampiran I.

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 419 usulan program dan 2.507 kegiatan yang berhasil dihimpun dengan mencantumkan asal sumber dana untuk program dan kegiatan yang mereka usulkan. Dari usulan tersebut usulan yang bersumber pendanaan dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 905.220.210.300, Pendanaan dari APBD Provinsi sebesar Rp. 389.900.010.100, Pendanaan dari APBN Rp. 1.174.527.500.000 sedangkan dari APBDes sebesar Rp. 1.467.500.000. Akan tetapi usulan hasil musrenbang Kecamatan ini akan dipertimbangkan oleh SKPD yang memang menjadi kewenangan mereka dan kegiatan tersebut memang telah masuk dalam Renstra SKPD mereka.

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2017 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya 2014-2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang juga merupakan penjabaran dari tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah pada tahun awal periode RPJMD di Tahun 2017. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2017 dengan mendasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2017 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”***.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Mei 2016
Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 14

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI